PRESS GATHERING PIMPINAN MPR DAN WARTAWAN PARLEMEN

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

EMPAT PILAR MPR

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

EDISI NO.12/TH.XIII/DESEMBER 2019

EMPAT PILAR MPR RI PENANGKAL PAHAM RADIKALISME

18 **Nasional**
Waspadai Ancaman Terhadap Ideologi Kita Pancasila

39 **Selingan**
Sepuluh Bali Baru 4 Juta Wisatawan Mancanegara

48 **Sosialisasi**
MPR Sosialisasikan 4 Pilar di Pulau Bawean

ISSN 0854-6371

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

MAJELIS

MAJALAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

SOSIALISASI
EMPAT PILAR MPR RI

Pancasila Sebagai Dasar dan Ideologi Negara
UUD NRI Tahun 1945 Sebagai Konstitusi Negara
NKRI Sebagai Bentuk Negara
Bhinneka Tunggal Ika Sebagai Semboyan Negara

EMPAT PILAR MPR

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MPR - RI

INDONESIA

MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

EMPAT PILAR MPR

PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MPR - RI

INDONESIA

MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS
MAJALAH INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI

EMPAT PILAR MPR
PANCASILA, UUD NRI TAHUN 1945, NKRI, BHINNEKA TUNGGAL IKA

MPR - RI

INDONESIA
MPR RUMAH KEBANGSAAN PENGAWAL IDEOLOGI PANCASILA DAN KEDAULATAN RAKYAT

Daftar Isi

06 BERITA UTAMA

Empat Pilar MPR RI Penangkal Radikalisme

Solusi untuk menangkal dan meredusir paham radikalisme hanya dengan menjadikan anak bangsa mengerti sejarah bangsa dan memahami secara benar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, pentingnya NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

14 Nasional
Press Gathering Pimpinan MPR dengan Wartawan Parlemen

48 Sosialisasi
MPR Sosialisasikan Empat Pilar di Pulau Bawean

39 SELINGAN
Sepuluh Bali Baru

76 Profil
A. Wahab Dalimunthe

Pengantar Redaksi 04

Diskusi Majelis 36

Aspirasi Masyarakat 47

Majelis Khusus 55

Varia MPR 68

Wawancara 70

Figur 72

Gema Pancasila 74

Catatan Tepi 80

Bicara Buku 82

COVER
Edisi No.12/TH.XIII/Desember 2019
Kreatif: Jonni Yasrul - Foto: Istimewa

Budi Muliawan
Koordinator Reportase

Pengantar Redaksi

Menangkal Paham Radikalisme

PEMERINTAH sudah berulangkali menyampaikan tentang bahaya dan ancaman radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketika mengumumkan Kabinet Indonesia Maju pada Oktober lalu, Presiden Joko Widodo menyebutkan soal radikalisme ketika menunjuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Tak hanya Menteri Agama, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia Maju juga memakai narasi soal bahaya radikalisme.

Terakhir, pada Selasa, 12 November 2019, sejumlah kementerian dan lembaga terkait menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penanganan radikalisme bagi kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ada 11 instansi (kementerian/lembaga) yang ikut menandatangani SKB tersebut, antara lain: Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PANRB, Kementerian Agama, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), dan Komisi Apartur Sipil Negara (KASN).

Hanya berselang satu hari setelah penandatanganan SKB, terjadi peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 13 November 2019. Kepolisian menyatakan pelaku diduga terpapar paham radikal. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diserang oleh orang tak dikenal dengan pisau saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis 10 Oktober 2019. Kepolisian menduga pelaku terpengaruh paham radikal ISIS. Kedua peristiwa ini semakin menguatkan narasi bahwa paham radikalisme memang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Tak bisa dipungkiri aksi terorisme berawal dari paham radikalisme. Karena itu, paham radikalisme akan sangat mengganggu eksistensi dan masa depan NKRI. Bahaya paham radikalisme sudah tidak bisa dipandang sebelah mata. Apalagi paham radikalisme ini sudah menyebar ke banyak sendi kehidupan masyarakat. Paham radikalisme sudah menyasar berbagai kalangan mulai dari siswa, pelajar, hingga mahasiswa bahkan sampai ASN.

Sebut saja beberapa riset dan survei sebelumnya, antara lain survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) yang dipublikasi pada 2010 hingga 2011. Survei ini menemukan 52% pelajar setuju paksi radikalisme. Survei tersebut juga menyebutkan 24% siswa dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. Kemudian ada 84,4% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia. Survei lain yang dilakukan Setara Institut menyebutkan, ada 10 Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme.

Dalam konteks itulah, peran sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila sebagai dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara) sangat penting dan diperlukan dalam menangkal paham radikalisme. Salah satu cara mencegah agar paham radikalisme dan terorisme tidak tumbuh subur di Tanah Air adalah dengan mempertahankan nilai-nilai Ke-Indonesiaan yang dirangkum dalam Empat Pilar MPR. Sosialisasi Empat Pllar MPR diyakini bisa menjadi sarana untuk menangkal paham radikalisme dan terorisme.

Karena itu pemahaman Empat Pilar kebangsaan harus dilakukan secara intensif, terstruktur, sistematis, dan masif. Terutama pemahaman Empat Pilar bagi kalangan siswa, pelajar, dan mahasiswa mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sekolah dasar, sekolah menengah, hingga perguruan tinggi. Empat Pilar MPR yang terdiri dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika inilah yang dapat membendung paham radikalisme dan terorisme. ❑

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI KONSTITUSI
MAJELIS

PENASEHAT
Pimpinan MPR-RI
PENANGGUNG JAWAB
Ma'ruf Cahyono
PEMIMPIN REDAKSI
Siti Fauziah
DEWAN REDAKSI
Yana Indrawan, Dyastasita, Heri Herawan, Maifrizal
REDAKTUR PELAKSANA
Budi Muliawan
KOORDINATOR REPORTASE
Budi Muliawan
REDAKTUR FOTO
Oni Arief Benyamin, Sucipto, Slamet Eko Suprayitno
REPORTER
Ana Suzana, Yenita Revi, Tengku Novan Muda Mulya
FOTOGRAFER
Ahmad Suryana, Frinda, Restu, Suprianto, Sugeng, Wira, A. Ariyana, Agus Darto
PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Elen Magdalena
KOORDINATOR DISTRIBUSI
Cucu Riwayati
STAF DISTRIBUSI
Ati Oktafia, Amiruddin, Anggun Permana, Kiki Tri Murjono, Armansyah, Dhita Fitasari Junaid
SEKRETARIS REDAKSI
Djarot Widiarto
TIM AHLI
Syahril Chili, Jonni Yasrul, Ardi Winangun, Budi Sucahyo, Derry Irawan, M. Budiono

ALAMAT REDAKSI
Bagian Pemberitaan dan Layanan Informasi, Biro Humas, Sekretariat Jenderal MPR-RI
Gedung Nusantara III, Lt. 5
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6, Senayan, Jakarta 10270.
Telp. (021) 57895237, 57895238
Fax.: (021) 57895237
Email: pemberitaan@setjen.mpr.go.id

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-04_R1.pdf 1

12/10/2019 4:46:57 PM

Implementasi Sila-sila Pancasila

- Berhenti saling menyakiti, mulailah saling menghargai
- Berhenti saling merendahkan, mulailah menghormati perbedaan
- Berhenti takabur, mulailah bersyukur

- Stop marah-marah, mulailah bersikap ramah
- Berhenti memaki, mulailah memakai hati
- Berhenti curiga, mulailah menyapa.

- Berhenti berseteru, mulailah bersatu
- Berhenti memaksakan, mulailah berkorban
- Berhenti mencari perbedaan, mulailah bergandeng tangan

- Berhenti silang pendapat, mulailah mencari mufakat
- Berhenti besar kepala, mulailah berlapang dada
- Berhentilah bersilat lidah, mulailah bermusyawarah

- Berhenti malas, mulailah bekerja keras
- Stop diskriminasi, mulailah toleransi
- Berhenti menang sendiri, mulailah berbagi

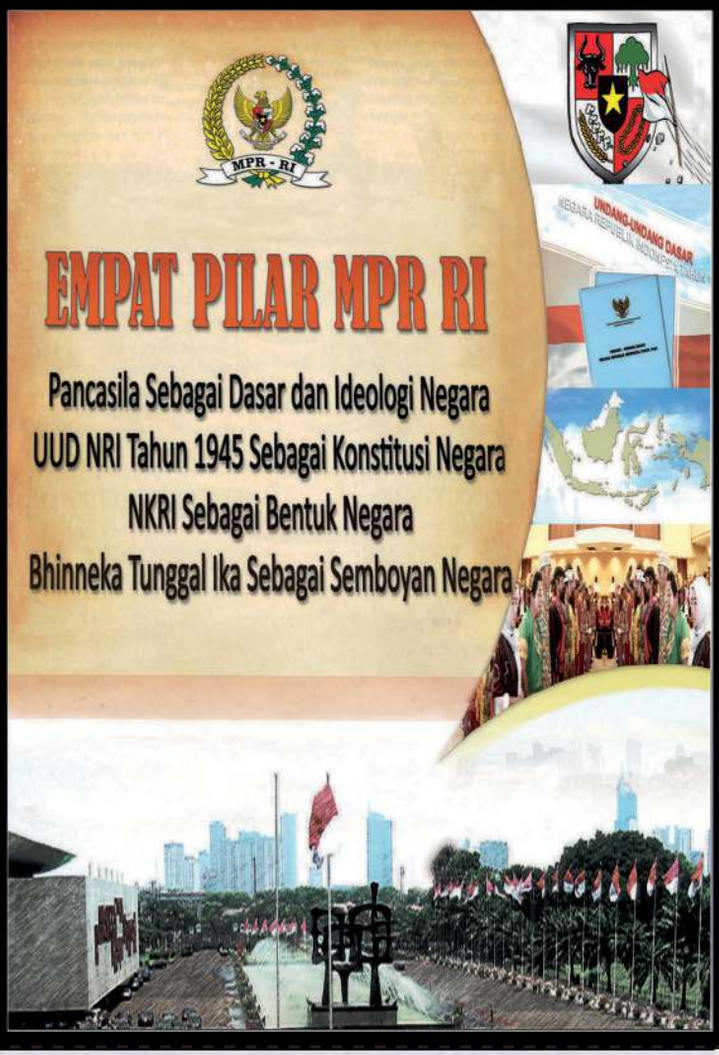

ILUSTRASI: SUSTHANTO

Empat Pilar MPR RI

Penangkal Paham Radikalisme

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Solusi untuk menangkal dan meredusir paham radikalisme hanya dengan menjadikan anak bangsa mengerti sejarah bangsa dan memahami secara benar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, pentingnya NKRI, dan semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika.

SEBUAH backdrop besar terpampang di panggung. Di back drop itu terpampang tulisan berbunyi: "Launching Portal Aduan ASN dan Penandatanganan SKB Penanganan Radikalisme ASN". Perwakilan 11 instansi terdiri dari enam kementerian dan lima lembaga berdiri bergandengan tangan di depan sebuah meja panjang. Mereka baru saja menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) Penanganan Radikalisme ASN dalam acara yang berlangsung di Grand Hotel Sahid Jaya, Jakarta, pada 12 November 2019. Ini merupakan bentuk sinergitas dan koordinasi antarkementerian/lembaga untuk menangani tindakan radikalisme di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Penandatanganan dilakukan oleh perwakilan 11 instansi yang turut menyusun SKB Penanganan Radikalisme ASN, yaitu: Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate, Sekretaris Kementerian PANRB Dwi Wahyu Atmaji, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Mohamad Nur Kholis Setiawan, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Bambang Rantam Sariwanto, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Didik Suhardi, Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara Zaelani, Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme A. Adang Supriyadi, Plt. Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Hariyono, Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara Supranawa Yusuf, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Agus Pramusinto.

Dalam SKB ini ada sejumlah aturan yang harus diikuti oleh ASN atau PNS agar tidak terjerumus dalam paham radikalisme. SKB ini juga mengatur pembentukan Satgas Khusus yang menangani ASN yang terindikasi terpapar radikalisme. Tugas Satgas ini di antaranya menerima pengaduan dari masyarakat melalui portal aduanasn.id.

Sedangkan kategori pelanggaran yang bisa dilaporkan antara lain menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis, melalui media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan pemerintah; menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tertulis melalui media sosial, yang bermuatan ujaran kebencian terhadap salah satu suku, agama, ras, dan antar-golongan; menyebarluaskan pendapat yang bermuatan ujaran kebencian melalui media sosial (share, broadcast, upload, retweet, repost Instagram, dan sejenisnya).

Terlepas dari pro kontra di masyarakat terkait dengan SKB itu (belakangan civil society menentang lahirnya SKB itu), tampaknya

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-06_R1.pdf 1

12/10/2019 4:51:05 PM

pemerintah memang serius menangani soal radikalisme. Sejak pembentukan Kabinet Indonesia Maju pada Oktober lalu, pemerintah sudah bertekad meredusir paham radikalisme. Penunjukan Menteri Agama dari kalangan purnawirawan militer salah satunya adalah upaya menekan paham radikalisme. "Tugasnya menangani paham radikalisme," kata Presiden Joko Widodo kala menunjuk Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi sebagai Menteri Agama Kabinet Indonesia Maju.

Radikalisme menjadi salah satu ancaman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Ketua Fraksi Partai Demokrat MPR RI, Benny K. Harman, menegaskan bahwa saat ini Indonesia menghadapi beberapa persoalan dan tantangan. Tantangan dan ancaman itu dikategorikan dalam empat bentuk. Pertama, ancaman dan persoalan ketidakadilan dan kemiskinan. Kedua, ancaman dan persoalan terhadap demokrasi. "Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal," katanya dalam diskusi "MPR Rumah Kebangsaan" di acara Press Gathering Pimpinan MPR dan Koordinatoriat Wartawan Parlemen, di Denpasar, Bali, pada 15 November 2019.

Ketiga, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. "Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila," ujarnya. Keempat, persoalan yang berkaitan dengan kebhinnekaan sebagai entitas dan realitas bangsa Indonesia. Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antarkelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan.

Berkembangnya paham radikalisme membahayakan NKRI. Bahkan paham radikalisme disinyalir berkembang di semua lini kehidupan. Paham ini menyasar siswa, pelajar, mahasiswa, hingga Aparatur Sipil Negara (lihat bagian dua "Paham Radikalisme Menyasar Pelajar, Mahasiswa, Hingga ASN"). Adapun contoh konkretnya, antara lain peristiwa bom bunuh diri di Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, pada Rabu 13 November 2019. Polisi menyatakan, pelaku bom bunuh diri diduga terpapar paham radikalisme. Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, diserang oleh orang tak dikenal dengan pisau saat melakukan kunjungan kerja di Pandeglang, Banten, Kamis 10 Oktober 2019. Kepolisian menduga pelaku, Syahril Alamsyah alias Abu Rara, terpengaruh paham radikal ISIS. Kedua

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-07_R1.pdf 1 12/10/2019 4:52:21 PM

peristiwa ini semakin menguatkan narasi bahwa paham radikalisme memang menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

Istilah Radikalisme

Lalu, bagaimana paham radikalisme dari kaca mata pemerintah? Fachrul Razi sepaham dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) soal definisi radikalisme. Yaitu, sebuah pandangan atau paham yang menginginkan perubahan secara total dan revolusioner dengan menjungkirbalikkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui aksi-aksi teror dan kekerasan.

Menteri Agama mengungkapkan sedikitnya ada empat unsur paham radikalisme. "Jadi ada empat unsur radikalisme, yaitu pertama, intoleran dengan orang lain yang berbeda, mengingkari fakta sosiologis kebhinnekaan. Kedua, adanya konsep takfiri, yang mengkafir-kafirkan atau menyalahkan pihak lain di luar kelompoknya. Ketiga, memaksakan kehendak dengan berbagai dalil, termasuk dalil agama yang disalahtafsirkan, dan keempat, cara-cara kekerasan, baik verbalistik maupun fisik," papar Menag di Mabes AD Dinas Pembinaan Mental, Matraman, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Definisi itu tak jauh berbeda dengan arti radikalisme yang disebutkan Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Namun, Arsul Sani lebih spesifik dengan menyebutkan radikalisme sebagai paham yang merongrong Empat Pilar (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika). Radikal atau radikalisme dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah menentang secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi terhadap empat konsensus bernegara kita atau Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dan ingin menggantinya dengan satu sistem bernegara yang lain. "Ini bisa dikatakan sebagai stadium tertinggi dari radikal atau paham radikalisme itu," jelas Arsul Sani kepada Majelis.

Anggota MPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Muchammad Nabil Haroen, lebih menyukai istilah ekstrimisme dibandingkan radikalisme. Istilah radikalisme masih bisa diperdebatkan. "Radikal itu bermakna opini atau perilaku yang menyukai perubahan ekstrim, khususnya dalam pemerintahan atau politik. Saya lebih suka menggunakan istilah ekstrimisme, yakni kelompok atau person yang bergerak secara ekstrim untuk kerusakan bangsa atau negara dengan latar belakang politik," katanya kepada Majelis.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Menurut Nabil Haroen, gerakan ekstrimis itu muncul karena latar belakang politik, keterpinggiran dari akomodasi kekuasaan, kekecewaan politik, yang kemudian bertemu dengan paham agama yang serampangan. Ini yang menjadi latar belakang dari sebagian besar kelompok ekstrimis di Indonesia maupun di level internasional. Sedangkan ide-ide tentang khilafah, syariah, dan semacamnya hanyalah label untuk menggali motivasi.

El Nino M. Hoesein

"Pesan intinya adalah untuk mengacaukan kekuasaan atau pemerintah, sekaligus berusaha membangun formasi baru. Kita punya banyak sekali contoh dalam sejarah kebangsaan dan keIndonesiaan. Gerakan DI/TII, serta munculnya Negara Islam Indonesia (NII) menjadi contoh nyata betapa gerakan ini diwarnai latar belakang politik yang berkelindan dengan agama," jelasnya.

Anggota MPR dari Fraksi Partai Gerindra, El Nino M. Hoesein, juga berpendapat bahwa definisi radikalisme mesti diperbaiki. Hampir sama seperti Arsul Sani, El Nino juga berpendapat bahwa radikalisme adalah paham yang merongrong Pancasila dan ingin mengganti dasar negara.

"Radikalisme dalam definisi itu tidak berkaitan dengan agama, tetapi merupakan gerakan satu, dua atau lebih kelompok orang yang ingin memaksakan ideologi kelompoknya masing-masing untuk meruntuhkan Pancasila," katanya kepada Majelis.

Sekretaris Fraksi Partai Gerindra MPR ini menyebutkan dua hal utama yang menjadi faktor munculnya paham radikalisme. Pertama, karena perkembangan informasi dan teknologi yang terlalu liberal dan bebas. Perkembangan informasi dan teknologi ini sangat berpengaruh pada kehidupan bermasyarakat. Apalagi informasi dan teknologi yang liberal itu sudah menjangkau anak bangsa sejak usia dini. Paham-paham radikalisme bisa masuk melalui perkembangan informasi dan teknologi yang liberal.

Kedua, dalam perkembangan informasi dan teknologi yang bebas itu, di sisi lain seluruh penyelenggara negara masih minim dalam membumikan Pancasila kepada anak-anak bangsa sejak dini. “Jika penyelenggara negara tidak berusaha lebih keras dalam mengatasi dua masalah ini maka radikalisme akan mengancam Pancasila--yang berarti mengancam negara secara utuh,” tegas El Nino.

Sosialisasi Empat Pilar MPR RI

Terkait paham radikalisme, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sudah sejak periode MPR 2009 – 2014 atau era Ketua MPR Taufiq Kiemas kemudian berlanjut pada MPR 2014 – 2019 era Ketua MPR Zulkifli Hasan, telah menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara. Bisakah sosialisasi Empat Pilar MPR yang dijalankan MPR sebagai amanah UU MD3 menangkal paham radikalisme?

Wakil Ketua MPR Arsul Sani berpendapat, sosialisasi Empat Pilar MPR itu bisa menjadi sarana untuk menangkal paham-paham radikalisme. “Tentu pendekatannya harus berbeda. Agar sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai sarana menangkal paham radikal dan radikalisme berhasil maka metodenya harus tepat,” ujarnya.

Arsul Sani menambahkan, kerja-kerja menjaga keutuhan negara dan ideologi, dasar, dan prinsip bernegara, serta konstitusi negara harus terus menerus dilakukan. Meskipun masih terjadi aksi-aksi radikalisme, bukan berarti pemasyarakatan dan sosialisasi Empat Pilar MPR tidak berhasil.

“Seharusnya kesimpulannya adalah upaya pembumian, sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus-menerus diperbaiki. Karena, meskipun kita telah melakukan sosialisasi, ternyata radikal atau paham radikalisme masih saja terjadi. Artinya, perlu evaluasi, perbaikan, bahkan mungkin perubahan metode dalam penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR,” katanya.

Sejalan dengan Arsul Sani, El Nino mengakui bahwa salah satu lembaga negara yang bekerja keras untuk menangkal

Arsul Sani

radikalisme sejauh ini hanya MPR. Namun, MPR memiliki keterbatasan. Dengan segala keterbatasan, tidak mungkin MPR bisa membasmi radikalisme secara tuntas. “Solusi untuk menangkal dan meredusir paham radikalisme hanya dengan menjadi anak bangsa mengerti sejarah bangsa dan memahami secara benar Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, pentingnya NKRI, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika,” kata El Nino.

Untuk mewujudkan solusi itu, El Nino berharap, negara dapat melakukan dua upaya. Pertama, memperkuat MPR agar lebih meningkatkan intensitas, kualitas, dan kreativitas dalam menyosialisasi Empat Pilar MPR. Kedua, mengembalikan pelajaran Pendidikan Moral Pancasila (PMP) agar diwajibkan dan diajarkan di seluruh tingkat sekolah, mulai dari sekolah dasar hingga menengah, baik sekolah negeri maupun swasta. “Pengajaran PMP ini dapat dimodifikasi sedemikian rupa sesuai konteks kekinian dengan tujuan membuat Pancasila selalu ada di bibir, di hati, dan di pikiran manusia Indonesia,” tuturnya.

Muchammad Nabil Haroen

Sebaliknya, Nabil Haroen menekankan pentingnya operasional atau manifestasi nilai-nilai Empat Pilar itu. Sebab, jika nilai-nilai itu dioperasionalkan secara formal dengan aturan-aturan yang kaku maka hanya menjadi seremonial saja. “Sudah bertahun-tahun program deradikalisasi itu berjalan, dengan sekian lembaga, tapi hasilnya begitu saja. Bahkan, muncul ASN yang terang-terangan tidak mengakui Pancasila,” katanya.

Karena itu, Nabil Haroen mengharapkan ada penyegaran program dan strategi baru untuk menghadapi kelompok ekstrimisme. “Ideologi harus dilawan dengan ideologi. Dari titik ini jangan sampai pemerintah mengecilkan peran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan ormas-ormas lain dalam penanganan ekstrimisme. Kiai-kiai di kampung itulah sejatinya pengamal Empat Pilar kebangsaan sesungguhnya, sebagai pencegah meluasnya ekstremis,” paparnya.

“Kita perlu melibatkan lebih intensif ormas-ormas yang punya massa besar, yang mengakar di masyarakat. Ini penting dan jadi bukti

bahwa selama ini program-program yang ada terlihat elitis dan seremonial,” imbuhnya.

Nabil Haroen menambahkan perlu evaluasi terhadap program deradikalisasi. “Harus ada evaluasi, harus jelas alat ukurnya. Kalau tidak ada alat ukur yang jelas dengan capaian dan indikator kinerja, maka tidak bisa dievaluasi. Seolah-olah berbagai kementerian dan unit kerja sibuk dengan program deradikalisasi, namun tidak tepat sasaran, hanya selebrasi. Komunitas-komunitas yang selama ini menjadi benteng terdepan menghadapi kelompok ekstrim, menyadarkan dan mendidik masyarakat, jangan kita abaikan. Negara harus berterima kasih,” katanya lagi. ❑

DER/EFP/BSC

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-09_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:30

Paham Radikalisme Menyasar Pelajar, Mahasiswa, Juga ASN

Dewasa ini paham radikalisme sudah benar-benar menjadi ancaman. Paham radikalisme ini disinyalir telah menyusup dan menyebar ke semua lini kehidupan, mulai dari siswa dan pelajar, mahasiswa, hingga aparatur sipil negara (ASN).

Kepala BNPT Rapat Kerja dengan Komisi III DPR

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBETULNYA, apa arti dari radikalisme? Para ahli menyebutkan, arti radikalisme adalah suatu ideologi (ide atau gagasan) dan paham yang ingin melakukan perubahan pada sistem sosial dan politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau ekstrim. Dengan kata lain, sikap dan tindakan seseorang atau kelompok menggunakan cara-cara kekerasan dalam mencapai perubahan yang diinginkan. Kelompok radikal ini umumnya menginginkan perubahan dalam tempo singkat dan drastis yang bertentangan dengan sistem sosial yang berlaku.

Itu sebabnya radikalisme sering dikaitkan dengan terorisme. Pasalnya, pelaku aksi terorisme melakukan cara apapun untuk mencapai keinginan dan tujuannya. Pada dasarnya radikalisme adalah masalah politik dan bukan ajaran agama. Contohnya, adanya kelompok ISIS (Islamic State of Iraq and Syria) yang melakukan aksi-aksi teror terhadap beberapa negara di dunia. Meskipun menggunakan simbol agama, aksi terorisme ISIS tidak bisa dikaitkan atau menggambarkan ajaran dari agama tertentu, dalam hal ini Islam. Sebab, umat Islam pun mengutuk aksi teror yang dilakukan ISIS.

Radikalisme sebenarnya sudah ada sejak zaman dahulu. Benih-benih radikalisme sesungguhnya ada pada diri setiap manusia. Istilah "radikalime" baru muncul pertama kali setelah Charles James Fox memaparkan tentang paham tersebut pada 1797. Saat

Suhardi Alius

Syarifuddin Sudding

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-10_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:31

itu, Charles James Fox menyerukan "reformasi radikal" dalam sistem pemerintahan di Britania Raya (Inggris). Gerakan itu untuk mendukung revolusi parlemen di Inggris. Pada akhirnya ideologi radikalisme tersebut berkembang dan berbaur dengan ideologi liberalisme.

Dewasa ini paham radikalisme sudah benar-benar menjadi ancaman. Di Indonesia sendiri paham radikalisme ini disinyalir telah menyusup dan menyebar ke semua lini kehidupan. Bahkan, Menteri Pertahanan sebelumnya, Ryamizard Ryacudu, memperkirakan kurang lebih 3% anggota TNI telah terpapar paham radikalisme. Angka ini relatif cukup besar. Kalau melihat jumlah TNI aktif saat ini sekitar 800.000 personel, artinya sekitar 24.000 orang anggota TNI terpapar paham radikalisme.

Namun, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius meragukan data yang disebutkan Ryamizard Ryacudu. Dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (21/11/2019), Suhardi menyatakan, pernyataan mantan Menteri Pertahanan itu tidak akurat.

"Silakan Bapak tanya Pak Menhan (Ryamizard Ryacudu) karena kami juga tidak punya data itu. Bahkan saya dengar juga akan ada penelitian masalah tersebut. Jadi, data tidak pernah kami dapatkan tapi kami dapatkan informasi-informasi," kata Suhardi.

"Jadi statement itu belum akurat?" tanya anggota DPR, Syarifuddin Sudding.

"Tidak akurat pak. Tidak ada data sama sekali. Mungkin Bapak bisa tanya sama Mabes TNI," jawab Suhardi.

Selain TNI, Ryamizard juga menyampaikan temuan lainnya. Misalnya, sebanyak 23,3% mahasiswa di seluruh Tanah Air setuju dengan wacana negara Islam atau khilafah. Kemudian 23,3% siswa SMA setuju dengan hal yang sama. Lalu ada 18,1% pegawai tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Selanjutnya ada 19,4% ASN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Data lain adalah 9,1% pegawai BUMN menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila. Angka-angka ini memperlihatkan paham radikalisme terus tumbuh.

Sejalan dengan temuan itu, Direktur Riset Setara Institute, Halili menyebutkan, terdapat 10 perguruan tinggi negeri (PTN) di Indonesia terpapar paham radikalisme. Dari hasil riset yang dilakukan, gelombang radikalisme itu dibawa oleh kelompok keagamaan yang eksklusif. "Corak kegiatan keislaman di kampus (yang terpapar radikalisme itu) monolitik. Cenderung dikooptasi oleh golongan Islam tertentu yang tertutup dan eksklusif," katanya dalam diskusi "Membaca Peta Wacana dan Gerakan Keagamaan di PTN" di Jakarta Pusat, pada Mei silam.

Fachrul Razy

Riset tersebut dilakukan oleh Setara Institute pada Februari-April di 10 Perguruan Tinggi Negeri, yaitu Universitas Indonesia (UI), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Institut Teknologi Bandung (ITB), UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Institut Pertanian Bogor (IPB), dan Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Negeri Yogyakarta (UNY), Universitas Brawijaya (Unibraw), Universitas Mataram (Unram), dan Universitas Airlangga (Unair).

M. Oded Danial

Tak hanya 10 PTN itu, perguruan tinggi lain juga terpapar paham radikalisme. Sebut saja Universitas Jember. Berdasarkan laporan studi pemetaan gerakan radikalisme yang dilakukan Tim Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Jember pada 2018, sebanyak 22% mahasiswa Unej terpapar radikalisme. Dari angka itu, 25% masuk dalam radikalisme teologis yang setuju dengan pengkafiran, qital, dan jihad. Sedangkan 20% lainnya masuk dalam radikalisme politis, yaitu setuju pada konsep negara Islam atau khilafah

Sementara itu, untuk radikalisme di kalangan pelajar, Menteri Agama Fachrul Razy mengungkapkan, sebagian besar pelajar Indonesia mendukung aksi radikalisme. Mengutip survei Lembaga Kajian Islam dan Perdamaian (Lakip) yang dipublikasi pada tahun 2010 hingga 2011, Fachrul menyebutkan 52% pelajar setuju dengan aksi radikalisme. "Tingginya tingkat kesetujuan kaum pelajar akan aksi atau tindakan radikal memasuki angka yang sangat mengkhawatirkan," ujarnya.

Lebih rinci, survei Lakip menyebutkan, sebanyak 52,3% siswa setuju dengan kekerasan untuk solidaritas agama dan 14,2% membenarkan serangan bom. Survei tersebut juga menyebutkan 24% dan 21% guru menyatakan Pancasila tidak lagi relevan. Kemudian ada 84,4% siswa dan 76,2% guru setuju dengan penerapan syariat Islam di Indonesia.

Lebih parah lagi, Walikota Bandung M. Oded Danial menyebutkan, sekitar 600 orang siswa setingkat SD terpapar radikalisme. "Ada 600 anak (yang terpapar radikalisme). Ada SMP bahkan katanya SD juga di kota Bandung," ungkap Oded di Pendopo, Kota Bandung, Selasa (29/10/2019).

Oded mengaku memperoleh data itu berdasarkan intelijen Kapolrestabes Bandung. Karena itu dia mengimbau kepada orang tua dan guru di Bandung agar melakukan pengawasan. Terutama kepada orang tua, para kepala sekolah, dan guru untuk mencegah anak menjadi korban dan terpapar paham radikalisme. ❑

BSC

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Arsul Sani, Wakil Ketua MPR RI

Sosialisasi Empat Pilar MPR Bisa Menangkal Radikalisme

AKSI teror bom bunuh diri terjadi lagi di Mapolrestabes, Medan, Sumatera Utara, pada Rabu, 13 November 2019. Aksi ini langsung dikaitkan dengan paham radikalisme. Kepolisian menyatakan bahwa pelaku aksi bom bunuh diri itu diduga terpapar paham radikalisme. Padahal pemerintah Indonesia, sejak pembentukan Kabinet Indonesia Maju, sudah menggaungkan untuk memerangi paham radikalisme. Aksi bom bunuh diri semakin menguatkan narasi pemerintah untuk melawan paham radikalisme.

Sosialisasi Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dijalankan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bisa menjadi penangkal terhadap paham radikalisme. Untuk mengetahui lebih jauh upaya menangkal radikalisme melalui sosialisasi Empat Pilar MPR, ***Majelis*** *mewawancarai Wakil Ketua MPR Arsul Sani. Berikut petikan wawancara dengan politisi PPP itu.*

Seberapa besar bahaya radikalisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia?

Kalau kita bicara tentang paham radikal atau radikalisme dalam konteks berbangsa dan bernegara maka kita harus mengetahui dulu apa radikal atau paham radikalisme itu dalam konteks itu. Pertama, radikal atau radikalisme yang dimaksud di sini adalah menentang secara terbuka maupun sembunyi-sembunyi terhadap empat konsensus bernegara kita atau Empat Pilar MPR (Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) dan ingin menggantinya dengan satu sistem bernegara yang lain. Ini bisa dikatakan sebagai stadium tertinggi dari radikal atau paham radikalisme itu.

Kedua, berbicara paham radikal atau radikalisme ada juga radikalisme yang diam. Artinya, tidak jelas penerimaannya terhadap empat konsensus berbangsa dan bernegara atau Empat Pilar MPR. Tetapi radikalisme model ini menjadi masalah karena ketika dikembangkan di tengah-tengah masyarakat, para pelakunya membawa paham dan cara-cara, sudut pandang yang bertentangan dengan cara pandang dan keyakinan masyarakat yang sudah tertanam selama bertahun-tahun, sehingga pada akhirnya menimbulkan potensi gesekan sosial.

Saya kira ketika kita bicara paham radikal atau radikalisme dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kita batasi pada kedua hal itu. Karena itulah, menurut saya, kita harus punya pemahaman bahwa tidak semua yang radikal itu kita harus hadapi atau harus kita berantas. Sepanjang seseorang itu memiliki cara pandang atau berpikir radikal, tetapi tidak ada urusannya dengan ikhtiar untuk menentang, mengganti, atau mengubah Empat Pilar bernegara, dan sepanjang dia tidak menimbulkan gesekan sosial maka tidak masalah.

Bagi saya orang bisa disebut radikal misalnya orang yang punya paham bahwa bank umum itu haram karena riba. Itu radikal juga tetapi tidak masalah asal tidak meng-

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-12_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:31

kafirkan atau mendholimkan orang yang menggunakan bank umum, bukan bank syariah. Jadi itu yang harus kita pahami lebih dulu bila berbicara tentang radikal atau radikalisme dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara.

Treatment atau perlakuan untuk menghadapi paham radikal atau radikalisme juga berbeda. Terhadap yang pertama (radikal yang ingin mengubah sistem bernegara), kelompok ini harus mendapatkan atensi khusus dan terus-menerus, dan kita tidak boleh lengah. Kita harus mengembangkan cara-cara, mulai dari persuasif sampai pada represif, tergantung situasinya. Tetapi untuk kelompok yang kedua (radikal tetapi tidak berniat mengganti sistem bernegara atau empat konsensus bernegara atau Empat Pilar tetapi bisa menimbulkan gesekan atau benturan sosial), kepada mereka harus dilakukan dengan pendekatan yang soft atau sifatnya preventif.

Apakah treatment seperti yang Bapak maksud sudah dilakukan selama ini?

Saya yakin terhadap jajaran instansi pemerintah atau lembaga-lembaga yang memang tupoksinya menangani paham radikal. Mereka tentu mempunyai pengetahuan soal treatment ini. Tetapi perlu melakukan pembedaan. Saya ambil contoh yang paling sederhana. Misalnya, ada paham-paham keagamaan yang menganggap bahwa khilafah harus diperjuangkan dengan cara apapun. Ini yang harus diberantas.

Tetapi ada juga orang yang berpendapat bahwa khilafah adalah sebuah pemahaman yang juga Islami, ada dalam pemahaman ajaran Islam. Namun, mereka mengatakan bahwa di Indonesia tidak bisa diterapkan karena bangsa ini sudah sepakat untuk memilih bentuk negara NKRI, aturan dasarnya UUD NRI Tahun 1945, dan ideologi negaranya Pancasila. Untuk kelompok seperti ini tidak perlu diberantas meski tidak anti khilafah. Khilafah juga paham kenegaraan dan Islami. Tetapi tidak bisa diterapkan di Indonesia. Jadi jangan diartikan bahwa khilafah itu sesuatu yang terlarang, tidak boleh dipelajari, tidak boleh dijadikan bahan diskusi.

Yang dilarang adalah kalau dia sudah menjadi gerakan dan gerakannya itu masuk dalam wilayah kriminal karena melakukan ikhtiar untuk makar, ikhtiar untuk melakukan tindak kekerasan, terorisme. Menurut saya, seharusnya kita semua, kementerian dan lembaga yang tupoksinya terkait dengan penanganan radikal atau radikalisme, harus melakukan pembedaan-pembedaan. Mau dibedakan menjadi beberapa klasifikasi silakan saja.

Apakah sosialiasi Empat Pilar MPR bisa menangkal paham radikal atau radikalisme ini?

Sosialisasi Empat Pilar MPR itu bisa menjadi sarana untuk menangkal paham-paham radikal tadi. Muaranya adalah menentang atau mengganti Empat Pilar konsensus bernegara itu, dan yang muaranya terjadi gesekan di masyarakat. Tentu pendekatannya harus berbeda. Agar sosialisasi Empat Pilar MPR sebagai sarana menangkal paham radikal dan radikalisme berhasil maka metodenya harus tepat.

MPR sudah sejak lama menyosialisasikan Empat Pilar MPR, tetapi mengapa masih muncul radikal dan paham radikalisme?

Kerja-kerja menjaga keutuhan negara dan ideologi, dasar, dan prinsip bernegara, serta konstitusi negara harus terus-menerus dilakukan. Dalam proses kerja itu akan terjadi situasi yang justru kontra dan berkebalikan dengan apa yang kita inginkan. Ketika terjadi situasi seperti itu maka kita tidak bisa secara terburu-buru mengatakan bahwa kalau begitu upaya pemasyarakatan, sosialisasi Empat Pilar MPR gagal total. Tidak seperti itu. Kesimpulannya tidak seperti itu.

Paling banter kesimpulannya adalah upaya pembumian, sosialisasi Empat Pilar MPR harus terus-menerus diperbaiki. Karena, meskipun kita telah melakukan sosialisasi, ternyata radikal atau paham radikalisme masih saja terjadi. Artinya, perlu evaluasi, perbaikan, bahkan mungkin perubahan metode dalam penyampaian sosialisasi Empat Pilar MPR. Tapi tidak kemudian kita simpulkan bahwa sosialiasinya gagal. Sebab tidak ada pekerjaan yang sifatnya ideologis, filosofis, atau hal-hal yang abstrak, hasilnya bisa bim salabim. Di Amerika, pendidikan tentang demokrasi, tentang persamaan di depan hukum, tentang independensi, tentang konstitusi Amerika penuh dengan berbagai hak-hak warga negara, sudah ratusan tahun diajarkan di sekolah-sekolah. Tetapi toh di Amerika tetap terjadi juga peristiwa-peristiwa terorisme dan lain sebagainya.

Apa pesan Bapak sebagai Wakil Ketua MPR untuk menangkal paham radikal atau radikalisme ini?

Saya punya pesan atau harapan, dalam menangkal paham radikal atau radikalisme jangan bersifat gebyah uyah. Kita harus melakukan pemetaaan. Kita harus melakukan klasifikasi sehingga diagnosa, tindakan, dan sikap kita juga tergantung dari hasil klasifikasi dan pemetaan itu. Sebab, kalau kita gebyah uyah, kita anggap semuanya sama, pasti akan kontraproduktif. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-13_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:32

Press Gathering, Pimpinan MPR dan Wartawan Parlemen

Jazilul Fawaid

Berharap Wartawan Menjadi Penyambung Lidah Pimpinan MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Wartawan memiliki posisi strategis dalam rangka menyebarluaskan berita-berita positif menyangkut kerja-kerja MPR sekaligus bagian dari pilar demokrasi.

MAJELIS Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Press Gathering bersama koordinatoriat wartawan MPR/DPR/DPD RI di Denpasar Bali pada 15 - 17 November 2019. Inilah kegiatan Press Gathering kedua atau terakhir untuk 2019 sekaligus juga Press Gathering pertama yang melibatkan pimpinan MPR dan pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk periode masa bakti 2019-2024.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid secara resmi membuka Press Gathering yang diikuti sekitar 90 wartawan yang setiap hari bertugas di lingkungan Parlemen Jakarta. Turut hadir dalam pembukaan Press Gathering ini pimpinan fraksi dan kelompok DPD di antaranya Benny K. Harman (Ketua Fraksi Partai Demokrat), Taufik Basari (Ketua Fraksi Partai Nasdem), Tifatul Sembiring (Ketua Fraksi PKS), Arwani Thomafi (Ketua Fraksi PPP), Instiawati Ayus (Ketua Kelompok DPD), M. Syafruddin (Fraksi PAN). Juga hadir Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono dan Sekda Pemerintah Provinsi Bali Dewa Made Indra, serta ketua koordinatoriat wartawan parlemen Romdony Setiawan.

Sekretaris Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono selaku penyelenggara Press Gathering menjelaskan, kegiatan yang mengikutsertakan sekitar 90 wartawan parlemen dari berbagai media ini bertujuan, selain untuk refreshing juga agar hubungan baik antara wartawan dan MPR tetap terjaga. Dengan demikian, kata Ma'ruf Cahyono, kerja-kerja MPR bisa terkomunilasi dengan baik dan sampai ke masyarakat.

Masalah hubungan harmonis antara wartawan Parlemen dan Pimpinan MPR juga ditekankan oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid. "Saya meyakini bahwa wartawan memiliki posisi strategis dalam rangka menyebarluaskan berita-berita positif menyangkut kerja-kerja MPR, sekaligus bagian dari pilar demokrasi. Jadi, "Saya berharap teman-teman menjadi penyambung lidah pimpinan MPR dengan

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-14_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:32

rakyat," ujar politisi PKB ini.

Apalagi, lanjut Jazilul Fawaid, tantangan yang dihadapi MPR ke depan semakin berat, terutama berkaitan dengan wacana amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Amandemen membutuhkan kehendak dari semua pihak, bukan hanya kehendak pimpinan MPR yang ada di fraksi-fraksi," ungkap Jazilul Fawaid.

Maka sesuai tema Press Gathering "MPR Rumah Kebangsaan," Jazilul Fawaid berharap, MPR menjadi rumah yang nyaman bagi fraksi dan kelompok DPD dalam menjalankan dan menyalurkan seluruh masalah kebangsaan dalam bingkai Empat Pilar. Jazilul berharap, media ikut mengembangkan jurnalistik kebangsaan. Salah satunya tidak menyebar berita-berita hoax.

Usai acara pembukaan, acara dilanjutkan diskusi dengan menghadirkan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan seluruh pimpinan fraksi dan kelompok DPD yang hadir. ❑

BSC/SCH

Press Gathering, Bali

Diskusi "MPR Rumah Kebangsaan"

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DALAM diskusi, Jazilul Fawaid mengatakan, selain menjalankan tugas konstitusional, MPR juga akan mengkaji lebih mendalam rekomendasi untuk melakukan amendemen UUD terkait dengan keinginan untuk menghadirkan haluan negara. Selain itu menjadi tugas Pimpinan MPR untuk menjadikan MPR sebagai Rumah Kebangsaan yang merekatkan bangsa.

"Terkait rekomendasi MPR periode sebelumnya tentang amandemen, Pimpinan MPR melakukan safari ke pimpinan partai politik dan Ormas untuk menyerap aspirasi soal amendemen UUD terkait hadirnya kembali haluan negara (GBHN)," katanya.

Diskusi dalam rangkaian kegiatan press gathering Pimpinan MPR dengan koordinatoriat wartawan parlemen ini menghadirkan narasumber pimpinan fraksi dan kelompok DPD di antaranya Benny K Harman (F-Partai Demokrat), Tiffatul Sembiring (F-PKS), Taufik Basari (F-Partai Nasdem), Syafrudin (F-PAN), Arwani Thomafi (F-PPP), dan Instiawati Ayus (Kelompok DPD).

Dalam paparannya Jazilul Fawaid mengatakan, Pimpinan MPR mengupayakan MPR sebagai Rumah Kebangsaan yang merekatkan bangsa. Agenda lain MPR adalah Sosialisasi Empat Pilar MPR. "Agenda amendemen, agenda perekat kebangsaan dan agenda lainnya kita harapkan berjalan mulai tahun depan," ujarnya.

Sementara itu Ketua Kelompok DPD Intsiawati Ayus menegaskan, DPD mendukung agenda politik dan agenda ketatanegaraan MPR. Namun DPD belum bisa menyampaikan isu dan materi terkait amendemen UUD. "Nanti akan disampaikan pada ranah rapat gabungan Pimpinan MPR dengan pimpinan fraksi dan kelompok DPD," katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Fraksi Partai Demokrat Benny K. Harman menyebutkan beberapa persoalan dan tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini. Pertama, ancaman serius terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman itu adalah ketidakadilan dan kemiskinan. Kedua, ancaman terhadap demokrasi. Ada kompetisi antara demokrasi individual dan demokrasi komunal. "Ini harus menjadi kajian di MPR," ujarnya.

Ketiga, berkembangnya paham radikalisme dan sekularisme. Keduanya adalah paham yang berbahaya bagi Indonesia. Sekularisme dan radikalisme menjadi ancaman bagi Pancasila.

Keempat, kita mengakui kebhinnekaan sebagai identitas dan realitas bangsa Indonesia. Yang menjadi kerisauan adalah munculnya kompetisi antarkelompok untuk mendominasi visi dan misi bangsa ke depan. "Inilah yang akan kami kaji dengan semangat kebersamaan dijiwai nilai-nilai Empat Pilar MPR," katanya.

Terkait amendemen UUD, Benny mengatakan, setelah 20 tahun amandemen konstitusi, saat ini terjadi dinamika dan perubahan sosial dan muncul tantangan baru. "Tugas MPR adalah mengkaji apakah konstitusi ini masih adaptif, responsif, dengan tuntutan dan perkembangan jaman," paparnya.

"Kita sedang berusaha menjawab perubahan itu tetapi perubahan yang akan kita lakukan tidak boleh melewati batas-batas koridor Empat Pilar MPR. Kalau ada kehendak melakukan perubahan konstitusi maka hal itu merupakan tuntutan zaman. Bukan sesuatu yang aneh. Tapi kita mau perubahan ke arah mana? Apakah perubahan hanya untuk kepentingan sesaat? Atau apakah perubahan hanya untuk kelompok tertentu?" sambungnya.

Untuk menjawab tantangan-tantangan kebangsaan itu, Ketua Fraksi PPP Arwani Thomafi mengatakan, MPR perlu lebih membumikan Pancasila terutama di kalangan millennial. Menjadi tugas alat kelengkapan di MPR, seperti Badan Sosialisasi dan Badan Pengkajian untuk membuat format sosialisasi Empat Pilar MPR yang pas untuk kalangan millennial. "Jadi tidak sekadar sosialisasi Empat Pilar, tapi format yang pas untuk generasi muda. Ini menjadi tantangan MPR dalam menjawab persoalan-persoalan di masyarakat," katanya. ❑

BSC/SCH

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-16_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:32

Dr. Ma'ruf Cahyono

Perlu Sinergitas MPR dan Wartawan Parlemen

SEBELUM kegiatan Press Gathering dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, Sekretaris Jenderal MPR Ma'ruf Cahyono menyampaikan laporan bahwa Press Gathering ini diikuti sekitar 90 wartawan parlemen baik cetak, online maupun elektronik. Press Gathering adalah salah satu kegiatan dari Humas MPR sejak MPR periode lalu. Semula hanya satu kali setahun dan sekarang menjadi dua kali setahun di awal tahun dan akhir tahun.

para jurnalis tidak salah arah dan bisa memproduksi pemberitaan yang positif, konstruktif, dan bermanfaat untuk masyarakat. "Termasuk tentang kegiatan alat kelengkapan MPR, seperti Badan Pengkajian MPR yang dikaitkan dengan wacana-wacana actual, seperti amendemen UUD yang sedang berkembang," ujarnya.

Karena itulah, Ma'ruf Cahyono mengharapkan, para jurnalis bisa memperdalam kegiatan dan wacana di MPR sehingga

melalui kajian yang dilakukan MPR sesuai amanat UU tentang MPR, DPR dan DPD (MD3). "Kita punya data terkait dengan evaluasi sistem ketatanegaran, juga dengan konstitusi misalnya apakah konstitusi kita masih responsif," katanya.

Ma'ruf menambahkan, MPR sudah mempunyai kompilasi kajian tentang hal itu sejak dibentuknya Tim Kajian MPR yang sekarang berubah menjadi Badan Pengkajian MPR. Kajian itu meliputi kajian akademis, aspirasi masyarakat dan survei-survei yang di-

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

Menurut Ma'ruf, Press Gathering merupakan salah satu bentuk kegiatan sinergitas antara MPR dengan wartawan parlemen. Tujuannya adalah untuk mendekatkan jarak dan komunikasi antara seluruh unsur MPR (pimpinan MPR, pimpinan fraksi dan kelompok DPD di MPR serta anggota MPR dari DPR dan DPD) dengan wartawan parlemen. "Agar kesinambungan informasi baik mengenai kegiatan pimpinan MPR maupun fraksi dan kelompok DPD serta alat kelengkapan MPR dapat dilakukan secara masif, konstruktif, dan positif," katanya.

Ma'ruf menyebutkan dengan pertemuan evaluatif semacam Press Gathering ini diharapkan pemberitaan yang dilakukan mendapatkan porsi komunikasi dan informasi yang pas di masyarakat.

Usai pembukaan press gathering, Ma'ruf Cahyono mengungkapkan, Sekretariat Jenderal MPR akan memberikan dukungan administratif, sarana, dan lainnya terkait dengan wacana amendemen UUD. "Kita selalu siap untuk memberikan dukungan. Apalagi politik ini tergantung pada momentum. Karena itulah kita selalu siap memberikan dukungan administratif, teknis, dan yang paling penting soal substansi dan materi jika terjadi amendemen UUD," jelasnya.

Sebab, lanjut Ma'ruf, materi dan substansi untuk amendemen itu sudah berproses dilakukan MPR.

"Kita juga punya data kajian tentang implementasi konstitusi, seperti apakah konstitusi kita sudah diimplementasikan sesuai dengan norma," ujarnya. Kajian-kajian itulah yang menjadi dasar bagi political will para politisi yang nanti bermuara pada proses amendemen UUD jika nanti momentum politiknya menghendaki amendemen UUD.

"Sekarang proses itu sedang berlangsung baik pro dan kontra tehadap amendemen maupun alternatif-alternatif lain di luar amendemen. Tentu Sekretariat Jenderal MPR harus resposif dan melakukan persiapan termasuk substansi dan materinya," ujarnya. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-17_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:32

Sungai Ayung, Gianyar Bali

Wisata Jurnalistik

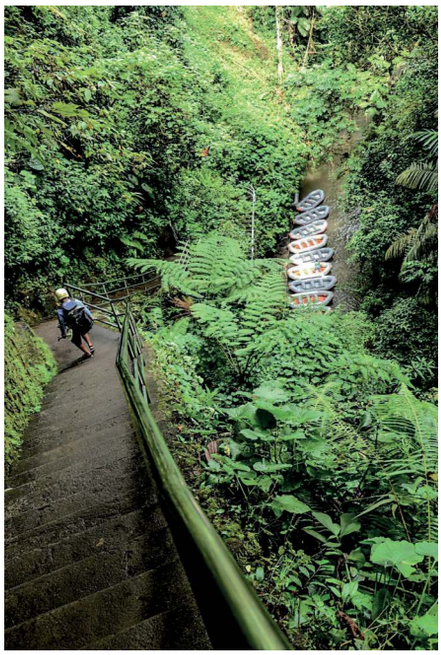

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KEGIATAN Press Gathering yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen Jakarta yang berlangsung 15 hingga 17 November 2019 di Bali, bukan hanya diisi dengan kegiatan diskusi bertema: "MPR Rumah Kebangsaan", namun juga disertai kegiatan Wisata Jurnalistik. Pada hari kedua Press Gathering, tempatnya 16 November 2019, para wartawan peserta Press Gathering mengikuti kegiatan Wisata Jurnalistik, berupa kegiatan adu adrenalin dalam bentuk olahraga Arung Jeram atau biasa disebut dengan olahraga rafting.

Lokasi yang dipilih adalah Sungai Ayung, salah satu sungai di Bali yang dikenal sebagai tempat arung jeram yang cukup seru dan sekaligus seram. Letaknya di Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali. Kegiatan rafting menempuh jarak sekitar 14 km, cukup memacu adrenalin. Tapi, yang lebih seru lagi adalah perjalanan para peserta rafting untuk mencapai bibir sungai yang terletak di jurang yang dalam.

Bagaimana tidak, untuk memulai aktivitas arung jeram, para peserta yang dibagi dalam kelompok – setiap kelompok enam orang – harus menuruni sekitar 300 anak tangga, dan begitu pula setelah tiba di garis finish para peserta kembali harus menaiki anak tangga sebanyak sekitar 200 anak tangga. Maka tak heran, bagi yang tak biasa berolahraga atau kurang pemanasan, bila kurang hati-hati bisa mengalami keram otot.

Tapi, hal yang menyenangkan, selama perjalanan, sejak start hingga finish para peserta bisa menikmati panorama alam di kanan kiri Sungai Ayung nan indah. Salah satunya, air terjun. Dan, di tengah perjalan para bisa istirahat di *rest area*, untuk sekedar menikmati hidangan ringan, berupa makanan dan minuman cepat saji, seperti teh, kopi, dan makan berupa mie instan.

BSC/SCH

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-18_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:33

Bertemu Pimpinan Media Massa

Pimpinan MPR Bahas Amendemen Terbatas UUD NRI Tahun 1945

Menyikapi usulan perubahan terbatas UUD NRI Tahun 1945 untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo bersama pimpinan MPR lainnya bertemu dengan para pemimpin redaksi media massa, di Jakarta, Kamis malam (7/11/2019). Salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan itu adalah soal amendemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 terkait dengan menghadirkan kembali pokok-pokok haluan negara.

Turut hadir para wakil Ketua MPR RI, antara lain Ahmad Basarah (F-PDI Perjuangan), Ahmad Muzani (F-Gerindra), Jazilul Fawaid (F-PKB), Syariffuddin Hasan (F-Demokrat), Hidayat Nur Wahid (F-PKS), dan Arsul Sani (F-PPP).

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menjelaskan, dalam menyikapi usulan perubahan terbatas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) untuk menghadirkan Haluan Negara, MPR RI selain membutuhkan kajian mendalam dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Bamsoet menyatakan, keterlibatan para akademisi dan pakar hukum ketatanegaraan menjadi sangat penting. "Dalam pembentukan Komisi Kajian Ketatanegaraan yang akan membahas secara mendalam tentang rencana perubahan UUD NRI Tahun 1945 ini, pimpinan MPR RI mendorong fraksi-fraksi dan Kelompok DPD untuk mengirimkan perwakilannya, yang bukan hanya memiliki ilmu pengetahuan ketatanegaraan dengan rekam jejak yang jelas serta kapabilitas diri yang sudah teruji, melainkan juga memahami urgensi nilai-nilai yang terkandung dalam UUD. Sehingga tidak ada benang merah yang terputus," terang Bamsoet.

Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, UUD NRI Tahun 1945 bukan hanya jenis norma khusus yang berdiri di puncak piramida normatif, akan tetapi di dalamnya juga termaktub komitmen dan orientasi bangsa Indonesia. Sejak awal perancangan yang dilakukan para pendiri bangsa, maupun saat mengalami empat kali perubahan, selalu ditujukan untuk memberikan panduan arah bangsa dalam mengarungi kehidupan kebangsaan dan menjawab tantangan zaman.

"Di dalamnya ada nafas bangsa Indonesia yang merupakan norma fundamental negara, yang bersumber dari ideologi yang berangkat dari kosmologi bangsa Indonesia, yakni Pancasila," kata Bamsoet. Dengan dipandu oleh norma dasar itu, menurut Bamsoet, kita bercita-cita bangsa Indonesia menjadi bangsa yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Sehingga Indonesia menjadi bangsa yang unggul dalam konteks pemikiran, kebudayaan, bahkan peradaban; menjadi bangsa yang berada di garda terdepan, yang derap sejarahnya selalu berada beberapa langkah di depan bangsa-bangsa lain di muka bumi," papar Bamsoet.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menuturkan, kini mulai ramai kembali usulan agar MPR RI menghadirkan Haluan Negara. Sehingga bangsa Indonesia memiliki peta jalan yang jelas mau dibawa kemana bangsa ini selama dua puluh atau puluhan tahun ke depan, dan apa yang perlu dilakukan dalam mewujudkan cita-cita besar tersebut.

"Tanpa adanya peta jalan berupa Haluan Negara, khawatirnya kita seperti sebuah kapal di tengah samudera yang tak memiliki kompas sebagai penunjuk jalan. Terombang-ambing tanpa tahu sedang berada di mana, serta bingung menentukan kemana arah dan tujuan," pungkas Bamsoet. ❑

BSC

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-19_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:33

Seminar Nasional Sespimti Polri

Waspadai Ancaman Terhadap Ideologi Kita Pancasila

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, Empat Pilar MPR merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa sendiri.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan, dinamika lingkungan strategis global kini diwarnai kompetisi dan perebutan pengaruh negara-negara besar yang menempatkan Indonesia pada pusat kepentingan global. Jika tidak siap, Indonesia dapat saja tergilas dalam kompetisi global yang tidak mengenal batas dan waktu. Berbaurnya ancaman militer dan nonmiliter, disisi lain semakin mendorong terciptanya dilema geopolitik dan geostrategis global yang sulit diprediksi dan diantisipasi.

Dalam bidang pertahanan-keamanan, ungkap politisi Partai Golkar yang biasa disapa Bamsoet, kita menghadapi perang siber, intoleransi, radikalisme, terorisme, serta berbagai ancaman kejahatan lainnya yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang tidak kalah serius dan perlu diwaspadai secara sungguh-sungguh, sebut Bamsoet, adalah ancaman terhadap ideologi kita, Pancasila. Dan, berimbas kepada ancaman terhadap adab sopan santun, tradisi dan seni budaya, serta warisan kearifan lokal bangsa.

Bamsoet menyampaikan hal itu ketika berbicara dalam Seminar Nasional Sespimti Polri Dikreg ke-28 bertajuk: "Pembangunan SDM Unggul dan Pancasilais guna Menyongsong Indonesia Emas 2045," di Jakarta, Jumat (8/11/2019). Selain Bamsoet, juga menjadi pembicara dalam seminar itu adalah Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dan Gubernur DI Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia tersebut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menjelaskan, dibutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang membuat lompatan, ditunjang dengan sumber daya manusia unggul yang berhati Indonesia dan berideologi Pancasila. Karena itu, MPR RI sebagai Rumah Kebangsaan mengajak berbagai instansi pemerintah, termasuk Kepolisian, untuk memberikan kontribusi nyata dalam membangun manusia Indonesia unggul yang berkarakter Pancasila, yang dibutuhkan Indonesia menyongsong Indonesia Emas pada tahun 2045.

Sesuai amanat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3, MPR RI antara lain ditugasi untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Memasyarakatkan Pancasila sebagai ideologi negara dimaksudkan agar nilai-nilai Pancasila menjadi jiwa yang menginspirasi seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. "Bangsa Indonesia harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi yang bisa mengikat kemajemukan," jelas Bamsoet.

Legislator Partai Golkar Dapil VII Jawa Tengah yang meliputi Kabupaten Purbalingga, Banjarnegara, dan Kebumen ini menambahkan, memasyarakatkan UUD NRI Tahun 1945 dimaksudkan agar konstitusi negara dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat. Menjadi konstitusi yang hidup dan konstitusi yang bekerja untuk cita-cita kesejahteraan dan keadilan sosial.

"Kesadaran yang kuat juga sangat diperlukan untuk mempertahankan NKRI, yaitu kesadaran tentang kesatuan kita dalam satu bahtera kehidupan yang bernama NKRI. Bahtera ini harus dijaga dan dirawat oleh semua orang yang menjadi penumpangnya, karena keselamatan bahtera NKRI tidak hanya bergantung kepada nahkoda saja, tetapi kepada siapa saja yang ada di bahtera ini," tandas Bamsoet.

Selanjutnya, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menerangkan, setiap warna negara Indonesia yang beragam dan majemuk ini juga harus memberikan pengakuan kepada distingsi dan perbedaan yang dimiliki setiap orang, setiap kelompok, setiap bahasa, setiap budaya dan setiap adat istiadat. Tidak ada satu pun yang berhak mengklaim bahwa dirinya atau kelompoknya yang paling benar. Di sinilah pentingnya memasyarakatkan pilar yang keempat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara.

"Empat Pilar MPR RI sebagai konsepsi kebangsaan dan kenegaraan tersebut merupakan prasyarat minimal bagi bangsa Indonesia untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara harus memiliki keyakinan, bahwa prinsip-prinsip moral ke-Indonesian dalam Empat Pilar MPR dapat memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur," pungkas Bamsoet. ❑

Diskusi Penataan Kewenangan MPR

Soal Amandemen UUD, MPR Buka Ruang Bagi Masukan Masyarakat

Untuk wacana amendemen UUD harus ada input dan masukan yang komprehensif dari akademisi, partai politik, tokoh bangsa, mahasiswa, Ormas, dan lainnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Syarifuddin Hasan mengatakan, MPR akan membuka ruang dan akses yang lebih besar bagi masyarakat dan stakeholder lainnya yang ingin memberikan masukan, pemikiran dan pandangan, menyangkut amendemen (perubahan atau penyempurnaan) UUD, termasuk di dalamnya soal GBHN.

"Kita tidak perlu tabu membicarakan amendemen UUD. Kita buka ruang seluas-luasnya kepada publik untuk memberikan kontribusi dan pandangannya tentang penyempurnaan UUD, termasuk di dalamnya menyangkut GBHN, dan juga sistem ketatanegaraan. Ini menyangkut hajat hidup rakyat Indonesia maka kita harus betul-betul komit melaksanakannya," kata Syarifudin Hasan dalam Diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Penataan Kewenangan MPR" di Media Center, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10/2019). Turut berbicara Wakil Ketua DPD Sultan Bachtiar Najamudin dan Wakil Ketua Fraksi PPP MPR Syaifullah Tamliha.

Syarifudin Hasan mengungkapkan, MPR periode 2014–2019 merekomendasikan kepada MPR periode 2019 – 2024 untuk melakukan pengkajian lebih mendalam, termasuk kajian soal amendemen atau perubahan UUD. "Rekomendasi MPR periode lalu itu menjadi pijakan bagi MPR saat ini untuk bekerja ke depan. Kita sudah memutuskan untuk melakukan kajian dan membuka akses yang lebih besar kepada publik," ujarnya.

Menurut Syarifudin Hasan, harus ada input dan masukan yang komprehensif dari akademisi, partai politik, tokoh bangsa, mahasiswa, Ormas, dan lainnya. "Misalnya bagaimana kedudukan MPR, soal GBHN, sistem ketatanegaraan apakah bikameral atau unikameral, dan lainnya. Kalau kita bisa menata lagi sistem ketatanegaraan kita, ke depan saya percaya Indonesia akan lebih baik lagi," katanya.

"Kita wajib untuk memberikan dukungan pada wacana amandemen, memberikan pencerahan dan sosialisasi kepada masyarakat agar mereka memberikan kontribusi positif terhadap rencana penyempurnaan UUD. Mudah-mudahan tugas MPR ini bisa dilakukan dengan baik."

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-22_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:34

imbuhnya.

Sependapat dengan Syarifudin Hasan, Sultan Bachtiar Najamudin juga menyebutkan perubahan atau penyempurnaan UUD bukanlah sesuatu yang tabu. Amendemen UUD adalah sebuah keniscayaan. UUD sebagai living constitution selalu menyesuaikan dengan kondisi zaman. "Amandemen konstitusi di Amerika Serikat tidak terhitung karena ingin selalu menyesuaikan dengan kondisi masyarakat. Kita tidak perlu tabu dengan amendemen UUD sepanjang penyempurnaan itu dilakukan dengan kajian yang mendalam dan melibatkan semua stakeholder, bukan hanya parpol tapi juga basis masyarakat," katanya.

Sultan Najamudin percaya sepanjang isu amandemen akan menguatkan sistem ketatanegaraan, semua pihak pasti akan setuju. "Bagi DPD sendiri mendukung amandemen sepanjang kepentingan daerah masuk dalam amendemen. Sebab, DPD memperjuangkan kepentingan daerah. Tapi tidak perlu terburu-buru melakukan amendemen karena perlu kajian lebih mendalam. Jika hanya untuk kepentingan jangka pendek justru bisa berbahaya," jelasnya.

Sementara itu Syaifullah Tamliha mengungkapkan, MPR periode 2014 – 2019 mewarisi enam "Pekerjaan Rumah," yaitu: penataan kewenangan MPR, penataan kewenangan DPD, penataan kekuasaan kehakiman, penataan sistem presidensial, penataan sistem hukum dan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan pemasyarakatan Empat Pilar MPR.

"Ini pekerjaan MPR periode ini. Apakah perlu amandemen atau tidak, yang saya dengar, paling tidak MPR memberikan ruang kepada publik untuk membahas enam PR tadi. Dalam dua tahun, masyarakat dari berbagai kalangan terlibat untuk membahas itu dan pimpinan MPR memberi ruang kepada publik seluas-luasnya untuk terlibat," katanya. ❑

BSC

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-23_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:34

Kunjungan Delegasi PP KAMMI

Hidayat Nur Wahid: Amandemen Konstitusi Terus Berproses

Wacana amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus berjalan. Kini, MPR tengah menantikan usulan dari berbagai kalangan terkait pasal-pasal mana saja yang akan diubah.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

DI HADAPAN delegasi Pimpinan Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim In donesia (KAMMI), Wakil Ketua MPR RI, Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., mengatakan, rencana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melaksanakan amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terus berjalan. Salah satu upaya untuk memuluskan rencana tersebut adalah menambah jumlah pimpinan MPR dari sebelumnya delapan menjadi sepuluh orang.

Penambahan jumlah pimpinan, sesuai jumlah fraksi dan kelompok DPD di MPR ini pernah dilakukan sebelumnya, yaitu untuk pimpinan MPR periode pada 1999. Penambahan itu dimaksudkan untuk melibatkan keterwakilan seluruh fraksi dan kelompok DPD di MPR. Juga memudahkan proses pembahasan dan pengambilan keputusan.

"Pada 1998, mahasiswa melalui gerakan reformasi menuntut adanya perubahan terhadap UUD 1945. Untuk memudahkan pembahasan terhadap tuntutan itu, pimpinan MPR pun bertambah dari sebelumnya enam menjadi sembilan orang. Jadi, penambahan pimpinan MPR ini bukanlah yang pertama, karena sudah pernah terjadi sebelumnya," kata Hidayat.

Pernyataan itu disampaikan Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA., saat menerima audiensi PP Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Acara tersebut berlangsung di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III Kompleks MPR, DPR dan DPD RI Senayan, Jakarta Jumat (1/11/ 2019).

Kehadiran Delegasi PP KAMMI dipimpin ketua umumnya, Irfan Ahmad Fauzi, ini salah satu tujuannya adalah menyampaikan undangan kepada Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid, untuk hadir pada acara Muktamar KAMMI di Malang, Jawa Timur, pada 11 Desember. Selain itu, KAMMI juga mengajukan permohonan kerjasama dengan MPR untuk melangsungkan Sosialisasi Empat Pilar MPR di hadapan jajaran dan anggota KAMMI.

Selain penambahan jumlah pimpinan, lanjut Hidayat, MPR juga membuka diri menerima aspirasi masyarakat terkait pasal-pasal yang

akan diubah. Sejauh ini sudah ada beberapa masukan tentang pasal-pasal yang perlu diubah. Antara lain, menyangkut masa bakti presiden, dari lima tahun diusulkan menjadi delapan tahun. Serta pasal tentang haluan negara.

"Tetapi, semua masih berproses, fraksi-fraksi di MPR ataupun kelompok DPD. Bagi DPD, mereka cenderung akan menyetujui pasal-pasal yang diajukan, selama diikuti perubahan pasal-pasal untuk penguatan Dewan Perwakilan Daerah," kata Hidayat.

Menyangkut soal haluan negara, kata Hidayat, keberadaannya memang dibutuhkan agar pembangunan di Indonesia tidak maju mundur, seperti yang terjadi selama era reformasi. Namun, untuk membuat haluan negara seperti halnya GBHN di zaman Orde Baru tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasalnya, kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara, melainkan lembaga negara biasa sejajar dengan lembaga-lembaga negara lainnya, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Akibatnya, apapun produk yang dihasilkan MPR tidak serta merta membuat lembaga negara lainnya akan tunduk. Karena itu, harus ada perubahan pasal-pasal lain terkait MPR.

Sementara Fraksi PKS, menurut Hidayat, salah satunya akan memperjuangkan perubahan terhadap Pasal 2, ayat 3, UUD NRI Tahun 1945. Pasal tentang MPR ini, kata Hidayat. tidak sesuai dengan semangat MPR sebagai lembaga permusyawaratan rakyat. "Sesuai bunyi pasal tersebut bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Itu artinya MPR bukan majelis permusyawaratan, tetapi mejelis pervoting-an, dan itu harus diubah," katanya. ❑

MBO

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah

Loyalitas Tunggal ASN pada Negara dan Pancasila

Ketika menjadi keynote speaker dalam Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi ASN di Nusa Dua Bali, Wakil Ketua MPR menegaskan, loyalitas tunggal ASN adalah kepada negara dan ideologi Pancasila, bukan pada ideologi negara lain.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR RI Ahmad Basarah hadir sebagai keynote speaker dalam acara bertajuk: "Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi dan Metode Melalui Dialektika Pembinaan Ideologi Pancasila untuk Masa Depan Bangsa Bagi Aparatur Sipil Negara" di Nusa Dua Bali, Senin (4/11/2019). Acara yang diinisiasi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini diikuti oleh 200 peserta Aparatur Sipil Negara (ASN) dari Unit Pelaksana Tekns (UPT) Pemasyarakatan seluruh Indonesia.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, setiap ASN memiliki kewajiban setia dan taat kepada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945, menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan melayani masyarakat. ASN yang melakukan penyelewenangan terhadap Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bisa diberhentikan dengan tidak hormat, sebagaimana ketentuan yang tercantum pada pasal 87 ayat (4) huruf Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

"Kewajiban ASN adalah setia dan taat pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 menjadi perekat persatuan, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia," tegas dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang (Unisma) ini. Dengan demikian, lanjut Basarah, loyalitas tunggal ASN adalah kepada Negara dan Ideologi Pancasila, bukan pada negara lain, apalagi pada ideologi lain.

Basarah menegaskan, upaya pemantapan mental dan ideologi aparatur negara

demikian penting. Terlebih fenomena terkini menunjukkan adanya tren ketertarikan sebagian ASN dengan ideologi lain, selain Pancasila. Temuan berbagai lembaga survei kredibel menunjukkan hal tersebut. Temuan Survei Alvara pada 2017, misalnya, menunjukkan bahwa 19,4 % ASN tidak setuju dengan Pancasila dan lebih tertarik dengan ideologi Khilafah. Itu berarti dari 4,2 juta jiwa ASN per Juni 2019 – berdasarkan data KemenPANRB—maka sekitar 814 ribu ASN terpapar ideologi lain.

Terbaru adalah temuan Setara Institute yang menyebut dengan jelas bahwa sejumlah ASN telah terpapar radikalisme/ekstrimisme. Paling mutakhir adalah kasus Bripda Nesti Ode Samili (Polisi Wanita) yang berdinas di Mapolda Maluku Utara, diberhentikan dari anggota Polisi karena telah terpapar radikalisme/ekstrimisme dari media sosial.

Khusus kepada ASN yang bertugas di lembaga pemasyarakatan, Basarah mengingatkan, ada dua masalah serius yang perlu diperhatikan. Pertama adalah persoalan narapidana teroris (Napiter) yang jumlahnya terus meningkat. Berdasarkan data Kemenkumham per Desember 2018 jumlah napiter mencapai 558 orang. Dari jumlah tersebut hanya 47 napiter yang telah menandatangani pernyataan setia kepada NKRI.

"Narapidana teroris ini memiliki kemampuan mengajak dan merekrut narapidana lainnya untuk mengikuti aliran ideologi mereka. Kejadian paling mencengangkan adalah proses rekruitmen paham ekstrimisme dilakukan di Lapas terhadap napi lainnya," terang Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang.

Masalah kedua adalah persoalan narkoba. Berbagai kasus menunjukkan bahwa narapidana narkoba yang mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) masih mampu mengendalikan jaringan narkobanya. Bahkan, Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyebut bahwa 90 % operator narkoba dikendalikan dari lapas.

"Jangan sampai lapas jadi sarang teroris dan narkoba. Karena itulah penguatan ideologi bagi ASN sangat tepat. Sebab, ASN adalah ujung tombak negara dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat," ujar Basarah. ❑

Audiensi Ma'had Al-Quds

Etika Dasar dan Adab Penting, Harus Diajarkan pada Santri

Etika adalah dasar pemahaman Islam. Generasi muda Islam ke depan harus lebih mengedepankan etika sebagai satu syarat manusia unggul.

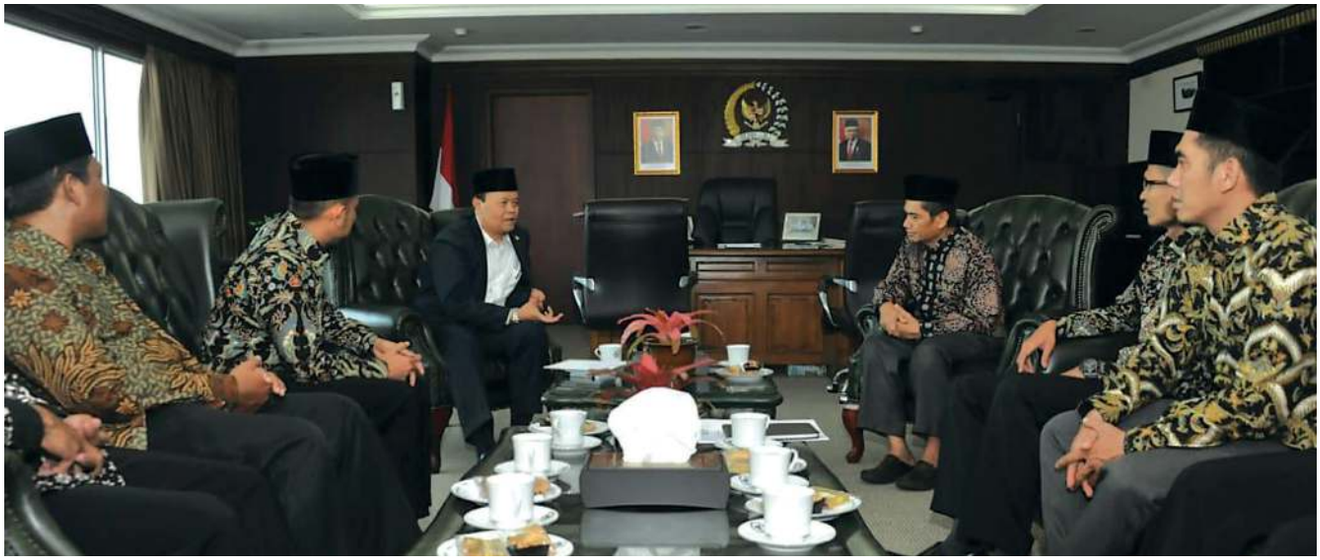

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERBICARA tentang manusia unggul, baik dalam lingkup kecil keluarga, sekolah, lingkungan, maupun dalam lingkup yang luas, yakni negara dan masa depan bangsa, tentu harus ada syarat yang harus dipenuhi. Namun, yang pasti sosok-sosok manusia unggul mesti ada dan wajib ada.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) menegaskan bahwa saat ini dan ke depan, Indonesia harus memiliki banyak manusia Islam yang unggul memiliki karakter Islam yang sesungguhnya sesuai Alquran. Untuk mencapai hal tersebut, menurut HNW, peran pendidikan sangatlah besar, termasuk pondok-pondok pesantren.

HNW menyatakan, dalam kurikulum pendidikan di lingkungan pesantren, selain kepada para santri diajarkan membaca serta menghafal Alquran, juga harus dimasukkan dan ditekankan pembelajaran tentang pemahaman etika-etika dasar, adab-adab, juga pemahaman untuk menjadi seorang muslim yang baik dan unggul.

Menurut HNW, masalah etika dasar dan adab ini sangatlah penting dan harus mulai diajarkan sejak dini. Tapi, "Jangan dulu yang berat-berat, mulailah dengan yang ringan seperti, pentingnya menjaga sopan santun kepada orang tua, belajar, menjaga amanah, saling menghormati, silaturahim, jujur, berkata-kata baik, berjiwa rahmah," ujar HNW saat berbincang dengan delegasi Ma'had Al-quds Li Tahfidhil Qur'an di Ruang Kerja Wakil Ketua MPR, Gedung Nusantara III, lantai 9, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11/2019).

Kepada delegasi Ma'had Al-quds yang dipimpin Pimpinan Ponpes Darul Abrar KH. Muttaqin Sa'id, Wakil Ketua MPR menjelaskan, pemahaman tentang etika sesuai Alquran tersebut bertujuan agar para santri — merupakan generasi muda bangsa Indonesia— dengan Alquran-nya tak sampai menjadi kelompok eksklusif. Dalam artian, tidak berani berinteraksi dengan masyarakat. Padahal Alquran selalu mengajarkan untuk selalu berinteraksi dengan yang lain.

Titik tekannya, menurut HNW, Alquran justru mengajarkan untuk berkomunikasi dengan publik, itulah akidah. Biasakan para santri berkomunikasi dengan masyarakat sekitar. "Saya ingat, waktu nyantri di Ponpes Gontor ada kegiatan lari-lari 'muter' kampung, juga banyak kegiatan yang membiasakan saya berkomunikasi dengan masyarakat," ujarnya.

Ketika para santri mampu menguasai dan mengimplementasikan etika, akhlak, dan berbagai ilmu pengetahuan, maka akan muncul generasi Islam yang tangguh, seperti generasi umat dahulu yang tangguh mampu menjadikan Islam diterima baik di Nusantara.

"Mereka adalalah generasi Islam tangguh dengan pengetahuan agama Islam yang tinggi, akhlak yang sangat baik, juga ilmu pengetahuan yang baik. Mereka mampu bergaul, berdialog, sabar dalam menghadapi masalah, serta mengatasi permasalahan di tengah-tengah masyarakat sehingga diterima dan Islam menjadi seperti sekarang ini," ujarnya.

HNW kemudian menjelas, hal itu fakta bahwa Indonesia adalah contoh paling konkret yang secara tegas membuktikan bahwa teori para orientalis yang mengatakan bahwa Islam berkembang melalui perang adalah salah, dan sama sekali tidak benar. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-28_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:35

Delegasi MAKN

Bamsoet Minta Nilai-Nilai Adat dan Budaya Jangan Ditinggalkan

Ketua MPR Bambang Soesatyo menyatakan, jika ingin generasi bangsa kental dengan nilai-nilai budaya maka harus dimulai dari diri kita pribadi.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, nilai-nilai adat dan budaya tak boleh ditinggalkan dalam menjalankan setiap sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejalan dengan itu, dalam menyikapi rekomendasi MPR RI periode 2009-2014 untuk melakukan amandemen terbatas terhadap UUD NRI Tahun 1945 dalam hal menghadirkan kembali Haluan Negara, MPR RI 2019-2024 juga akan menggunakan pendekatan kebudayaan.

"Keberadaan Pasal 32 UUD NRI Tahun 1945 yang menjamin kehadiran negara dalam memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia, serta penghormatan dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional, tidak akan diganggu gugat. MPR RI tak akan bergerak mundur dengan menghilangkan nilai-nilai sakral budaya bangsa dalam amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945," ujar Bamsoet saat menerima delegasi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) di Ruang Rapat Pimpinan MPR RI, Jakarta, Selasa (5/11/19).

Turut hadir dalam pertemuan itu, Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah. Sedangkan dari delegasi Majelis Adat Kerajaan Nusantara (MAKN) hadir, antara lain Ketua Dewan Kerajaan MAKN PYM Ida Tjokorda Ngurah Jambe Pemecutan (Raja Denpasar IX Puri Agung Denpasar), Ketua Harian MAKN YM KPH Eddy Wirabumi (Kasunanan Surakarta Hadiningrat Solo), Sekjen MAKN YM Dra. Hj. Yani WSS Kuswodidjoyo (Pengageng Sumenep), dan Bidang Advokasi MAKN YM Dr. Herman (Palembang Darusalam).

Selanjutnya, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini menegaskan kepada delegasi MAKN bahwa amandemen terbatas UUD NRI Tahun 1945 tidak akan mengubah pasal-pasal terkait adat dan budaya. Terlebih, saat ini generasi muda banyak yang kurang memahami nilai-nilai budaya bangsa. Contohnya, banyak generasi muda bangsa terlihat gagap terhadap budaya nasional. "Sesungguhnya hal itu terjadi bukan kesalahan mereka pribadi, melainkan kesalahan kita semua sebagai para senior yang tak bisa mewariskan nilai-nilai agung budaya kepada generasi muda. Tantangan terbesar ini yang perlu kita jawab bersama," jelas Bamsoet.

Karena itu, Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini mengajak Majelis Adat Kerajaan Nusantara untuk bersama-sama dengan MPR RI sebagai "Rumah Kebangsaan" untuk tak kenal lelah menyebarkan dan menanamkan nilai kebudayaan kepada para generasi bangsa. Untuk itu, tiada cara yang lebih cepat selain menjadi teladan.

Bamsoet selanjutnya mengingatkan, sebagai penjaga dan pelestari nilai-nilai kearifan dan kebudayaan lokal, MPR RI dan MAKN punya tantangan tak ringan. Apalagi, saat ini derasnya informasi teknologi dan dahsyatnya media sosial turut mempermudah masuknya budaya asing ke dalam diri generasi muda kita. "Sikap dan tindak tanduk kita yang sudah senior inilah yang menjadi rujukan para generasi bangsa. Jika ingin generasi bangsa kental dengan nilai-nilai budaya, maka harus dimulai dari diri kita pribadi," pungkas Bamsoet. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-29_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:35

Dialog Empat Pilar

Diperlukan Revitalisasi Nilai Kepahlawanan

Nilai-nilai kepahlawanan seperti siap berjuang, rela berkorban, saling tolong dan bergotong royong perlu dibumikan kembali, khususnya kepada generasi muda

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

ANGGOTA MPR RI Fraksi Partai Golkar, H. Mukhamad Misbakhun, mengatakan, perlu revitalisasi semangat kepahlawanan, seperti dicontohkan para pejuang dahulu. Revitalisasi nilai kepahlawanan terutama ditujukan kepada para pemuda. Ini penting, karena nilai-nilai kepahlawanan, seperti rasa kebersamaan dan gotong-royong terus terkisis dan jauh dari kehidupan generasi milenial. Akibatnya, masyarakat semakin individualis, lebih mementingkan keperluan pribadi daripada orang lain.

Pahlawan, kata Misbakhun, tidak bisa hanya diartikan sebagai pejuang kemerdekaan. Saat ini pahlawan harus dimaknai sebagai orang-orang yang mau berbuat baik untuk orang lain. Sebagaimana para pahlawan, berjuang untuk kepentingan bangsa dan negara. Karena itu, orang yang membayar pajak sesuai kewajibannya, juga pendiri UMKM yang memberi kesempatan bekerja bagi orang lain, juga patut diberi gelar pahlawan.

"Di era kekinian, perjuangan kita adalah mengisi kemerdekaan dengan pembangunan. Karena itu, mereka yang berpartisipasi secara maksimal dalam pembangunan, juga yang mewarisi nilai-nilai kepahlawanan layak diberikan apresiasi," ujar Misbakhun.

Misbakhun menyampaikan hal itu ketika berperan sebagai salah seorang narasumber Dialog Empat Pilar yang diselenggarakan oleh MPR bekerjasama dengan Koordinatoriat Wartawan Parlemen di Media Center MPR/DPR/DPD RI Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2019). Dialog yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, 10 November 2019, bertajuk: "Memaknai Semangat Hari Pahlawan."

Di depan para wartawan yang setiap hari mangkal di Press Room Parlemen itu, Misbakhun bersama dua narasumber lainnya, yakni: Muchamad Nabiel Haroen (anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan) dan J. Kristiadi (pengamat politik dari CSIS), Misbakhun lebih lanjut menyatakan, revitalisasi nilai-nilai kepahlawanan sangat penting. Alasannya, karena masyarakat, khususnya generasi muda, menghadapi ancaman radikalisme dan tawaran terhadap penggunaan ideologi baru.

"Jangan sampai, karena tidak mengenal nilai-nilai kepahlawanan menyebabkan mereka dengan mudahnya larut dalam radikalisme, ataupun mengganti ideologi baru dalam berbangsa dan bernegara," ujar Misbakhun.

Karena itu, Misbakhun mengajak semua pihak untuk kembali menggiatkan upaya-upaya membumikan nilai-nilai kepahlawanan, seperti saat para pejuang berupaya merebut kemerdekaan. Mereka mengutamakan nilai-nilai kebersamaan, tolong-menolong, bahu-membahu, serta gotong-royong.

Pernyataan serupa disampaikan anggota MPR Fraksi PDI Perjuangan, Muchamad Nabiel Haroen. Sesuai asal katanya, Nabiel yang biasa disapa Gus Nabiel, menjelaskan, pahlawan berasal dari kata Pala atau buah pala, yang berarti orang yang melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu. Karena itu, sudah tepat jika istilah pahlawan disematkan kepada orang yang melakukan sesuatu atau berbuat sesuatu bagi orang lain.

Sesuai dengan hadis Nabi, yang artinya: Setiap kamu adalah pemimpin. Dan, setiap pemimpin akan dimintai pertanggungan jawabannya. "Makanya aneh, kalau ada umat Islam tidak mau berbuat apapun untuk orang lain, karena nanti dia akan dimintai pertanggungan jawab," tegas Gus Nabiel.

Gus Nabiel lantas mencontohkan warga NU yang sering ikut menjaga keamanan gereja saat orang Nasrani memperingati Hari Natal. Dia menilai, sikap demikian merupakan perwujudan nilai-nilai kepahlawanan, dalam bentuk saling bekerjasama dan tolong-menolong.

Sementara itu, Pengamat CSIS J. Kristiadi mengatakan, generasi muda mengidamkan sikap perjuangan yang dulu diperankan para pahlawan. Bedanya, pahlawan zaman dahulu berani mati untuk kemerdekaan. Tetapi, sikap perjuangan yang dibutuhkan saat ini adalah berani hidup, sesuai cita-cita berdirinya bangsa Indonesia.

"Kita butuh pejuang yang siap mengisi kemerdekaan, agar cita-cita mewujudkan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia bisa segera tercapai," ungkap J. Kristiadi. ❑

MBO

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-31_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:35

Forum Tematik Bakohumas

Ma'ruf Cahyono: Bakohumas Bersinergi Sosialisasikan Empat Pilar MPR

Bakohumas berkomitmen untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR melalui kementerian dan lembaga masing-masing.

SEKRETARIS Jenderal MPR Dr. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., mengatakan, Humas MPR dengan Humas Kementerian dan Lembaga Negara yang tergabung dalam Bakohumas melakukan sinergi untuk melaksanakan tugas penting MPR, menyosialisasikan Empat Pilar MPR kepada seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian sosialisasi Empat Pilar bisa dilakukan lebih masif hingga sampai ke generasi milenial dan masyarakat pada umumnya.

"Dalam Bakohumas ini didiskusikan sekaligus komitmen untuk bahu-membahu melaksanakan sosialisasi Empat Pilar MPR melalui kementerian dan lembaga masing-masing. Sebab, kementerian dan lembaga tidak hanya berada di tingkat pusat, tapi juga mempunyai entitas kehumasan di daerah, baik di provinsi, kabupaten, maupun kecamatan," kata Ma'ruf Cahyono pada Forum Tematik Bakohumas bertema: "Peran MPR dalam Memasyarakatkan Nilai-Nilai Empat Pilar Agar Terinternalisasi di Kalangan Milenial"di Ruang Delegasi Plaza Nusantara V, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019). Hadir dalam kegiatan ini Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo Prof. Widodo Muktiyo, Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah.

Menurut Ma'ruf, MPR mempunyai tugas penting sebagaimana diamanatkan UU No. 17 Tahun 2014 untuk pemasyarakatan dan menyosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR telah melakukan dengan berbagai metode yang terus disesuaikan dan sasaran segmen masyarakat, seperti Lomba Mewarnai Empat Pilar untuk siswa SD, Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR tingkat SLTA, outbound, Bela Negara, Training of Trainers (ToT), seni budaya, hingga dakwah Empat Pilar MPR. "Pembentukan karakter di kalangan milenial ini perlu mendapat perhatian," ujarnya.

Ma'ruf Cahyono mengharapkan, Forum Tematik Bakohumas ini menghasilkan dua output. Pertama, hubungan antara kehumasan MPR dengan kehumasan instansi lain akan lebih bersinergi. "Ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama,"ujarnya.

Kedua, visi misi MPR bisa dipahami

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-32_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:36

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

sehingga baik content maupun metode yang disampaikan akan saling mendukung. "Dengan demikian upaya sosialisasi Empat Pilar MPR akan lebih efektif bersama kementerian dan lembaga lain. Hasil ini akan terus ditindaklanjuti untuk memperkaya materi dan metode sosialisasi Empat Pilar MPR," tutur Ma'ruf.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik, Prof. Widodo Muktiyo, sependapat dengan Ma'ruf Cahyono. Forum Tematik Bakohumas ini merupakan kegiatan penting apalagi terkait dengan tema sosialisasi Empat Pilar MPR kepada generasi milenial. "Kami apresiasi Forum Tematik Bakohumas ini. Pemahaman Empat Pilar pada generasi milenial ini masih kurang sehingga kementerian dan lembaga perlu melakukan kegiatan bersama-sama menggarap kalangan milenial di kota dan desa yang jumlahnya sangat besar," katanya.

Menurut Widodo, Bakohumas meliputi humas di semua kementerian dan lembaga. Dalam kaitan itu tugas Humas adalah mendeliver pesan-pesan kebangsaan. "Kita punya ideologi Pancasila. Pola penanaman nilai-nilai Empat Pilar harus sesuai dengan kebutuhan milenial. Kelompok milenial suka dengan hal yang praktis, sederhana, tapi mengena. Itu yang menjadi tantangan kita mencari metode yang tepat untuk masuk ke dalam kalangan milenial," paparnya.

Widodo memberi contoh dalam pengelolaan konten. Masing-masing kementerian dan lembaga menggali sesuai dengan lingkup tugasnya. Misalnya, bidang kelautan. Dalam bidang kelautan banyak sosok pahlawan yang bisa diangkat dengan narasi, data, infografis, bahkan dengan meme sehingga kalangan milenial dengan cepat bisa menangkap dan paham.

"Jadi, bagaimana kita membuat konsep Empat Pilar MPR menjadi content yang segmennya adalah milenial. Generasi milenial harus betul-betul mengetahui nilai-nilai Empat Pilar MPR sehingga konteks, format, dan metode sosialisasi juga harus milenial. Inilah yang menjadi tantangan kita. Membuat milenial dalam konteks Empat Pilar. Perlu metode dan cara agar kalangan milenial mempunyai kebanggaan dan mengagumi Empat Pilar," katanya.

Dalam Forum Tematik Bakohumas ini digelar diskusi dengan menghadirkan narasumber Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono dan Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah, serta dipandu Plt. Kabag Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi Budi Muliawan. ❑

BSC

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-33_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:36

Diskusi Empat Pilar

Idris Laena : Amendemen (Terbatas) UUD Masih Perlu Kajian Mendalam

Untuk melakukan amendemen terbatas terkait dengan haluan negara masih perlu kajian lebih mendalam dengan melibatkan stakeholder lainnya.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

KETUA Fraksi Partai Golkar MPR, Idris Laena, menegaskan, pokok-pokok haluan negara perlu dihadirkan kembali agar menjadi pegangan presiden dalam kebijakan dan arah pembangunan nasional. Namun, untuk melakukan amendemen terbatas terkait dengan haluan negara masih perlu kajian lebih mendalam dengan melibatkan stakeholder lainnya.

"Pada prinsipnya Fraksi Partai Golkar setuju dengan garis-garis besar haluan Negara atau apapun namanya yang sifatnya memberikan arah dan haluan pembangunan nasional ke depan. Tetapi mengenai amendemen terbatas, kami masih perlu mengkaji lebih mendalam," katanya dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema "Mungkinkah Amendemen (Terbatas) Konstitusi Terwujud?" di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019). Narasumber lainnya adalah Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi dan Sekretaris Fraksi PKS Andi Akmal Pasludin.

Menurut Idris Laena, untuk melakukan amendemen UUD perlu beberapa persyaratan, salah satunya diusulkan oleh sepertiga anggota MPR. Dan untuk bisa disetujui (usulan), sidang paripurna MPR harus dihadiri dua pertiga dari jumlah anggota. Pengambilan keputusan untuk perubahan pasal UUD pun harus disetujui separuh lebih dari anggota MPR. "Ini bukan perkara mudah.

Apakah bisa dilaksanakan? Ini tergantung dari hasil pembicaraan dan komunikasi politik di antara partai-partai politik," imbuhnya.

Lebih jauh Idris Laena mengatakan, pihaknya ingin mendapat masukan dari seluruh stakeholder dan kelompok-kelompok masyarakat. "Kita ingin masyarakat berpartisipasi memberi masukan soal amendemen UUD ini. Sampai saat ini kami masih mempertimbangkan soal amandemen dan ingin mendapat masukan dan mendengarkan pendapat masyarakat," ujarnya.

Namun Idris Laena mengingatkan, agar UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar jangan terlalu sering diubah. "Saya hanya ingin mengingatkan UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar agar tidak sering diubah. Sebab, UU kita bersumber pada hukum dasar. Bayangkan berapa UU yang harus disesuaikan karena perubahan UUD," terangnya.

Idris Laena menambahkan, pokok-pokok haluan negara itu tidak harus dibuat oleh MPR, tetapi cukup dengan undang-undang. Undang-Undang adalah produk hukum juga, karena pembentuk undang-undang adalah DPR kemudian dibahas bersama presiden sehingga berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sementara itu, Ketua Fraksi PPP MPR Arwani Thomafi, mengungkapkan, MPR periode 2014 – 2019 menyebutkan dalam rekomendasinya bahwa reformulasi sistem perencanaan pembangunan nasional model GBHN bisa dilakukan dengan dua opsi, yaitu: melalui Ketetapan MPR atau Undang-Undang. Arwani mengakui secara normatif persyaratan untuk melakukan amendemen UUD tidak mudah.

Menurut Arwani, ada dua pintu agar pokok-pokok haluan negara ini terealisasi. Pertama, konsep dan substansi dari pokok-pokok haluan negara. Dalam rapat Badan Pengkajian MPR, anggota MPR menyimpulkan konsep dan substansi serta materi pokok-pokok haluan negara yang diajukan masih kurang matang. "Malah terlalu detail. Isi dan materi pokok-pokok haluan negara belum matang. Secara substansi, bahan untuk isi pokok-pokok haluan negara belum meyakinkan bagi para anggota MPR di Badan Pengkajian," katanya.

Kedua, untuk merealisasikan haluan negara terkait atau tergantung pada konfigurasi politik. Karena persyaratan untuk amendemen yang tidak mudah maka kuncinya ada pada presiden dan partai politik. "Kalau melihat pembentukan kabinet rekonsiliasi yang terlihat kompak maka ada peluang untuk merealisasi haluan negara. Kalau peta politik seperti pada saat pembentukan kabinet kemungkinan merealisasikan haluan negara terbuka. Tapi kalau tidak, susah melakukan amendemen meskipun dilakukan secara terbatas," katanya.

Sekretaris Fraksi PKS MPR, Andi Akmal Pasludin, menegaskan, masih terbuka kemungkinan untuk melakukan amendemen terbatas terkait dengan pokok-pokok haluan negara. "Fraksi PKS mendukung amendemen jika dilakukan terbatas dan disetujui fraksi-fraksi lain. Tapi kita harapkan amendemen ini tidak menjadi bola liar," ujarnya.

Menurut Andi Akmal, setiap opsi mewujudkan pokok-pokok haluan negara apakah melalui Ketetapan MPR maupun UU, memiliki konsekuensi tersendiri. Jika dalam bentuk Ketetapan MPR maka akan melibatkan DPR dan DPD. Sedangkan bila dalam bentuk undang-undang maka hanya melibatkan DPR dan pemerintah. "Sebenarnya penetapan haluan negara lewat UU inilah risikonya paling kecil," ucapnya. ❑

BSC

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-35_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:36

Sejauh Mana Independensi Dewan Pengawas KPK?

Revisi Undang-Undang KPK menimbulkan protes dari berbagai elemen masyarakat. Mereka khawatir dengan UU KPK setelah revisi ini pemberantasan korupsi tidak akan segalak sebelumnya. Apalagi, dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK yang anggotanya ditunjuk oleh Presiden akan semakin mengkhawatirkan komitmen pemberantasan korupsi yang merupakan cita-cita reformasi akan tumpul. Benarkah demikian? Berikut pendapat anggota MPR mengenai Dewan Pengawas KPK:

Hillary Brigitta Lasut Anggota MPR Fraksi Nasdem

Menjadikan Kinerja KPK Lebih Profesional

MENURUT saya dengan kehadiran Dewan Pengawas KPK semoga saja dapat berdampak positif dan baik terlebih untuk kinerja lembaga KPK dalam pemberantasan korupsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kita tahu bahwa Presiden sebagai Panglima Tertinggi Negara sudah merespon dengan menginstruksikan persiapan pembentukan tim seleksi Dewan Pengawas KPK.

Bila ditunjuk oleh Presiden, bagaimana independensinya? Kita sama-sama menyadari bahwa setiap anggota DPR sudah terkontaminasi dengan partai politik. Menurut saya, baiknya orang yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas, yaitu mewakili dari latarbelakang birokrasi atau akademisi agar lebih obyektif dalam menjalankan fungsi sebagai Dewan Pengawas KPK.

Dengan adanya Dewan Pengawas KPK tidak akan membuat kinerja KPK akan menjadi lamban dan tebang pilih, justru dengan adanya dewan pengawas maka kinerja KPK dapat lebih profesional dan lebih proaktif. Kita tahu di institusi Polri diawasi oleh Kompolnas yang justru membuat kinerja kepolisian tetap baik, dan bahkan lebih humanis dan dalam penegakan hukum tetap terlaksana secara profesional.

Lalu, siapa saja sosok yang pas dan cocok untuk mengisi Dewan Pengawas KPK? Yang pasti bukan mantan narapidana dan yang terpenting sudah teruji secara intelektual dan keindependensinya agar tidak ada intervensi dari pihak-pihak luar.

Semoga dengan hadirnya Dewan Pengawas KPK diharapkan ke depan lembaga tersebut akan lebih baik dalam tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia. Juga semoga pemberantasan korupsi bukan hanya sekedar lewat penegakan dan menindak kasus-kasus yang sudah terjadi saja, namun butuh upaya-upaya pencegahan yang dilakukan oleh KPK agar dapat meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dewan Pengawas KPK memiliki enam tugas dan fungsi, yakni: Mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; Memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau penyitaan; Menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; Menerima dan menindaklanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-36_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:37

pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang; Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; Dan, melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara berkala, satu kali dalam satu tahun.

Lebih dari itu bukan termasuk kewenangan dari Dewan Pengawas KPK. Namun, pada prinsipnya terlepas dari segala kemungkinan semoga ke depan dengan hadirnya dewan pengawas kinerja KPK lebih bertambah kuat dan profesional demi tercapainya Indonesia yang lebih baik dan bersih dari tindak pidana korupsi. ❑

AWG

Aboe Bakar Al-Habsyi Anggota MPR Fraksi PKS

Publik Meragukan Independesi Dewan Pengawas KPK

KELAHIRAN Dewan Pengawas KPK sebenarnya ditujukan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK. Hal ini dilakukan karena kewenangan yang dimiliki KPK dinilai cukup besar. Keberadaan dewan pengawas ini untuk memastikan bahwa kerja KPK telah sesuai dengan SOP yang ada sehingga memastikan bahwa penegakan hukum sesuai dengan hukum acara yang berlaku.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bila ditunjuk oleh Presiden, bagaimana independensinya? Ini yang kemudian menjadi persoalan jika mekanisme pengisian jabatan dewan pengawas dilakukan dengan penunjukan. Harus dipahami bahwa tujuan kita adalah membentuk dewan pengawas yang profesional dan terbebas dari intervensi. Jika pengisian jabatan dewan pengawas dengan penunjukan, hal ini tidak dapat tercapai. Bagaimanapun, para pejabat tersebut akan merasa ditunjuk oleh Presiden. Artinya, ada beban psikologis, seolah mereka menjadi kepanjangan tangan dari presiden. Di sinilah problemnya, pasti publik akan meragukan independesi mereka.

Dengan adanya Dewan Pengawas KPK apakah kinerja KPK akan menjadi lamban dan tebang pilih? Itu yang dikhawatirkan karena mereka menjabat berdasarkan penunjukan, ada kekhawatiran membawa agenda tertentu. Kekhawatiran kita hal ini tentunya akan berakibat pada adanya pola tebang pilih dalam penegakan hukum.

Sosok anggota dewan pengawas, yang pasti dewan ini harus diisi oleh mereka yang tidak memiki konflik kepentingan dan mereka yang tidak memiliki agenda politik. Tentunya, pengisian jabatan dewan pengawas ini seharusnya dilakukan dengan mekanisme dan tahapan yang layak. Jika pemilihan pimpinan KPK saja menggunakan pansel dan tahapan yang berlapis lapis, tentunya dewan pengawas setidaknya juga menggunakan mekanisme yang serupa sehingga paling tidak independensinya tidak diragukan masyarakat.

Secara khusus kita berharap mekanisme pengisian jabatan dewan pengawas dapat diubah. Melalui pansel yang dilakukan oleh kelompok independen. Di luar itu, kita berharap nantinya dewan pengawas terpilih akan dapat bertindak secara profesional dan independen. Menjalankan fungsi mereka sebagaimana mestinya sehingga KPK bisa menjalankan pemberantasan korupsi secara optimal.

Apakah Dewan Pengawas KPK mempunyai kebijakan atau bisa menentukan arah dalam memberantas Korupsi? Seharusnya tidak, karena fungsi dewan pengawas bukan untuk itu. Tugas mereka sebatas mengawasi agar pelaksanaan kerja KPK sesuai aturan yang ada. ❑

AWG

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-37_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:37

Peringatan Hari Pahlawan

Spirit Para Pahlawan Harus Diterapkan

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengajak seluruh lapisan masyarakat di Indonesia mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, dan juga menerapkan sprit para pahlawan dengan menjaga keutuhan NKRI.

KETUA MPR RI Bambang Soesatyo menegaskan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang selalu mengenang jasa para pahlawannya. Karenanya, dia meminta agar seluruh lapisan masyarakat di Indonesia tak hanya sekedar mengingat jasa para pahlawan yang telah mendedikasikan dirinya untuk kemerdekaan Republik Indonesia, tetapi juga menerapkan spirit para pahlawan dengan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Saat ini perjuangan yang kita lakukan bukan lagi mengangkat bambu runcing ataupun senjata, tapi ancaman nyata saat ini adalah masalah intoleransi dan radikalisme. Tugas kita bersama untuk menjaga keutuhan NKRI," ujar Bamsoet usai mengikuti upacara peringatan Hari Pahlawan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Ahad (10/11/19).

Upacara pringatan Hari Pahlawan dipimpin Presiden Joko Widodo, dihadiri Wakil Presiden KH. Maruf Amin, Menko Polhukam Mahfud MD., Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Sosial Juliari Batubara, Menteri Agama Fachrul Razi, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Idham Azis, dan para pejabat lainnya.

Lebih lanjut, Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengajak seluruh elemen bangsa, khususnya kaum muda untuk meneruskan perjuangan yang telah dirintis para pahlawan, dan mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang positif. Selain berkontribusi serta mencintai dan mengharumkan nama bangsa Indonesia dengan selalu menjaga nilai-nilai luhur Pancasila.

"Kemendikbud melalui Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah harus memasukkan kembali kurikulum tentang pelajaran sejarah bangsa dan negara dalam mata pelajaran. Baik di tingkat SD, SMP, maupun tingkat SMA agar mengenal perjuangan para pahlawan untuk kemerdekaan Republik Indonesia," tutur Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini.

Bamsoet meyakini majunya sebuah bangsa tergantung bagaimana pemudanya. Sehingga generasi muda juga wajib mengenal sejarah bangsanya sendiri. "Ketahanan bangsa Indonesia dapat terwujud apabila generasi muda dapat mengenal jati diri bangsanya. Karenanya, sangat penting menumbuhkan rasa nasionalisme yang tinggi di kalangan milenial," urai Bamsoet.

Selain itu, mantan Ketua DPR RI ini juga mengajak para koleganya yang mendapatkan amanah sebagai pejabat publik penyelenggara negara untuk dapat menjaga amanah sebaik mungkin. Dengan demikian bisa menjadi tauladan bagi generasi selanjutnya.

"Apa yang kita nikmati hari ini merupakan buah dari perjuangan pendahulu bangsa. Karenanya, kita juga harus meninggalkan berkah bagi generasi mendatang. Menjadi Pahlawan di masa kini tak perlu mengorbankan harta apalagi nyawa. Cukup dengan menjadi warga negara yang baik, dan menjalankan amanah sebagai pejabat publik dengan sebaik mungkin dalam berjuang membangun bangsa," pungkas Bamsoet. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-38_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:38

Sepuluh Bali Baru
4 Juta Wisatawan Mancanegara

Sektor pariwisata di Indonesia sangat potensial, namun sayang belum mampu menjadi sumber devisa utama, karena seolah hanya mengandalkan Pulau Bali. Agar pariwisata mampu menjadi sektor andalan, pemerintah harus menciptakan 10 Bali baru. Program itu bukan menjadikan 10 tempat wisata secara fisiknya persis seperti Bali, namun bagaimana tempat wisata itu mampu mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara seperti Bali. Itu yang diharapkan. Ke-10 lokasi yang bisa seperti Bali adalah: Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo, Wakatobi, Labuan Bajo, dan Morotai.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

SEBAGAI negara yang luas, terbentang dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai pulau Rote, dengan geografi kepulauan, membuat Indonesia menjadi negeri yang memiliki sejuta pesona. Keindahan itu tersebar di seluruh kepulauan di Indonesia berupa pantai, gunung, danau, hutan, lautan, sungai, jurang, ditambah lagi kekayaan seni budaya, serta keramahan manusia, yang kesemuanya merupakan daya tarik bagi wisatawan, baik dalam maupun luar negeri untuk berduyun-duyun datang ke Indonesia.

Lokasi wisata di Indonesia memang sangat banyaknya, dan tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Nah, untuk pengembangan obyek wisata di daerah-daerah harus mendapat dorongan dari pemerintah pusat, sementara masyarakat di daerah-daerah juga harus kreatif memberdayakan potensi wisata yang ada di desanya. Artinya, setiap saat muncul lokasi wisata baru, harus dilengkapi dengan fasilitas yang menarik orang untuk datang ke sana.

Sayangnya, keindahan yang ada di negeri ini belum mampu menjadi daya tarik bagi wisatawan, terutama wisatawan mancanegara, sehingga potensi yang ada itu belum menjadi daya angkat perekonomian masyarakat, dan devisa negara. Lebih mengenaskan lagi, Indonesia kalah jauh dibanding dengan negara yang boleh dikata lebih kecil daripada Indonesia. Dalam jumlah wisatawan mancanegara, Indonesia tertinggal jauh dibanding Thailand dan Malaysia. Thailand pada 2018 jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke sana mencapai 38,3 juta, Malaysia 25,8 juta, dan Indonesia hanya 15,81 juta.

Hal demikianlah yang menjadi keresahan pemerintah sehingga mereka ingin tempat-tempat wisata yang ada di Indonesia dikembangkan, dipromosikan, sehingga mampu menarik wisatawan untuk berkunjung. Selama ini sektor wisata di Indonesia yang paling popular di kalangan turis mancanegara dan juga turis domestik adalah Pulau Bali. Dalam setahun pulau yang berada di antara Pulau Jawa dan Lombok itu mampu mendatangkan 4 juta wisatawan. Kesuksesan Bali mendatangkan wisatawan sebanyak itu membuat pemerintah menciptakan program 10 Bali Baru. Maksud dari program itu adalah bukan menciptakan sepuluh tempat wisatawan baru menjadi seperti Bali, namun bagaimana tempat-tempat itu mampu mendatangkan 4 juta wisatawan dalam setahun sama seperti Bali.

Bali popular sebagai tempat wisata, sebab keindahan alam dan budayanya. Itulah potensi yang dimiliki dari dulu. Sejarah menjadikan Bali sebagai tempat wisata dilakukan bukan dari kemarin, namun sejak kedatangan pelaut Belanda Cornellis de Houtman di pulau itu pada 1579. Pria yang kelak mati di tangan Laksamana Malahayati dari Aceh itu disebut sebagai *bule* pertama yang mendarat di Bali, lewat Pelabuhan Buleleng.

Pelayaran de Houtman ke Bali tujuannya bukan untuk pelesir, namun seperti para pelayar lain dari negara Eropa adalah untuk mencari rempah-rempah. Namun, apa yang dicari itu tidak ditemukan. Di Bali, de Houtman memang tidak menemukan rempah-rempah, namun di Pulau Dewa itu dia menjumpai keunikan budaya masyarakat di sana yang tidak pernah ditemukan di daerah lain. Keunikan budaya ditambah keindahan alam yang ada di Bali itu dia laporkan kepada Ratu Belanda.

Dari sinilah selanjutnya pelayaran-pelayaran ke Bali dilakukan dengan tujuan wisata, dan mulai terorganisasi atau lewat travel biro sejak 1920. Bagaimana awal mula pelayaran wisata yang terorganisir ke Bali? Begini, suatu ketika kapal milik *Koninklijke Paketcart Maatsckapy*, yang tak lain kapal dagang milik Belanda, tengah mengarungi lautan nusantara dengan rute Singapura-Batavia-Semarang-Surabaya. Suatu ketika, mereka yang berada di atas kapal ramai-ramai ingin mengunjungi Bali. Karena yang meminta untuk mengunjungi Bali banyak maka nahkoda kapal menuruti apa yang dimaui oleh para penumpang tersebut.

Seketika itu pula kapal itu beralih fungsi, dari kapal dagang menjadi kapal angkut wisata, maka nama kapal itu pun diubah sesuai dengan misi pelayarannya. Dan, nama yang disematkan pada kapal itu adalah *Bali Express*. Untuk pertama kalinya Bali Express buang jangkar di sebuah pelabuhan di Buleleng. Ternyata kunjungan ini cukup memuaskan para wisatawan itu, bahwa tidak hanya puas mereka juga *kesengsem* untuk menjalankan bisnis di bidang usaha pariwisata di Bali. Karena naluri bisnisnya bermain, maka pada 1924 berdiri biro perjalanan yang melayani wisata ke Bali ini. Biro perjalanan tujuan Eropa-Bali benar-benar *tokcer.* Buktinya, pada masa-masa itu ada 18 pelayaran Eropa-Bali dalam setahun.

Bali menarik bagi orang Eropa dari

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-40_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:38

berbagai kalangan. Tak heran bila dalam perjalanan wisata, yang tercatat sebagai peserta travel tidak hanya wisatawan biasa, namun juga mereka yang berprofesi sebagai seniman, pelukis, dan penulis. Di tangan-tangan merekalah, selanjutnya Bali menjadi lebih mendunia. Di antara mereka itu, terdapat nama Gregor Krause. Krause adalah seorang pegawai yang ditugaskan oleh Pemerintah Belanda untuk mendokumentasikan Bali melalui foto dan buku. Juga ada Miguel Covarrubias dengan karya *the Island of Bali* pada 1930; Menc (Ni Ketut Tantri) dengan karya *Revolt In Paradise;* Walter Spies, Rudolf Bonnet, Le Mayeur, dan Antonio Blanco. *Saking* mengagumi Bali seperti saat ini.

Ketika Perang Dunia II pecah, aktivitas pariwisata di Bali ikut terganggu. Masalah belum berhenti selama agresi militer Belanda terjadi, dalam kurun waktu 1945-1949. Semuanya kembali normal setelah tidak ada lagi perang, dan adanya pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda. Selepas itu berdatanganlah wisatawan ke Bali, tidak hanya wisatawan mancanegara namun juga wisatawan dalam negeri.

Selanjutnya, potensi yang ada di pulau itu dari waktu ke waktu terus dikembangkan dan terus dirawat. Promosi keindahan alam dan budaya Bali ke dunia dilakukan sejak Presiden Soekarno. Presiden pertama melibatkan pemimpin dunia itu tidak hanya terjadi pada masa Soekarno, namun juga masa Presiden Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, serta Joko Widodo. Dengan cara itu Bali dikenal oleh orang dari berbagai penjuru dunia. *Saking* popularnya ada yang menyebut Bali lebih dikenal daripada Indonesia.

Kesuksesan Bali yang mampu mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara dalam setahun inilah yang ingin ditularkan ke daerah atau daerah tujuan wisatawan lain yang tersebar di Indonesia. Tujuannya agar sektor ini mampu menjadi sumber devisa negara dan penggerak perekonomian rakyat.

Dalam sebuah kesempatan, Presiden Joko

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

membuat ada diantara mereka itu yang menetap di Bali. Dari merekalah orang-orang Eropa mendapat kabar tentang keindahan pulau Bali. Komedian dunia, Charlie Chaplin, datang ke Bali pada 1939, konon karena undangan dan kabar dari Spies.

Viralnya kabar tentang keindahan Bali membuat perkembangan wisata di sana semakin menggeliat. Untuk menampung kedatangan para wisatawan, pemerintah kolonial pada 1930 membangun hotel di Denpasar. Karena wisatawan yang datang ke Bali semakin membludag maka pemerintah kolonial harus membuka seluruh akses yang ada. Setelah pelabuhan dan hotel, selanjutnya dibuka lapangan udara atau airport yang berada di daerah Tuban, Badung. Bandar udara inilah yang selanjutnya menjadi Bandar Udara Internasional Ngurah Rai yang megah

Republik Indonesia berdarah Bali itu kerap menjadikan Bali sebagai tempat untuk menerima kepala negara atau kepala pemerintahan negara lain. Mereka yang pernah mengadakan pertemuan dengan Soekarno di Bali, antara lain: Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru; Pemimpin Vietnam Utara, Ho Chi Minh; dan Presiden Amerika Serikat, Jhon F. Kennedy.

Sebagai tempat yang menyenangkan untuk melepas lelah, menikmati alam dan menikmati budaya, Soekarno pada 1957 kemudian mengintruksikan untuk membangun Istana Presiden di Tampaksiring. Tak hanya itu, di 1963, dia juga memprakarsai berdirinya *Hotel Bali Beach* di Sanur.

Pertemuan tingkat dunia atau pun Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) dunia lebih sering diselenggarakan di Bali. KTT yang

Widodo menuturkan, sektor pariwisata di Tanah Air mempunyai potensi besar untuk menarik wisatawan mancanegara. Dia mengatakan, sektor pariwisata dalam negeri sangat menjanjikan. “Dapat menimbulkan *multiplier effect* yang positif, terutama di bidang perekonomian”, ujarnya. Mantan Walikota Solo itu berharap, pada 2020 devisa dari sektor pariwisata bisa melampaui CPO yang saat ini masih nomor satu penyumbang devisa di Indonesia. “Pariwisata akan menjadi motor penggerak ekonomi Indonesia yang bisa menetes sampai ke bawah,” ucap Joko Widodo.

Untuk menggapai harapan itu, pada masa Kementerian Pariwisata di bawah Arief Yahya, pemerintah menciptakan 10 Bali Baru. Program 10 Bali Baru bukan menjadikan 10 tempat wisata lain disulap persis seperti Bali,

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-41_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:38

namun bagaimana tempat yang baru itu bisa mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara. “Tidak akan dibuat persis seperti Bali”, ujar Arief. “Masing-masing daerah punya kombinasi alam dan budaya tersendiri”, tambahnya. Perbedaan itulah yang membuat bangsa ini kaya atraksi, budaya, tradisi, dan keunikan.

Setelah pemerintah melakukan survei dan penelitian maka 10 tempat yang dijadikan Bali Baru itu adalah *Danau Toba, Tanjung Kelayang, Tanjung Lesung, Pulau Seribu, Candi Borobudur, Mandalika, Gunung Bromo Tengger, Wakatobi, Labuan Bajo,* dan *Morotai.* Kepada media, Arief mengungkapkan, sebutan 10 Bali Baru adalah kiasan untuk memberi tekanan agar *performance* masing-masing daerah bisa menyamai Bali, yaitu dalam setahun bisa mendatangkan empat juta wisatawan mancanegara.

Harus diakui Bali merupakan ikon pariwisata Indonesia. Berdasarkan fakta, sekitar 40% wisatawan mancanegara masuk Indonesia lewat Bali. “Kalau masing-masing 10 Bali Baru bisa mendatangkan 4 juta wisatawan mancanegara, apa tidak makmur negeri kita”, ucap Arief yang dikutip oleh sebuah media *online.* Dan, Arief optimistis 10 Bali Baru itu menjadi andalan sektor utama ekonomi nasional ke depannya.

Untuk memperkenalkan 10 Bali Baru itu, saat Pertemuan IMF-Bank Dunia di Nusa Dua, Bali, 2018, digelar pameran mengenai 10 tempat wisata unggulan itu. Pemerintah menggelar pameran di dalam forum dunia, karena ada 34 ribu peserta yang berpartisipasi, baik dari dalam maupun luar negeri. ❑

AWG/*dari berbagai sumber*

Ini Dia 10 Bali Baru

Sebagai negara kepulauan, pesona wisata di Indonesia banyak disuguhkan oleh keindahan pantai dan laut. Meski demikian, danau, gunung, lembah, goa juga sama menariknya. Budaya dan satwa langka melengkapi keragaman Indonesia. Tak hanya itu, jejak-jejak Perang Dunia II, juga ada. Semua itu ada di 10 Bali Baru.

Danau Toba

Danau Toba berada di Sumatera Utara. Danau yang memiliki panjang 100 km dan lebar 30 km itu dikelilingi oleh 7 kabupaten, yakni Simalungun, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Karo, dan Samosir. Untuk menuju ke Danau Toba, bisa lewat Bandara Kuala Namu di Deli Serdang, Sumatera Utara, yang dilanjutkan lewat perjalanan darat selama 5 jam. Bila mau lebih cepat bisa langsung naik pesawat dengan tujuan Bandar Udara Sisingamangaraja XII yang berada di Siborong-Borong, Tapanuli Utara.

Menurut cerita, danau ini tercipta karena letusan gunung berapi super masif berkekuatan VEI 8 sekitar 69.000 sampai 77.000 tahun lalu yang memicu perubahan iklim global. Menurut teori bencana Toba, letusan yang terjadi berdampak besar menewaskan sebagian besar manusia yang hidup waktu itu, dan diyakini menyebabkan berkurangnya penduduk di Afrika, Timur Tengah, dan India.

Dalam satu tarikan nafas bila disebut Danau Toba juga sekaligus Pulau Samosir. Pulau ini berada di tengah danau dengan geografis memiliki ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut. Hal demikian menjadikan pulau itu menarik buat wisatawan. Di pulau ini ada situs peninggalan leluhur orang Batak. Sebagai tempat wisata yang berada di 7 kabupaten, banyak spot wisata yang ada di sana. Selain Danau Toba dan Pulau Samosir, juga ada Gunung Pusuk Buhit, Paropo, Bukit Gajah Bobok, Holbung Samosir, Bukit Siadtaratas, dan Negeri Bakkara.

Tanjung Kelayang

Pantai Tanjung Kelayang menjadi popular bagi traveller atau wisatawan setelah lokasi ini menjadi bagian dalam penggalan film *Laskar Pelangi*. Di pantai ini teronggok bebatuan putih dalam berbagai ukuran, dari ukuran segenggam tangan hingga sebesar Gajah Afrika. Dengan air yang sebening kaca di pinggir dan biru laut di tengah membuat Pantai Tanjung Kelayang menarik bagi wisatawan, terutama bagi penggemar *diving* dan *snorkling.*

Pantai ini berada di Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Belitung. Berada 27 km dari Tanjung Pandan, Ibukota Kabupaten Belitung. Penerbangan menuju ke Belitung bisa ditempuh dari berbagai bandara di Indonesia (lewat tiket terusan) dengan tujuan akhir Bandar Udara Internasional H.A.S. Hanandjoeddin, Tanjung Pandan.

Jauh sebelum dijadikan sebagai Bali Baru, Tanjung Kelayang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Dasar hukum KEK adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 menjadikan tempat ini sebagai KEK Pariwisata. Seperti dilangsir oleh sebuah situs online, dengan luas wilayah 324,4 Hektar, KEK Tanjung Kelayang memiliki konsep pengembangan pariwisata *Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation*. KEK Tanjung Kelayang diharap mampu menarik investasi sebesar Rp 20 triliun hingga 2025, serta mendatangkan nilai ekonomi Rp 751,4 miliar per tahun pada saat KEK ini sudah beroperasi penuh.

Tanjung Lesung

Tanjung Lesung berada di Desa Tanjung Jawa, Kecamatan Panimbung, Kabupaten Pandeglang, Banten. Kawasan wisata seluas 1.500 hektar ini berjarak 170 km dari Jakarta. Bila dilaju dengan kendaraan memerlukan waktu sekitar 3 hingga 4 jam. Untuk menuju ke sana bila ditempuh dari Jakarta bisa lewat Tol Jakarta – Merak. Keluar di Gate Tol Cilegon. Selepas keluar tol, selanjutnya menyusuri pesisir Pantai Anyer Carita, kemudian masuk kawasan Labuan hingga jalan menuju ke Pantai Tanjung Lesung. Bisa pula keluar gerbang tol Serang Timur. Kemudian Kota Serang hingga arah Pandeglang Banten.

Sebagai wisata yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia, di tempat ini bisa menikmati hamparan pasir, pantai, dan lautan yang cocok untuk wisata diving, snorkling, water sport, sunrise, memancing, dan kuliner, terutama ikan bakar.

Nama Tanjung Lesung, konon berasal dari tanjung, yang menurut cerita rakyat berawal dari nama Kampung Lesung. Nama itu diabadikan untuk mengenang seorang gadis bernama Sri Poh Haci yang pandai bermain lesung. Suatu ketika Sri Poh bertemu dan jatuh cinta dengan seorang pengembara dari pesisir selatan Pulau Jawa yang bernama Raden Budog. Cinta tak bertempuk sebelah tangan, Raden Budog pun jatuh cinta pada kecantikan dan kepiawaian Sri Poh dalam memainkan lesung.

Pulau Seribu

Bagi masyarakat Jakarta, Tangerang, dan sekitarnya, Pulau Seribu bukan suatu yang asing, sebab gugusan pulau kecil yang terserak di Laut Jakarta itu merupakan daerah yang mungkin sudah pernah mereka kunjungi. Gugusan pulau ini masuk wilayah Provinsi DKI Jakarta, administrasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Pulau-pulau yang masuk dalam Kepulauan Seribu adalah Pulau Tidung, Pari, Untung Jawa, Kelapa, Harapan, Panggang, Cipir, Kelor, Kotok, Puteri, Matahari, Sepa, Lancang, Onrust, Bidadari, Rambut, serta puluhan pulau kecil lainnya. Banyaknya pulau itulah yang membuat nama Pulau Seribu disematkan kepada wilayah administrasi tersebut.

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-43_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:39

Sebagai wilayah kepulauan, otomatis wisata yang ada di tempat ini adalah wisata bahari, seperti *diving, snorkling, watersport*, memancing, wisata kuliner ikan bakar, serta melihat jejak sejarah di Onrust ada jejak James Cook sebelum menemukan Benua Australia.

Sebagai kawasan yang mengandung keanekaragaman hayati, Kepulauan Seribu juga ditetapkan sebagai Taman Nasional Laut. Taman nasional ini dikelola oleh Balai Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu, Kementerian Kehutanan. Taman nasional ini mempunyai luas 107.489 hektar dengan 44 buah pulau.

Untuk menuju ke pulau-pulau yang ada di sana, ada beberapa pelabuhan baik speed-boat, kapal tradisional, maupun kapal ferry. Bila ingin menggunakan speedboat yang cepat dan mewah, bisa melalui Pelabuhan Marina, Ancol. Bila ingin menggunakan kapal tradisional atau ferry bisa lewat Pelabuhan Muara Baru, Muara Angke, Jakarta; dan Tanjung Pasir, Tangerang; serta beberapa pelabuhan lainnya seperti Muara Cituis. Ada juga Kapal Sabuk Nusantara lewat Pelabuhan Sunda Kelapa.

Candi Borobudur

Candi Borobudur adalah sebuah obyek wisata yang tak asing lagi buat bangsa Indonesia. Candi yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, itu merupakan candi Budha terbesar di dunia. Candi Borobudur berada di kawasan wisata Jawa Tengah dan Jogjakarta. Seratus km dari Semarang, 86 km dari Surakarta (Solo), dan 40 km dari Kota Jogjakarta, sehingga bila wisatawan berkunjung ke tiga kota itu biasanya mereka sekalian menyambangi Borobudur.

Bangunan candi itu tersusun enam teras berbentuk bujur sangkar di mana di atasnya terdapat tiga pelataran melingkar. Di dinding candi dihiasi 2.672 panel relief dan terdapat 504 arca Buddha. Candi ini dibangun mulai 770 masehi dan rampung 825 masehi. Seiring mundurnya pengaruh Budha di nusantara, candi ini lambat laut ditinggalkan oleh pemeluknya hingga

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ditemukan kembali oleh Thomas Stamford Rafffles pada 1814. Untuk merawat dan menjaga kebesaran Candi Borobudur, sejak pemerintahan kolonial Belanda hingga pemerintahan saat ini sering melakukan pemugaran. Pemugaran yang dilakukan berhasil mengokohkan dan menguatkan tegak berdirinya candi itu.

Untuk lebih mempopularkan Borobudur, pihak pemerintah dan swasta kerap menggelar acara di sana. Lomba Marathon Borobudur, Jazz Festival Borobudur, peluncuran handphone di Borobudur, serta berbagai kegiatan seni dan budaya. Meski sudah dijadikan tempat tujuan wisata, umat Budha masih menggunakan candi itu untuk menggelar doa atau sembahyang. Pada Hari Waisak, jutaan ummat Budha berdoa di sana.

Mandalika

Berada di areal seluas 1.035 hektar, di Mandalika terdapat berbagai destinasi wisata, yakni Pantai Kuta, Seger, Tanjung Aan, Sereting, Gerupuk; Bukit Merese, dan Batu Payung. Di antara tempat wisata itu Pantai Kuta merupakan pantai yang paling popular. Pantai ini sering dibandingkan dengan Pantai Kuta Bali. Bila dibandingkan dengan Pantai Kuta Bali, seperti ditulis oleh

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-44_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:39

Wikipedia, Pantai Kuta Lombok lebih indah, bersih, dan sepi. Tak heran bila kawasan Mandalika, Pantai Kuta termasuk paling berpotensi dikembangkan dibanding spot lain.

Mandalika yang berada di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, itu sama seperti Tanjung Kalayang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata. Sebagai tempat wisata yang tak jauh dari Bali, di kawasan Mandalika sudah berdiri berbagai macam hotel dan resort berbintang 4 sehingga wisatawan tak perlu risau soal fasilitas yang ada di sana.

Keriuhan dan keramaian di Mandalika di 2021 diperkirakan akan semakin menggeliat sebab di tahun itu akan digelar MotoGP. MotoGP merupakan rangkaian seri balap sepeda motor dunia. Bila dalam dunia balap mobil, ada F1 maka di sepeda motor adalah MotoGP. Pembangunan sirkuit MotoGP yang berada di kawasan Mandalika mendapat perhatian langsung dari Presiden Joko Widodo. Dengan digelarnya MotoGP di kawasan wisata pantai dan laut menyenangkan, target 4 juta wisatawan mancanegara dari Mandalika sepertinya akan tercapai.

Gunung Bromo

Bila ingin berwisata dengan latar belakang hamparan pasir, gunung, savana, kawah, dan udara yang bisa menggigilkan tubuh, maka pergi ke Kawasan Gunung Bromo. Kawasan ini berada di irisan Kabupaten Probolinggo, Lumajang, Pasuruan, dan Malang, Jawa Timur. Di tempat ini berbagai rupa bumi ada. Sepuluh tempat wisata yang biasa dikunjungi dan dijadikan wahana selfi di Gunung Bromo Penanjakan 1, Penanjakan 2, Kawah Bromo, Pasir Berbisik, Pura Luhur Poten, Bukit Kingkong, Bukit Cinta, Bukit Teletabis, Desa Ngedas, dan Desa Ngadisari. Biasanya orang pergi ke kawasan ini menjelang subuh dengan tujuan untuk melihat matahari terbit.

Untuk menuju ke kawasan Gunung Bromo, bila wisatawan bepergian dengan naik pesawat maka ia bisa turun di Bandar Udara Djuanda, Sidoarjo; atau Bandar Udara Abdul Rahman Saleh, Malang, semuanya berada di Jawa Timur. Selepas itu dilanjutkan perjalanan darat ke arah Probolinggo. Probolinggo merupakan pintu masuk yang biasa dilakukan oleh wisatawan.

Kawasan ini sudah menjadi Taman Nasional Bromo-Tengger. Bagi penduduk yang mendiami kawasan itu, Suku Tengger, Gunung Bromo diyakini sebagai gunung suci. Setiap tahun umat Hindu di sana menggelar persembahyangan, *Yadnya Kasada* (*Kasodo*). Persembahyangan itu digelar di Pura Luhur Poten, pura yang berada di kaki Gunung Bromo. Persembahyangan diadakan pada tengah malam hingga dini hari setiap purnama, sekitar 14 atau 15 di bulan *Kasodo* (kesepuluh), penanggalan Jawa.

Wakatobi

Di Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, terhampar taman nasional. Di taman nasional tidak hanya kita dapati keindahan alam berupa laut biru, namun juga keindahan daratan dan budaya maritim masyarakat yang unik, Suku Bajo (Bajau). Di *blog* seorang *traveller* menyebutkan, di Wakatobi ada destinasi wisata yang perlu dikunjungi bila ke sana. Tempat itu adalah Tomia dan

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-45_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:40

Onemohute, Pantai Pulau Hoga, perkampungan Suku Bajo, Puncak Tomia; Goa, Kolam Air Tawar Unik, dan Pemandian Alam Hendaopa; Goa Kontamale, Danau Sombano, Pulau Anano, Pantai Cemara, Pulau Binongko, dan Hutan Lindung Tindoi.

Menjadi pertanyaan mengapa kabupaten itu dinamakan Wakatobi? Nama Wakatobi merupakan gabungan dari berbagai pulau yang ada di sana. *Wa* diambil dari nama Pulau Wangi-Wangi, *Ka* dari nama Pulau Kaledupa, *To* dari Tomia, dan *Bi* dari Binongko.

Menarik dari Wakatobi, selain wisata alam juga keunikan Suku Bajo. Cerita Suku Bajo

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ini pernah diangkat dalam film yang berjudul *Mirror Never Lies*. Film garapan Kamila Andini itu dibintangi oleh Atiqah Hasiholan, Reza Rahadian, dan penduduk setempat. Film tersebut bercerita tentang kehidupan masyarakat Bajo dan keindahan bawah laut Wakatobi. Suku Bajo sebenarnya tersebar di berbagai tempat seperti Berau, Bontang, Kalimantan Timur; Kota Baru, Kalimantan Selatan; Selayar, Sulawesi Selatan; Nusa Tenggara Barat; Pulau Boleng, Seraya, Longos, Komodo, Nusa Tenggara Timur; Pulau Sapeken, Sumenep, Jawa Timur. Namun di Wakatobi keberadaan mereka terlihat lebih kentara.

Labuan Bajo

Labuan Bajo merupakan ibukota Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Bagi masyarakat Manggarai Barat, serta masyarakat di kabupaten lainnya, baik di Nusa Tenggara Timur maupun Nusa Tenggara Barat. Labuan Bajo merupakan kota yang sangat strategis, merupakan pusat pemerintahan, pendidikan, perdagangan sejak dulu kala, serta pariwisata. Di Labuan Bajo terdapat tempat wisata, seperti Pantai Pede, Pantai Gorontalo, Puncak Waringin, Gua Batu Cermin, Wae Cicu, Pulau Bidadari, Batu Gosok, dan Taman Nasional Komodo (TNK). Sebagai tempat yang strategis itulah membuat pemerintah menjadikan Labuan Bajo sebagai salah satu Bali Baru.

Dari Labuan Bajo inilah wisatawan bisa menuju ke lokasi wisata, seperti TNK dan Pulau Padar yang sekarang lagi nge-hits. TNK sendiri memiliki luas 173.300 hektar meliputi wilayah daratan dan lautan dengan lima pulau utama, yakni Pulau Komodo, Padar, Rinca, Gili Motang, Nusa Kode, dan juga pulau-pulau kecil lainnya. Di TNK terdapat 254 spesies tumbuhan berasal dari Asia dan Australia. Tak hanya itu, juga terdapat 58 jenis binatang dan 128 jenis burung.

Puas melihat binatang raksasa melata, selanjutnya kita bisa menyambangi Pulau Padar. Di tempat ini sekarang nge-hits dijadikan tempat selfi. Padar merupakan pulau ketiga terbesar di TNK. Hebatnya, pulau ini diterima sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO. Di pulau ini wisatawan dapat naik ke bukit untuk menikmati keindahan alam yang begitu mempesona.

Morotai

Salah satu wilayah yang berbatasan langsung dengan negara lain adalah Kabupaten Morotai, Maluku Utara. Kabupaten kepulauan ini berbatasan dengan Samudera Pasifik. Sebagai wilayah strategis yang berada di bibir Pasifik membuat Morotai dijadikan pangkalan pertahanan udara Angkatan Udara Jepang saat Perang Dunia II. Dalam pertempuran selanjutnya, Tentara Sekutu yang dipimpin oleh Amerika Serikat berhasil merebut Morotai dari Jepang. Morotai kemudian dijadikan pangkalan pertahanan udara Sekutu yang digunakan untuk melancarkan serangan ke Filiphina, Kalimantan Timur, bahkan Jawa.

Sebagai wilayah kepulauan, Morotai mempunyai tempat wisata alam yang indah dan mempesona, seperti Tanjung Gorango, Dehegila; Pantai Nunuhu, Air Terjun Raja, Pulau Kolorai, Kokoya, Dodola, Pulau Tabailenge; dan Air Kaca. Selain wisata alam menarik dikunjungi saat di Morotai adalah banyaknya jejak peninggalan Perang Dunia II, baik dari Sekutu maupun Jepang, yang dapat dilihat di Museum Perang Dunia II, Pulau Zum Zum sebagai tempat tinggal Jenderal Sekutu Douglas Mac Arthur, Monumen Teuro Nakamura, prajurit terakhir Jepang yang menyerah pada 1974; Air Terjun Nakamura, Landasan Pitu pangkalan udara Jepang, *Army Dock and Navy Base* pusat pertahanan tentara Sekutu, dan *Tank Amphibi.* ❑

AWG/*dari berbagai sumber*

Siti Sumiwati Rannu
Guru PPKN SMAN 1 Baubau

Program Pendidikan MPR Baik Untuk Pelajar

HAMPIR seluruh kegiatan, termasuk bidang pendidikan, berpusat di Jakarta. Bahkan ada kegiatan yang hanya dapat disaksikan oleh para pelajar di daerah melalui televisi dan media lainnya. Hal itu menunjukkan bahwa penyebaran pendidikan hanya ada di pusat, dan tidak menyentuh daerah-daerah, terutama daerah terpencil.

Tapi, saya bersyukur ada pihak-pihak, seperti lembaga negara MPR RI yang sangat peduli kepada bidang pendidikan, terutama untuk pelajar sekolah menengah atas. Salah satunya dengan menyelenggarakan kegiatan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR.

Program LCC Empat Pilar bahkan menyasar sampai ke daerah-daerah, dan memberikan kesempatan kepada pelajar-pelajar di daerah untuk menunjukkan kemampuannya dalam bertanding di tingkat nasional. Kegiatan ini memberi motivasi luar biasa kepada anak-anak didik kami. Mereka menjadi sangat giat, apalagi setelah berhasil menjadi finalis di Jakarta.

Kesan sangat mendalam yang paling

dirasakan para siswa dan siswi adalah bisa menginjakkan kaki di Jakarta, karena kebanyakan pelajar dari daerah belum pernah ke Jakarta. Selama ini mereka hanya melihat Jakarta lewat layar televisi dan membaca di buku. Nah, begitu mendapat kesempatan terpilih dan mewakili provinsi berlomba di Jakarta, tentu mereka sangat antusias.

Apalagi mereka berangkat ke Jakarta menggunakan pesawat terbang, karena kebanyakan mereka belum pernah naik pesawat terbang. Belum lagi, setelah tiba di Jakarta, mereka melihat gedung-gedung yang tinggi, bisa merasakan bermain di tempat-tempat hiburan atau tempat wisata, dan tentu tak kalah mengesankan bisa berkenalan dengan teman-teman baru sesama pelajar dari berbagai daerah di Indonesia. Bisa dibayangkan betapa senang dan gembiranya mereka.

Saya rasa, harus banyak kegiatan di bidang pendidikan, seperti yang dilakukan oleh MPR ini. Kalau bisa lembaga-lembaga lain, selain MPR, juga membuat kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak daerah untuk menunjukkan kemampuannya. Kemampuan anak-anak daerah tidak kalah dibandingkan anak-anak kota, seperti Jakarta. Dan, terbukti bahwa juara nasional LCC Empat Pilar MPR selama ini selalu diraih oleh pelajar dari luar Jakarta. ❑

DER

Fidella Elizabeth Arden Doom
Pelajar SMAN 5 Jayapura

Bhinneka Tunggal Ika Terasa di Jakarta

PADA awalnya, saya agak khawatir juga ketika saya dan sekolah saya terpilih maju ke putaran final Lomba Cerdas Cermat (LCC) yang digelar oleh MPR di Jakarta pada Oktober 2019. Apalagi harus berbaur dengan pelajar dari seluruh provinsi di Indonesia. Kekhawatiran kami, apakah mereka mau menerima anak-anak Papua.

Namun, rasa khawatir itu langsung hilang dan berganti keceriaan ketika tiba di Jakarta dan bertemu muka dengan para pelajar dari seluruh provinsi di Indonesia. Kami semua saling menerima, tidak melihat dari mana asal, dan kita cepat sekali berkenan dan berteman.

Menurut saya, ini sangat baik. Kegiatan-kegiatan semacam ini (LCC) mampu

memberikan penegasan kepada seluruh rakyat Indonesia dan dunia bahwa kami rakyat Indonesia adalah saling bersaudara. Permasalahan atau pun konflik yang pernah terjadi hanyalah kesalahpahaman belaka. Pada intinya kami semua bersaudara.

Saya rasa, inilah yang harus menjadi pemahaman kita semua bahwa seluruh rakyat Indonesia dari Aceh sampai Papua adalah satu, hatinya satu, dan tanah airnya satu, yakni Indonesia. Saya berharap, pemerintah ke depan melakukan hal seperti itu, yakni upaya-upaya dalam mengaktualisasikan kebhinnekaan Indonesia. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-47_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:40

MPR Sosialisasikan Empat Pilar di Pulau Bawean

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Jazilul Fawaid selama satu hari, 30 Oktober 2019, melakukan kunjungan ke berbagai kelompok dan komunitas masyarakat di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kunjungan anggota Fraksi PKB ini ke pulau Bawean adalah dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Kegiatan sosialisasi Empat Pilar MPR hari itu berlangsung di beberapa tempat. Lokasi pertama yang disambangi adalah Perguruan Pencak Silat Bawean. Di hadapan para anggota dan pendekar pencak silat di pulau itu, Jazilul mengatakan, dia bersyukur bisa bersilaturahim dengan mereka. "Pencak silat Bawean memiliki ciri tersendiri," ujarnya.

Pendekar, kata Jazilul lebih lanjut, juga merupakan santri. Jadi, orang Bawean itu, selain bisa mengaji juga bisa bela diri. Dua ilmu ini, menurut Jazilul, merupakan bekal bagi orang Bawean untuk merantau. Karena itulah, Jazilul punya keinginan untuk membina kelompok silat agar terus melakukan regenerasi.

Dalam sosialisasi itu, Jazilul mengajak para pendekar dan anggota pencak silat Bawean menjaga Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dia berharap, para pendekar ikut mengawal Pancasila. Jangan sampai ada keinginan untuk mengganti Pancasila. "Kalau Pancasila diganti maka runtuhlah negeri ini," tegas Jazilul.

Sebagai putra asli Bawean, Jazilul percaya masyarakat di pulau itu, selain cinta agamanya juga cinta Pancasila. "Dan, tentunya, cinta persatuan," tambahnya. Pencak silat, menurut Jazilul, sangat penting, karena selain untuk menjaga jasmani juga lambang kejantanan, kesetiaan, dan keberanian. Ia berharap, agar para pendekar ikut mendidik anak muda untuk menjadi sosok yang bertanggung jawab.

Selepas bertemu dengan para anggota pencak silat, Jazilul selanjutnya mengunjungi Pondok Pesantren Darussalam di Desa Daun. "Selamat Hari Santri," sapa Jazilul kepada ratusan santri dan santriwati di Pondok Pesantren tersebut. Selanjutnya, Jazilul menyatakan, Indonesia bisa merdeka juga berkat perjuangan para santri dan kiai.

Kepada para santri, Jazilul menjelaskan bahwa kunjungannya ke Pondok Pesantren Darussalam ini adalah dalam rangka sosialisasi Empat Pilar. Menurut Jazilul, sosialisasi Empat Pilar MPR penting untuk menjaga Pancasila agar jangan sampai runtuh. "Bila Pancasila runtuh maka negara Indonesia akan bubar, karena tak ada lagi pengikatnya," tegas Jazilul, seraya menekankan bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. "Selain 100% Islam, santri juga 100% Pancasila", ungkap Jazilul.

Alumni PTIQ itu mengakui, pesantren mempunyai peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Pesantren mempunyai tiga fungsi yang berguna bagi bangsa dan negara. Ketiga fungsi itu adalah: pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. "Santri dan pesantren harus bangga", tutur Jazilul seraya mengingatkan supaya para santri menata diri agar menjadi manusia unggul.

Selepas bersilaturahim dengan para santri dan santriwati Pondok Pesantren Darussalam, berikutnya mantan aktivis PMII itu mengunjungi para perajin kerajinan tangan dari daun pandan. Para

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-48_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:41

perajin yang berada di Desa Gunung Teguh itu dipompa semangatnya agar terus mengembangkan diri sebagai upaya melestarikan kerajinan yang sudah dilakukan secara turun-temurun itu. Ia berharap, agar pemerintah ikut membuka pasar kepada para perajin agar usaha mereka tetap eksis.

Dan, begitu menjelang sore, Jazilul meneruskan perjalanannya hari itu, mengunjungi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raden Santri. Di perguruan ini, dia mendorong para mahasiswa agar mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

Hadir di Pengajian Nahdlatul Ulama

Setelah menyampaikan sosialisasi Empat Pilar di berbagai tempat di pulau Bawean, malam harinya, atau tepatnya Rabu malam (30 Oktober 2019), Jazilul Fawaid hadir dalam acara Pengajian Nahdlatul Ulama (NU) di Lapangan Tanjung Anyar, Desa Lebak, Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pengajian yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Santri itu dihadiri oleh ribuan warga masyarakat Pulau Bawean. Malam itu, ceramah disampaikan oleh KH. Manarul Hidayat, dan dihadiri pula oleh para tokoh NU Bawean, serta perangkat kecamatan dan desa setempat.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid, dalam acara pengajian itu, mendapat kesempatan menyampaikan Sosialisasi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sebagai pimpinan MPR, ujar Jazilul, pada momentum Hari Santri ini, dia mempunyai tanggung jawab melakukan Sosialisasi Empat Pilar. Dan, sosialisasi Empat Pilar ini, lanjut Jazilul, dilaksanakan di Pulau Bawean, di mana hampir 100% penduduknya adalah kaum santri. Maka, tak heran, kalau pengajian ini dihadiri oleh ribuan santri, apalagi acara ini diumumkan di masjid dan mushola.

Kepada para peserta pengajian, Jazilul mengingatkan kembali pentingnya Empat Pilar. Jazilul mengakui bahwa pemahaman nilai-nilai kebangsaan di kalangan kaum santri sudah kuat. "Santri itu mengedepankan cinta tanah air", ujarnya. Bahkan, lanjut Jazilul, nilai-nilai Empat Pilar diajarkan di pesantren sejak kecil, seperti tertera dalam bait lagu: "Cinta Tanah Air Sebagian dari Iman." Cinta NKRI, menurut Jazilul, ada aturannya dan aturan itu ada pada Pancasila, UUD, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Meski demikian, Jazilul mengingatkan, para santri juga harus diberdayakan. Sumber daya manusia dan perekonomiannya harus diperkuat. "Ini penting, sebab bila ekonominya tidak kuat maka akan mudah tergoda oleh paham yang salah," ucapnya. Dia mencontohkan ada lulusan pesantren, karena tidak mempunyai pekerjaan maka ia pergi keluar negeri. Di luar negeri itulah ia terkena paham radikal, terorisme. Untuk itulah, Jazilul menegaskan kembali bahwa santri juga perlu diberi dukungan pemberdayaan ekonomi agar tak mudah tergoda paham lain.

Ia juga mengingatkan bahwa globalisasi lewat medsos juga menyerbu masyarakat di manapun berada, termasuk di Bawean. Untuk itu, dia mengingatkan para santri dan masyarakat, tantangan hari ini berbeda dengan tantangan kemarin. "Bila santri dan masyarakat kuat maka mereka bisa menjadi garda terdepan menjaga Indonesia", urainya. ❑

AWG

Gedung Nusantara V

Fraksi Partai Golkar Gelar Rapat Pimpinan Perdana

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

BERTEMPAT di Ruang GBHN, Gedung Nusantara V, Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, 11 November 2019, Fraksi Partai Golkar di MPR menggelar rapat pimpinan. Selain unsur personalia Fraksi Partai Golkar di MPR, rapat itu juga dihadiri anggota Partai Golkar yang menjadi pimpinan di MPR, DPR, Badan Anggaran, Badan Sosialisasi, Badan Pengkajian, dan Komisi Kajian Ketatanegaraan. Maka tak heran bila rapat ini dihadiri Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, Sesjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, serta para anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan yakni Andi Mattalata, Rambe Kamarulzaman, dan Rully Chairul Azwar.

Pimpinan rapat Idris Laena menjelaskan, rapat perdana pimpinan Fraksi Partai Golkar ini membahas beberapa agenda. Selanjutnya, pria asal Riau menyebutkan bahwa salah satu agenda rapat pimpinan adalah membahas Surat Keputusan DPP Partai Golkar yang mengesahkan personalia pengurus Fraksi Partai Golkar di MPR.

Melalui surat keputusan itu, DPP Partai Golkar menetapkan Ketua Partai Golkar Airlangga Hartanto, Ketua MPR Bambang Soesatyo, Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin, Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Manpora Zainudin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Wakil Menteri Jerry Sambuaga sebagai penasihat Fraksi Partai Golkar di MPR. Sedangkan Idris Laena dipercaya menjadi Ketua Fraksi Partai Golkar di MPR. Dalam mengemban tugas sebagai ketua fraksi, Idris

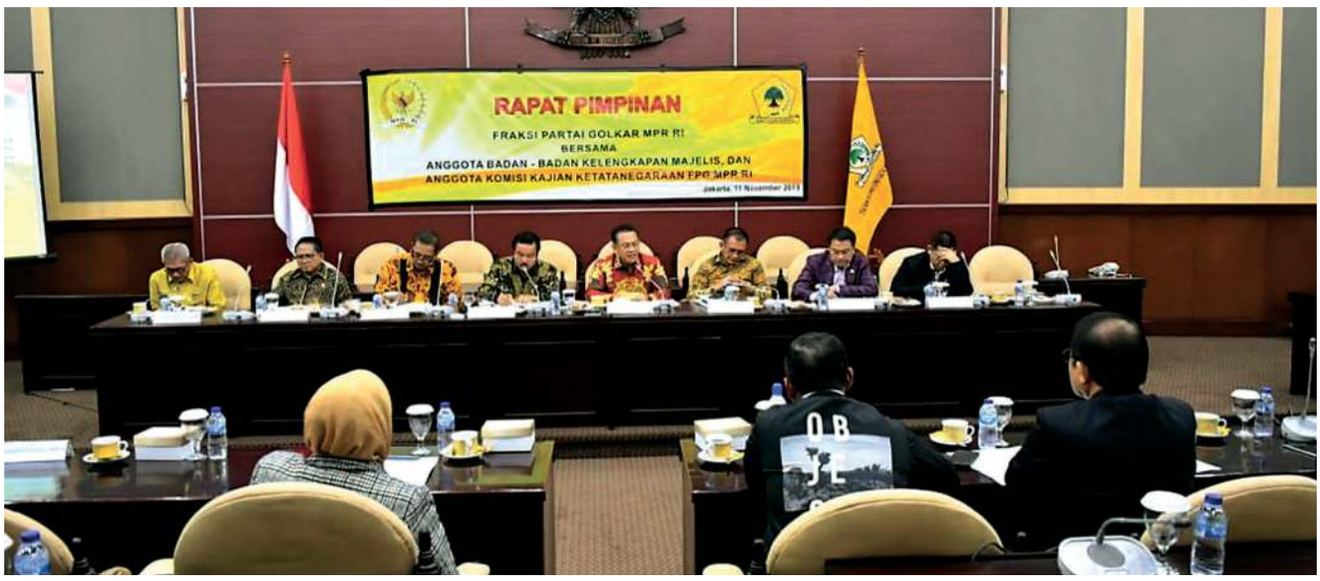

Laena dibantu oleh tiga wakil ketua, tiga wakil sekretaris, dan bendahara umum.

Selain itu, rapat pimpinan Fraksi Partai Golkar di MPR itu juga membahas masalah arah Fraksi Partai Golkar ke depan. Bila menyangkut arah fraksi maka pimpinan fraksi yang ada di MPR harus mengikuti kebijakan yang diputuskan oleh DPP Partai Golkar.

Selanjutnya, terkait pokok-pokok haluan negara, Fraksi Partai Golkar tidak menolak atau tidak mempermasalahkan perlunya pokok-pokok haluan negara. "Selama negara membutuhkan haluan negara kami tetap dukung", ungkap Idris Laena. Meski demikian, Fraksi Partai Golkar di MPR tetap berpegang pada Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 di mana partai berlambang pohon beringin itu setuju pokok-pokok haluan Negara, namun diatur dalam undang-undang, bukan lewat Ketetapan MPR. Karena bila lewat Ketetapan MPR maka diperlukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Untuk melakukan amandemen diperlukan kajian yang mendalam yang melibatkan seluruh rakyat Indonesia", ungkapnya.

Menurut Idris Laena, ada beberapa fraksi yang bersikap sama dengan Fraksi Partai Golkar dalam hal-hal pokok haluan negara. Meski demikian, Idris Laena mengakui, dunia politik itu dinamis dan berkembang sehingga fraksinya akan mengikuti apa yang terjadi. "Tinggal melihat komunikasi politik yang terbangun, sehingga nanti semua bisa mempunyai sikap yang sama," tuturnya. Bagi Idris Laena, MPR adalah lembaga permusyawaratan rakyat, karenanya kita berharap semua diselesaikan dengan musyawarah.

Bila pokok-pokok haluan negara ditetapkan lewat undang-undang, menurut Idris Laena, tetap membutuhkan keterlibatan DPD. "Karena, semua rancangan undang-undang bisa diusulkan oleh DPR, pemerintah, dan juga oleh DPD", ungkapnya. "Untuk itu pertimbangan DPD dalam undang-undang tentang pokok-pokok haluan negara tetap diperlukan", ucapnya.

Dalam kesempatan itu, rapat pimpinan Fraksi Partai Golkar di MPR juga membahas rencana kerja Fraksi Partai Golkar. Idris Laena menjelaskan, fraksinya merencanakan setiap bulan mengadakan *focus group discussion* (FGD) Empat Pilar. "Kami ingin melibatkan wartawan, dan mendiskusikan mengenai masalah kebangsaan," katanya. ❑

AWG

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-51_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:41

PSB Bogor

Wayang Golek Tebarkan Nilai Empat Pilar untuk Warga Bogor

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

PAGELARAN Seni Budaya (PSB) Nasional Wayang Golek dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar MPR kali ini menyambangi masyarakat Tatar Pasundan, tepatnya di Kota Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu malam (9/11/2019).

Seperti wilayah lainnya di Jawa Barat, ketika pertunjukan wayang golek digelar biasanya respon masyarakat sekitar sangat luar biasa. Hal serupa juga terjadi saat pagelaran dipusatkan di lapangan Demokrat Sport Center Cibinong, sebuah lapangan yang lokasinya tak jauh dari pusat Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Dengan tata panggung nan apik, diisi pertunjukan yang menampilkan kolaborasi dua dalang dalam satu panggung. Kedua dalang yang sangat dikenal di wilayah Bogor itu adalah Ki Ujang Bukhari dan Ogi Sabda Permana dari padepokan Pusaka Tumaritis.

Pagelaran kesenian Wayang Golek ini bertambah semarak lagi dengan hadirnya anggota MPR RI Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, dan Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, Selain itu hadir pula beberapa tamu undangan lain, di antaranya tampak perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor; Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Bogor, Bambang Sumantri; beberapa tokoh masyarakat, dan perangkat desa sekitar.

Anton Sukartono mewakili pimpinan MPR dalam sambutannya menyatakan, respon masyarakat terhadap pagelaran seni budaya dalam rangka Sosialisasi Empat Pilar ini merupakan bentuk dukungan masyarakat kepada upaya-upaya MPR dalam memberikan pemahaman tentang nilai-nilai luhur bangsa, yang ujungnya adalah persatuan bangsa. Untuk itu, Anton memberikan apresiasi atas respon masyarakat yang hadir menyaksikan Pagelaran Seni Budaya ini.

Terkait persatuan bangsa, Anton menegaskan, bangsa Indonesia mesti mengucapkan syukur atas nikmat persatuan yang terus terjaga hingga kini. Dengan begitu besarnya keragaman yang ada di Indonesia, seluruh elemen negara mampu menjaga-nya hingga tetap satu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat yang menyambut baik pagelaran ini," ucap Anto Sukartono.

Pagelaran Seni Budaya tradisional Wayang Golek, menurut Anton, merupakan salah satu dari banyak metode digunakan oleh MPR dalam menyosialisasikan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang ditujukan kepada segenap elemen masyarakat di Indonesia. Kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR ini, kata Anton, telah berjalan selama 10 tahun. "Ini membuktikan bahwa MPR peduli dan akan terus peduli terhadap persatuan dan kesatuan bangsa," ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Humas Setjen MPR, Siti Fauziah, SE., MM., selaku ketua pelaksana Pagelaran Seni Budaya, dalam

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-52_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:41

laporannya menyatakan, pagelaran seni budaya Wayang Golek ini merupakan salah satu metode penyampaian nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat. Pagelaran ini, lanjut Siti Fauziah, selain untuk sosialisasi Empat Pilar, juga sebagai upaya MPR untuk ikut melestarikan seni budaya daerah yang kaya dan beragam.

Upaya pelestarian seni budaya ini, lanjut Siti Fauziah, semakin penting di era modern ini, di mana seni budaya dari luar yang terus "menggoda" warga bangsa, terutama generasi muda. Kalau seni budaya bangsa sendiri tidak dijaga dan diperhatikan, maka sangat mungkin suatu saat nanti menjadi punah. "Jangan sampai seni budaya sendiri lama kelamaan semakin hilang dan tergantikan dengan budaya luar, karena kita lalai menjaganya," kata Siti Fauziah.

Empat Pilar dalam lakon 'Jaya Bhinneka'

Pagelaran Seni Budaya ini segera dimulai setelah Anggota MPR Fraksi Demokrat, Anton Sukartono, secara simbolis menyerahkan tokoh wayang kepada Ki Dalang. Usai acara itu, dua dalang segera beraksi membawakan lakon 'Jaya Bhinneka.' Lakon ini adalah sebuah cerita yang sarat dengan pesan moral, antara lain berisi upaya mempersatukan bangsa dengan memahami dan mengamal-kan nilai-nilai luhur bangsanya.

Jelasnya, 'Jaya Bhinneka' adalah sebuah lakon berkisah tentang perseteruan dan adu kesaktian antara dua ksatria tangguh, yakni Arjuna dan Jaya Bhineka. Dua kesatria adu kesaktian dalam mempertahankan keyakinan masing-masing. Antara Arjuna dan Jaya Bhineka terjadi saling silang paham menyangkut syarat mengembalikan kesejahteraan Negara Amarta.

Untuk mengembalikan kesejahteraan Negara Amarta, Arjuna mengajukan syarat, yaitu mengambil tumbal seorang punakawan. Hal tersebut mendapat tentangan keras dari Jaya Bhineka, karena merasa keinginan Arjuna itu aneh. Karena tidak ada titik temu, maka terjadilah adu kesaktian antarkeduanya.

Dalam pertunjukan ini, ada beberapa adegan yang sangat kental berisi ajakan untuk memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa dengan baik. Di antaranya, adegan saat tokoh sentral Cepot sedang berbincang dengan keluarganya, Semar, Dawala, dan Gareng.

Dalam cerita itu, Cepot menjelaskan bahwa dalam berbahasa harus imbang antara bahasa daerah dan bahasa Indonesia yang merupakan bahasa persatuan. Bahasa daerah digunakan untuk pelestarian budaya. Sedangkan bahasa Indonesia digunakan untuk menjaga persatuan.

Lalu, ada satu lagi adegan lucu dan membuat penonton tergelak, yakni saat Cepot sangat kesal dengan Dawala yang dianggapnya sombong, karena terlalu membangga-banggakan dirinya di hadapan keluarganya. Cepotpun mengingatkan Dawala agar selalu rendah hati walaupun hebat, karena berlaku sombong tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa."Kamu harus ingat nilai-nilai luhur bangsa kita yang agung, Dawala," tegas Cepot kepada adiknya. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-53_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:42

Universitas Hasanudin Makassar

Fadel Muhammad: Kampus Menjadi Laboratorium Kewirausahaan

Kopma bisa menjadi tempat untuk menumbuhkan spirit kewirausahaan dan entrepreneur. Kopma menjadi embrio lahirnya wirausaha dan entrepreneur.

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

WAKIL Ketua MPR Prof. Dr. Fadel Muhammad mengatakan, kampus (perguruan tinggi) harus menjadi laboratorium bagi mahasiswa untuk melatih diri menjadi wirausaha atau entrepreneur. Di kampus mahasiswa melatih diri di Koperasi Mahasiswa (Kopma) sehingga setelah lulus dari perguruan tinggi mereka menjadi pengusaha.

"Kampus harus menjadi laboratorium untuk mahasiswa melatih diri menjadi entrepreneur. Menjadi pengusaha ke depan harus berbasis perguruan tinggi," kata Fadel Muhammad dalam Kuliah Umum Perkoperasian dan Sosialisasi Empat Pilar MPR di Aula Prof Mattulada, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanudin, Makassar, Senin (11/11/2019). Kuliah umum dalam rangkaian *Kopma Unhas Fair 2019* ini dihadiri Rektor Unhas Dwia Aries Tina Palubuhu dan dua anggota MPR Ajiep Padindang dan Lily Amelia Salurapa.

Kepada para mahasiswa, Fadel menceritakan pengalaman berwirausaha sejak menjadi mahasiswa ITB. Fadel Muhammad masuk ITB pada 1972. Dua tahun kemudian dia sudah aktif sebagai anggota Kopma ITB. Pada 1975 Fadel Muhammad menjadi Ketua Kopma ITB. Di bawah kepemimpinannya, Fadel Muhammad menggerakkan aktivis kampus untuk menjual baju dan kaos dengan simbol Ganesha kepada anak-anak SMA. Kopma ITB berkembang pesat.

"Kopma bisa menjadi tempat untuk menumbuhkan spirit kewirausahaan dan entrepreneur. Sebab, Kopma ini menjadi embrio lahirnya wirausaha dan entrepreneur," kata Wakil Ketua MPR dari Kelompok DPD ini.

Dalam kesempatan itu, Fadel mengungkapkan, tujuh ciri wirausaha atau entrepreneur. Pertama, memiliki leadership. Kedua, melakukan inovasi. "Kunci pengusaha adalah inovatif, yang artinya melakukan sesuatu yang baru tetapi lebih bagus dan lebih baik," ujarnya.

Ketiga, memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang didominasi otak kanan atau mengasah intuisi. Keempat, mempunyai sikap yang tanggap terhadap perubahan. "Ini yang paling sulit. Attitude toward the change. Wirausaha harus berani atau mau berubah jika ada sesuatu yang baru. Wirausaha memiliki sikap terbuka terhadap perubahan," jelasnya.

Kelima, tidak hanya bekerja keras, wirausaha juga harus bekerja cerdas. Artinya, bekerja dengan menggunakan kepintaran (pikiran yang smart). Keenam, memiliki visi masa depan berdasarkan kemampuan atau kapabilitas, peluang, dan strategi. Ketujuh, fokus pada peluang yang ada dengan mengkalkulasi risiko secara cermat.

"Ketujuh ciri itu harus dimiliki seorang wirausaha atau entrepreneur. Kopma bisa melahirkan wirausaha dengan ciri-ciri seperti itu," imbuhnya.

Saat ini Fadel Muhammad sedang mengembangkan sinergi antara perguruan tinggi atau kampus dengan industri. "Kalau dunia kampus dan industri bisa bekerjasama dengan baik maka lulusan perguruan tinggi bisa mempunyai wawasan luas untuk menjadi pekerja atau membuka lapangan pekerjaan sebagai wirausaha," pungkasnya.

Sementara itu anggota MPR dari Kelompok DPD H. Ajiep Padindang dan Lily Amelia Salurapa menyampaikan sosialisasi Empat Pilar MPR. ❑

BSC

CC EMPAT PILAR MPR RI 2019

SMA Negeri 1 Tenggarong Juara Pertama LCC Empat Pilar MPR

SISWA peserta putaran final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR Tingkat SLTA didampingi dua guru dan wakil dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari setiap provinsi mulai berdatangan di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, sejak Senin pagi (28/10/2019). Setelah beristirahat sejenak di penginapan, mereka datang berombongan ke Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pada malam hari itu mereka akan mengikuti pembukaan putaran final LCC Empat Pilar yang dihadiri Sekretaris Jenderal MPR, Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH, MH.

Gedung Nusantara IV pun sudah penuh dengan siswa peserta LCC Empat Pilar MPR dari semua provinsi di Tanah Air. Peserta putaran final LCC Empat Pilar MPR Tingkat SLTA ini adalah pemenang di provinsi masing-masing. Dalam putaran final di Jakarta, mereka bersaing untuk memperebutkan juara LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional. Rangkaian final dan grand final LCC Empat Pilar dimulai pada Senin (28/10/2019) hingga 5 November 2019. Pada hari yang bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda itu, Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono membuka secara resmi putaran final LCC Empat Pilar MPR tingkat SLTA se-Indonesia tahun 2019.

Dalam sambutannya, Ma'ruf Cahyono mengucapkan, selamat datang kepada para siswa peserta LCC Empat Pilar dan guru pendamping serta perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan provinsi. "Selamat datang di Gedung MPR. Kehadiran para siswa peserta putaran final LCC ini adalah bagian dari generasi muda yang unggul di provinsi masing-masing. Para juara di provinsi masing-masing," ujarnya.

Ma'ruf menjelaskan bahwa MPR setiap tahun menyelenggarakan LCC Empat Pilar MPR RI. LCC Empat Pilar MPR adalah bagian dari metode MPR untuk menginternalisasikan, menyosialisasikan, membumikan, dan membunyikan nilai-nilai Empat Pilar MPR. Mengawali putaran final dan grand final LCC bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ini bisa menjadi momentum untuk menginternalisasi nilai-nilai kebangsaan kepada generasi muda, khususnya siswa peserta LCC Empat Pilar MPR.

"Generasi muda harus paham tentang Pancasila sebagai ideologi negara, konstitusi UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya memberi kesadaran bernegara, tetapi juga kesadaran

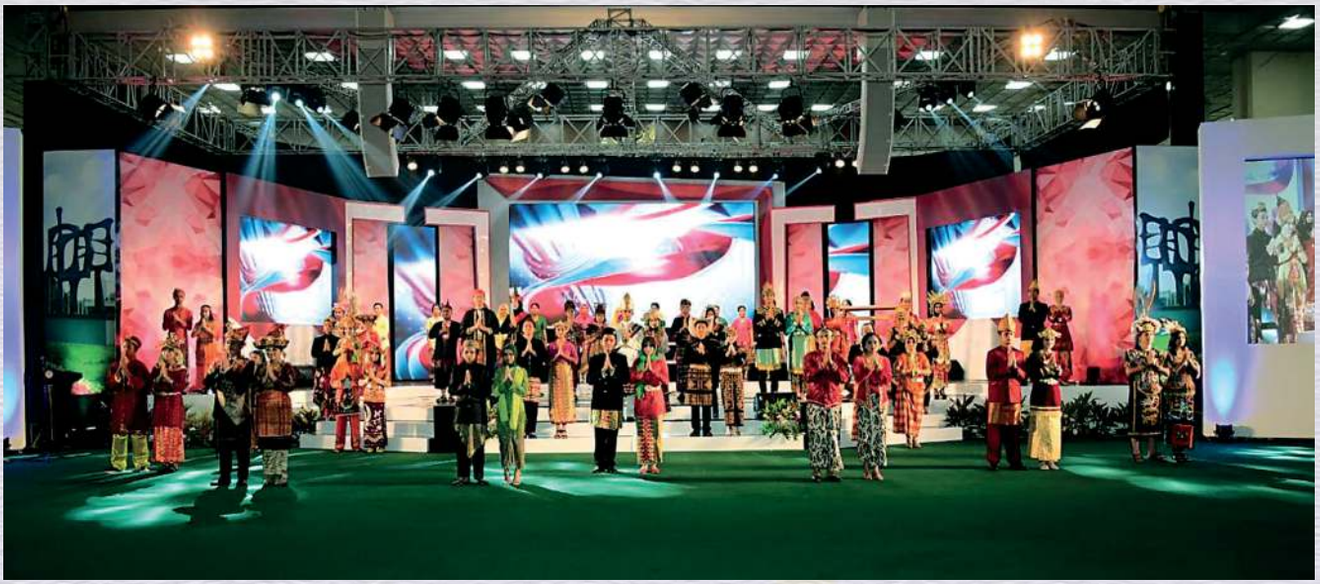

berkonstitusi, komitmen terkait NKRI dan pemahaman terhadap semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Sehingga Empat Pilar MPR RI bisa terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari," katanya.

Kepada para siswa peserta LCC Empat Pilar MPR, Ma'ruf juga berpesan agar memiliki wawasan kebangsaan. Belajar tentang wawasan kebangsaan adalah belajar menjadi warga negara yang baik. "Pemuda harus menyemai Indonesia yang religius, Indonesia yang humanis, Indonesia yang bersatu, Indonesia yang demokratis, dan Indonesia yang adil," pesannya.

Pembukaan putaran LCC Empat Pilar MPR tingkat SLTA ini dihadiri jajaran Sekretariat Jenderal MPR dan peserta LCC Empat PIlar dari 34 provinsi di Indonesia beserta guru pendamping dan perwakilan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi masing-masing. Selain lomba, peserta juga mengikuti kegiatan lain seperti audiensi dengan Pimpinan MPR, wisata pendidikan, outbound, dan lainnya.

Menuju grand final

Setelah mengikuti pengundian LCC Empat Pilar MPR pada Selasa pagi (29/10/2019), para siswa mengikuti audiensi dengan Pimpinan MPR. Hari-hari berikutnya diisi dengan perlombaan dengan materi Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, ditambah dengan wawasan nusantara (potensi daerah, lagu dan budaya daerah). Setiap babak penyisihan selalu berlangsung dengan ketat. Para siswa berusaha tampil maksimal berebut tempat di grand final.

Hingga sampai pada babak final pada Sabtu (2/11/2019). Dari babak final ini, tiga sekolah berhasil lolos ke grand final LCC Empat Pilar MPR tahun 2019. Ketiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Brebes Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 2 Sampit Provinsi Kalimantan Tengah dan SMA Negeri 1 Tenggarong Provinsi Kalimantan Timur. Grand final LCC Empat Pilar MPR berlangsung pada Ahad (3/11/2019) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam grand final, SMA Negeri 1 Tenggarong berhasil menjadi juara pertama setelah meraih poin 199, diikuti SMA Negeri 2 Sampit yang meraih poin 172 sebagai juara kedua, dan SMA Negeri 1 Brebes dengan nilai 160 di tempat ketiga.

Grand Final LCC Empat Pilar MPR ini berlangsung cukup ketat. SMA Negeri 1 Tenggarong yang tertinggal pada babak pertama dan kedua, berhasil merebut poin pada babak ketiga. Pada babak pertama, SMA Negeri 1 Tenggarong hanya meraih 70 poin, sementara SMA Negeri 1 Brebes dan SMA Negeri 2 Sampit masing-masing meraih 75.

Pada babak kedua atau babak "benar salah", SMA Negeri 1 Tenggarong juga tertinggal. SMA Negeri 1 Tenggarong hanya meraih poin 164, sementara SMA Negeri 1 Brebes meraih poin tertinggi 170, dan SMA Negeri 2 Sampit meraih poin 167. Persaingan di antara tiga sekolah pada grand final ini cukup ketat memasuki awal babak ketiga.

Pada babak ketiga, yaitu babak "satu lawan satu", SMA Negeri 1 Tenggarong berhasil merebut banyak poin. Babak ini adalah babak rebutan menjawab pertanyaan. Jika jawaban benar mendapat 10 poin, jika jawaban salah dikurangi 5 poin. Inilah "babak keberuntungan" bagi SMA Negeri 1 Tenggarong. Dalam "satu lawan satu", siswa dari SMA Negeri 1 Tenggarong berhasil merebut dan menjawab pertanyaan dengan benar. Sementara peserta SMA Negeri 1 Brebes dan SMA Negeri 2 Sampit sering melakukan

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-57_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:42

kesalahan menjawab sehingga poin berkurang.

Setelah babak "satu lawan satu" berakhir, SMA Negeri 1 Tenggarong memperoleh poin 199, sedangkan SMA Negeri 2 Sampit memperoleh 172, dan poin SMA Negeri 1 Brebes berkurang menjadi 160. SMA Negeri 1 Tenggarong berhasil meraih juara pertama LCC Empat Pilar MPR tahun 2019.

Ketua Dewan Juri Idris Laena menyatakan, bangga dengan kemampuan para siswa peserta LCC Empat Pilar MPR. "Siswa peserta LCC dari setiap provinsi ini luar biasa. Mereka memahami, menghafal, dan membacakan, serta memberikan pandangan tentang Empat Pilar MPR. Ini sangat luar biasa," ujar anggota MPR dari Fraksi Partai Golkar.

Sementara itu, Sri Sahid Adwiniyem, guru pembimbing SMA Negeri 1 Tenggarong, mengungkapkan, sudah mempersiapkan timnya sejak setahun lalu untuk menghadapi LCC Empat Pilar MPR. Persiapan dilakukan mulai dari seleksi para siswa dan memberikan materi seperti Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, Ketetapan MPR, wawasan nusantara (nama-nama pahlawan nasional, tarian daerah, dan lainnya). "Pemberian materi dilakukan setelah pelajaran di sekolah, bahkan liburan pun digunakan untuk menguasai materi," ujarnya.

Mewakili SMA Negeri 1 Tenggarong, Asyifa Idnu Rahmah, mengaku, terharu dengan kemenangan timnya sebagai juara pertama LCC Empat Pilar MPR tingkat nasional. "Alhamdulillah sudah menjadi juara," ucapnya.

"Persiapan yang dilakukan dengan menghafal materi lomba, seperti pasal-pasal di UUD NRI Tahun 1945, bagaimana menjawab pertanyaan dengan benar, teknik merebut pertanyaan, dan lainnya. Kita harus mengerti materi, jadi tidak sekadar hafal, tapi juga mengerti konstitusi kita," ujarnya.

Sementara itu, meski meraih juara kedua, siswa SMA Negeri 2 Sampit menyambut dengan rasa syukur. Pasalnya, baru pertama kali mereka bertanding di Jakarta dan langsung menyabet gelar juara kedua tingkat nasional. "Prestasi tertinggi kami hanya juara dua tingkat provinsi, itu terjadi pada 2009 dan 2011. Karena itu, kami sangat mensyukuri keberhasilan ini," kata Resti Sitorus, guru mata pelajaran PKN dan pendamping siswa SMA Negeri 2 Sampit.

Begitu juga dengan SMA Negeri 1 Brebes Provinsi Jawa Tengah yang meraih jura ketiga LCC Empat Pilar MPT tingkat nasional. Ketua Tim SMA Negeri 1 Brebes, M. Raihan Diki Ramadhan, mengungkapkan, apa yang berhasil dicapai saat ini patut disyukuri, sebab semua adalah hasil dari upaya dan kerja keras yang maksimal. "Persiapan yang kami lakukan untuk tampil berlomba sangat baik. Kami belajar dan berlatih dengan giat, baik dengan tim ataupun secara individu, memprediksi potensi-potensi kesalahan dan menggunakan strategi-strategi yang kami rasa efektif," ungkapnya. ❑

Penutupan LCC Empat Pilar 2019

SETELAH berlangsung sejak 28 Oktober 2019, putaran final dan grand final LCC Empat Pilar MPR Tingkat SLTA ditutup secara resmi pada Senin malam, 4 November 2019. Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma'ruf Cahyono menutup secara resmi ajang lomba para siswa SLTA ini di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Ma'ruf Cahyono mengatakan LCC Empat Pilar MPR ini tidak hanya sekadar untuk mencari pemenang, tapi juga menjadi ajang interaksi para siswa. "Lewat lomba ini diharapkan muncul persahabatan dan ikatan emosional di antara mereka. Tentunya ini dalam rangka merajut persatuan dan kesatuan bangsa," ujarnya.

Sejak 28 Oktober 2019, para peserta LCC Empat Pilar MPR tidak hanya berlomba, tapi juga mengikuti audiensi dengan berbagai tokoh, termasuk tokoh bisnis *e-commerce*. Para peserta bisa menarik inspirasi dan pengalaman dari tokoh-tokoh itu. Tak hanya itu, MPR juga mengundang Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk memberikan pemahaman kepada generasi muda tentang bahaya narkoba. LCC Empat Pilar MPR ini pun menampilkan pentas seni yang mengangkat kearifan lokal daerah masing-masing.

"Jadi selama mengikuti putaran final di Jakarta, mereka tidak hanya bersenang-senang bertemu banyak teman, tetapi juga mendapatkan pengetahuan terkait ideologi, konstitusi, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," ucapnya. ❑

Tim Majelis

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-58_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:43

Juara Harapan III
Juara Harapan II
Juara Harapan I

Juara Harapan III
Juara Harapan II
Juara Harapan I
JUARA III
JUARA II
JUARA I

Audiensi dengan Pimpinan MPR

Antusiasme Finalis LCC Empat Pilar Bertemu Pimpinan MPR

Penghormatan khusus dari Pimpinan MPR RI menyambangi dan bertemu muka langsung dengan para peserta LCC MPR 2019.

PARA finalis Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR tingkat nasional tahun 2019, Selasa (29/10/2019) berkesempatan bertatap muka langsung dengan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) dan para Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW), Syarief Hasan dan Arsul Sani, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta.

Antusiasme seluruh finalis yang dari 34 provinsi di Indonesia ini terlihat saat para Pimpinan MPR yang didampingi Sekretaris Jenderal MPR Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., memasuki ruangan. Yel-yel khas LCC dan yel-yel khas masing-masing tim menggema menyambut Pimpinan MPR dari pintu masuk ruangan hingga duduk di podium utama.

Kepada para peserta, Bamsoet menyampaikan apresiasinya dan kebanggaannya kepada seluruh generasi muda bangsa yang menjadi peserta finalis secara nasional. Menurut Bamsoet, sudah pasti para peserta merupakan anak-anak yang terpilih karena kemampuan serta kualitas dirinya.

"Saya tentu merasa bangga, kalian adalah generasi muda pilihan penerus kepemimpinan bangsa di masa depan. Di pundak kalianlah masa depan bangsa ini berada. Kalianlah, generasi muda yang nanti akan bertanggung jawab atas kehidupan dan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Kalianlah nanti yang akan bertanggung jawab menjaga ribuan pulau di Indonesia, jangan sampai direbut bangsa lain. Kalian sanggup," tegasnya.

Pernyataan tegas Bamsoet tersebut langsung direspon oleh seluruh peserta dengan pekikan 'Sanggup, sanggup!!' seraya bertepuk tangan dengan riuh. Bamsoet melanjutkan bahwa untuk mencapai itu semua maka para peserta tidak boleh hanya berpangku tangan, tapi harus melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat hingga mencapai prestasi puncak.

"Mulailah dari kegiatan LCC ini, kalian sudah mencapai babak final, kerahkan segenap kemampuan kalian untuk mencapai hasil maksimal dan meraih prestasi puncak, yakni Juara Nasional. Hal tersebut bukan hanya akan membanggakan orang tua, guru, sekolah, dan teman kalian, tapi juga akan menjadi kebanggaan bangsa," ucapnya.

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-60_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:44

Ketua MPR Bamsoet

"Waspadai Ancaman Terhadap Karakter Bangsa"

ADA satu hal yang secara tegas ditekankan Ketua MPR RI tentang hal yang harus diwaspadai oleh generasi muda, yakni saat ini, bangsa Indonesia tengah merasakan ancaman yang luar biasa terhadap karakter serta jati diri bangsa. Bahkan, 'sosok' ancaman tersebut sangatlah dekat dan sangat akrab dalam keseharian rakyat Indonesia, terutama generasi muda yakni kemajuan teknologi seperti smart phone, teknologi informasi, digital, dan media sosial.

Bamsoet mengindikasikan, jika generasi muda sampai masuk dalam pusaran pengaruh buruk kemajuan teknologi tersebut maka semuanya akan menjadi robot-robot yang sangat bergantung kepada teknologi, tidak bisa hidup tanpanya, dan pemakainya tidak punya lagi cinta, cipta, rasa, dan juga karsa.

Kemajuan teknologi, apalagi media sosial, jika tidak disikapi dengan bijak akan menggerus akal sehat. Kabar dan berita hoax akan semakin mudah untuk menyebar ke seluruh penjuru sampai ke pelosok-pelosok desa, yang pada akhirnya jika diterima secara mentah akan berpotensi menjadi konflik.

Sebaliknya, jika bangsa ini mampu menggunakan kemajuan teknologi secara bijak maka kemajuan teknologi tersebut akan menimbulkan dampak positif dan sangat bermanfaat. Seperti, media sosial via smart phone bisa digunakan untuk berdagang atau berbisnis. Selain itu, media sosial juga mempermudah segala kegiatan, mulai dari interaksi antarsesama, membuka serta

memperluas jaringan pertemanan dan sebagainya.

"Memang pada intinya, kemajuan teknologi bagai pisau tajam bermata dua. Satu sisi membawa kebaikan dan sisi lainnya membawa keburukan. Di sinilah kewaspadaan menjadi sangat penting. Pandai memilah hanya mengambil sisi kebaikan dari kemajuan teknologi menjadi hal yang mesti dilakukan. Pemahaman karakter dan jati diri bangsa yang baik akan semakin mempermudah kita mampu memilah hanya yang baik-baik saja," katanya.

Untuk itulah, lanjut Bamsoet, berbagai upaya pemahaman karakter bangsa yang baik, harus diapresiasi, didukung. Sebab, jika karakter dan jati diri bangsa sudah terbentuk maka akan menjadi benteng yang kuat untuk menangkal berbagai ancaman pengikisan karakter dan jati diri itu sendiri. ❑

DER

Dalam kesempatan tersebut, kepada para peserta putaran final LCC 2019, Bamsoet mengajak untuk merenungi Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada 28 Oktober. Pada waktu itu, 91 tahun yang lalu, para pemuda dan pemudi bangsa Indonesia dari berbagai latar belakang pemikiran, budaya, suku, dan agama bersatu untuk mengikrarkan persatuan pemuda-pemudi bangsa dalam ikatan satu tanah air, satu bangsa, satu bahasa Indonesia.

Kini setelah kemerdekaan, kesadaran bangsa Indonesia untuk terus berjuang merawat persatuan dan kesatuan menjadi sangat penting. "Kesadaran tersebut juga harus ada dalam diri generasi muda Indonesia secara keseluruhan. Salah satunya dalam bentuk gigih melawan kebodohan dan berani melawan segala bentuk ketertinggalan, sehingga Indonesia bisa maju sejajar dengan negara-negara lain tanpa harus meninggalkan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia," ujarnya.

Sesi yang paling meriah dan ditunggu para peserta adalah sesi tanya jawab kepada Pimpinan MPR. Begitu MC mempersilahkan para peserta mengajukan pertanyaan, hampir seluruh peserta mengacungkan tangan. Berbagai pertanyaanpun mengalir dari para peserta. Diantaranya, peserta dari SMA Negeri 28 Jakarta, Renaldo Arya Raffly Mahera, yang bertanya seputar amandemen UUD serta munculnya kembali wacana GBHN. Lalu peserta dari SMA Negeri 1 Gorontalo, Sri Nurwanda, bertanya seputar tatacara pembuatan dan revisi UU. Kemudian peserta dari SMA Negeri 10 Bulukumba, Haikal Akbar, bertanya seputar Dewan Pertimbangan Agung. Pimpinan MPR pun secara lugas menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Syarief Hasan, dan Arsul Sani sepakat bahwa pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan para peserta sangat berkualitas. "Luar biasa, pertanyaan-pertanyaan para peserta sangat berbobot dan bukan pertanyaan kelas anak-anak lagi. Ini sudah termasuk pertanyaan para pakar dan negarawan yang memiliki *concern* sangat tinggi terhadap konstitusi, MPR, dan Indonesia," ungkap HNW.

Wakil Ketua MPR Arsul Sani malah memuji tingkat kecerdasan pertanyaan para peserta. "Saya rasa 10 atau 15 tahun lagi, gedung parlemen ini akan diisi oleh generasi muda berbobot seperti para peserta finalis ini. Pertahankan kualitas diri kalian dan harus semakin dipertajam dari hari-kehari demi masa depan generasi muda dan masa depan Indonesia," tandasnya. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-61_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:45

Babak... Final

Tiga Sekolah Lolos Grand Final LCC MPR 2019

TIGA sekolah lolos maju ke Grand Final Nasional LCC Empat Pilar MPR 2019, yang digelar pada Ahad (3/11/2019), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, setelah berhasil menyisihkan rival-rivalnya dalam babak final yang digelar Sabtu (2/11/2019).

Tiga sekolah tersebut adalah SMA Negeri 1 Brebes, Provinsi Jawa Tengah, SMA Negeri 2 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dan SMA Negeri 1 Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Tim yang berhasil maju ke babak Grand Finalis tersebut adalah tim yang berhasil melewati babak demi babak pertandingan, mulai dari mulai penyisihan hingga final. Untuk mencapai babak final, semua tim berjuang sangat keras mengingat sekolah-sekolah yang menjadi lawan mereka adalah juara-juara provinsi yang juga sangat hebat.

Seperti yang diperlihatkan tim SMA Negeri 1 Tenggarong yang berhasil meraih Juara 1 dengan skor 205 pada final putaran ke-3, dengan menyisihkan dua rivalnya, yakni SMA Negeri 1 Soe Provinsi NTT dan SMA Negeri 4 Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Dari awal perlombaan hingga akhir, terjadi kejar-mengejar angka yang sangat ketat, terutama di sesi satu lawan satu. Suasana bertambah riuh ketika pendukung masing-masing kontestan saling berteriak memberi dukungan. Yang luar biasa adalah, walaupun para finalis saling berkompetisi dengan ketat, namun ketika SMA Negeri 1 Tenggarong berhasil keluar sebagai juara, dua finalis lainnya ikut senang, mendukung, dan mengapresiasi.

Di sisi lain, ternyata aksi para finalis, terutama dari sisi penguasaan materi membuat kagum anggota MPR RI Fraksi PKS, Al Muzzamil Yusuf, yang juga salah seorang anggota dewan juri. “Luar biasa, saya mengagumi penguasaan dan kemampuan anak-

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-62_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:46

anak ini dalam menghafal UUD, TAP MPR sampai detil bahkan sampai ke Undang-Undang. Saya berharap, apa yang mereka hafal itu akan bermanfaat untuk masa depan mereka, apalagi jika mereka nanti menjadi anggota DPR, anggota DPRD atau anggota DPD," katanya.

Lebih lanjut Muzzammil mengatakan, para peserta LCC tersebut memiliki banyak potensi, yang kalau dikembangkan dengan serius akan bermanfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. "Saya rasa, mereka bisa jadi mitra kita ya anggota MPR, dengan kemampuan luar biasa mereka membantu kita di daerah menjelaskan UUD, UU, TAP MPR kepada rakyat di daerahnya masing-masing, ketika kita melakukan kunjungan kerja atau Sosialisasi Empat Pilar. Intinya, menghadirkan mereka yang pintar-pintar ini adalah bentuk penghargaan kita juga kepada mereka yang merupakan generasi muda bangsa yang harus kita jaga," ujarnya.

Putri Kamarilla, salah seorang anggota tim dari SMA Negeri 1 Tenggarong menyatakan apresiasinya kepada MPR dengan program LCC Empat Pilar. "Ajang lomba ini sangat berdampak baik buat kami, sekaligus juga tantangan berat buat tim kami pasca menjadi Juara 1 Final putaran ke-3. Kami sangat bersyukur dan kami akan mempersiapkan diri lebih baik menghadapi Grand Final nanti, dan mudah-mudahan pasca kegiatan ini kami semua akan mampu mengimplementasikan apa yang kami dapat ini dalam kehidupan sehari-hari," katanya, usai melakukan 'selebrasi' menyambut kemenangan bersama tim. ❑

DER

Grand...FINAL

SMA Negeri 1 Brebes Raih Juara III LCC Empat Pilar MPR 2019

Dengan perjuangan berat, SMA Negeri 1 Brebes mesti puas berada di Juara III Nasional LCC Empat Pilar MPR 2019.

SMA Negeri 1 Brebes, Provinsi Jawa Tengah, raih juara III Nasional LCC Empat Pilar MPR Tahun 2019, dalam Grand Final yang dilaksanakan Ahad (3/11/2019), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dalam gelar grand final, SMA Negeri 1 Brebes berhadapan dengan SMA Negeri 2 Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah, dan SMA Negeri 1 Tenggarong, Provinsi Kalimantan Timur. Aura tegang perebutan posisi terhormat juara nasional sangat terasa sejak awal lomba dimulai.

Memasuki sesi lomba, ketegangan makin memuncak. Apalagi beberapa kali di sesi Satu Lawan Satu, SMA Negeri 1 Brebes salah dalam menjawab soal sehingga pengurangan nilai terjadi. Menyadari telah tertinggal angka, seluruh tim berusaha keras menyamakan posisi.

Namun, di akhir perlombaan, SMA Negeri 1 Brebes mesti rela melepas gelar juara nasional, yang akhirnya diraih oleh tim SMA Negeri 1 Tenggarong, sedangkan posisi kedua diraih SMA Negeri 2 Sampit. Walaupun gagal meraih juara pertama, dalam segmen Kreatifitas, SMA Negeri 1 Brebes dinobatkan menjadi tim terbaik dengan skor 84,90.

Ketua Tim SMA Negeri 1 Brebes, M. Raihan Diki Ramadhan, mengungkapkan perasaannya atas hasil yang dicapai timnya. Menurut M. Raihan, apa yang berhasil dicapai saat ini patut di syukuri, sebab semua adalah hasil dari upaya dan kerja keras yang maksimal. "Persiapan yang kami lakukan untuk tampil berlomba sangat baik. Kami belajar dan berlatih dengan giat, baik dengan tim ataupun secara individu, memprediksi potensi-potensi kesalahan dan menggunakan strategi-strategi yang kami rasa efektif," ungkapnya

Persoalan belum bisa mencapai Juara 1 Nasional, tambah Raihan, itu adalah evaluasi bagi tim dan sekolah agar lebih bersemangat lagi belajar dan berupaya agar bisa meraihnya di kesempatan yang akan datang.

Terkait penyelenggaraan LCC Empat Pilar, Raihan sangat mengapresiasi MPR karena menyediakan wadah kepada generasi muda bangsa dari seluruh wilayah Indonesia untuk lebih memahami Empat Pilar MPR, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Guru pendamping SMA Negeri 1 Brebes, M. Anas Rifai, juga mengungkapkan bahwa persiapan-persiapan, teknik, strategi yang dilakukan semua sudah maksimal. Bahkan, makin serius lagi ketika tim berhasil mewakili provinsi ke ajang nasional. Semua materi yang diberikan MPR dipelajari secara intens. Bahkan latihan dilakukan secara periodik, seminggu sekali.

"Dari mulai tahap seleksi di provinsi, kemudian masuk nasional, lalu berlaga di grand final dan meraih Juara III Nasional adalah tak disangka-sangka oleh kami, sebab setelah lima tahun ikut LCC di provinsi, baru tahun ini sekolah kami maju ke tingkat nasional di Jakarta dan berhasil menempati Juara III Nasional," ungkapnya.

Kekecewaan, tambahnya, karena tidak meraih Juara 1 Nasional tentu ada. Namun, apapun capaian tim, itu adalah hasil kerja keras maksimal yang mampu dipersembahkan oleh tim dan itu harus disyukuri.

Berkesan Buat Peserta Daerah

Ada cerita menarik seputar pelaksanaan LCC Empat Pilar MPR 2019 tingkat nasional yang digelar MPR RI di Jakarta, sejak 28 Oktober 2019 dan puncaknya saat grand final pada hari ini, Ahad (3/11/2019). Selain dihadiri ratusan siswa dan siswi pilihan perwakilan sekolah di seluruh provinsi di Indonesia, juga dihadiri guru-guru pendamping.

Siti Sumiwati Rannu, yang akrab disapa Sumiwati, guru PPKN SMA Negeri 1 Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara, adalah salah satu guru pendamping yang sangat terkesan dengan penyelenggaraan LCC Empat Pilar MPR. Banyak hal yang membuat ia terkesan, antara lain, bisa memasuki gedung Parlemen yang sangat terkenal, metode penyelenggaran yang bagus seperti tata

panggung, pencahayaan, dan lainnya.

Namun, kesan terdalam, menurut ibu empat anak ini, paling dirasakan para siswa dan siswi karena semuanya belum pernah menginjakkan kakinya di Jakarta. "Jakarta hanya mereka lihat di televisi dan di buku-buku. Begitu terpilih mewakili provinsi ke Jakarta, mereka sangat antusias. Antusias makin tinggi saat menuju ke Jakarta dengan menggunakan pesawat terbang, lalu saat menginjakkan kaki di Jakarta bisa melihat gedung-gedung tinggi, merasakan tempat-tempat wisata, dan permainan, serta berkenalan dengan teman-teman baru berbeda daerah. Intinya, mereka sangat riang, dan tak terbayangkan betapa senangnya mereka," ungkapnya, usai acara grand final.

Selain terkesan, Sumiwati juga mengungkapkan bahwa kehadiran

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-65_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:47

sekolah tempatnya mengajar mewakili provinsi di ajang nasional adalah berkah tersendiri buat dirinya beserta para siswa dan siswi.

"Berkah buat kami, yakni kembali mengikuti LCC tingkat nasional di tahun 2019, setelah sebelumnya, pada 2015 pernah ikut juga tapi belum sampai final. Nah, pada 2019 inilah kami berjuang lebih keras. Berkah lainnya, yaitu ketika kami di Jakarta, banyak sekali hal-hal baru yang kami dapati yang tidak kami temui di daerah, seperti seputar metode pendidikan, pengetahuan dan lain-lain," katanya,

Ada satu momen emosional yang dibeberkan Sumiwati, yakni saat mendapat kabar bahwa ibunya telah meninggal dunia tepat sehari dia berada di Jakarta. "Saya sedih sekali, tapi melihat antusias dan gembiranya para siswa mendapat kehormatan sampai ke Jakarta berlaga di kompetisi bergengsi, serta bersemangat merebut posisi terhormat Juara 1 Nasional, membuat saya sangat terharu dan tetap berada di Jakarta menemani mereka, selain memang sudah tugas saya dampingi mereka, setelah saya jelaskan dengan keluarga di sana," ucapnya.

Para siswa, lanjut Sumiwati, adalah anak-anak yang baik. Walaupun banyak yang berasal dari wilayah terpencil dengan segala keterbatasannya, namun kemampuan dan kepintaran mereka luar biasa, dan momen ini kesempatan baik buat mereka yang mampu membuat harum nama sekolah, karena mewakili provinsi di ajang nasional.

Walaupun, pada akhirnya tim SMA Negeri 1 Baubau berhenti di babak penyisihan, dan belum berhasil meraih juara, Sumiwati menegaskan bahwa hal tersebut tidak menjadi persoalan, sebab semua kemampuan sudah dikerahkan.

"Saya tekankan ke anak-anak juga, yang penting adalah pengalaman, sebab pengalaman tidak bisa dibeli tapi sebuah kesempatan. Banyak pengalaman luar biasa yang mereka peroleh, antara lain menginjakkan kaki di Jakarta, terutama di gedung Parlemen, lalu beradu kemampuan dengan anak-anak pintar pilihan dari semua provinsi di Indonesia. Dengan pengalaman itu, kualitas mental dan intelektualitas mereka akan semakin berkembang," terangnya. ❑

DER

Juara Cerdas Cermat MPR RI 2019

1

SMAN 1 Tenggarong
Kalimantan Timur

2

SMAN 2 Sampit
Kalimantan Tengah

3

SMAN 1 Brebes
Jawa Tengah

Acara Pembukaan LCC 2019

Dimeriahkan Seni Budaya dan Kreatif

Pagelaran seni budaya sengaja dipilih dan dipentaskan dalam Pembukaan LCC MPR 2019. Tujuannya, agar generasi muda tidak melupakan budaya daerahnya.

ACARA seremoni Pembukaan Putaran Final Nasional Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR 2019 pada Senin (28/10/2019), di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, makin semarak serta meriah oleh sesi pagelaran seni budaya dan seni kreatif yang dibawakan oleh para pelajar dari beberapa Sekolah Menengah Atas di Jakarta.

Pagelaran seni tersebut, antara lain persembahan Tari Lenggang Nyai, salah satu tarian khas Betawi, yang diambil dari cerita rakyat 'Nyai Dasimah'. Banyak pesan dan makna yang disampaikan melalui tarian ini, terutama pesan mengenai kebebasan wanita. Tari ini pun sering kali ditampilkan dalam berbagai acara di Jakarta.

Pada penampilan seni kreatif, siswa-siswi tersebut menampilkan berbagai atraksi modern, tapi tidak meninggalkan unsur kearifan lokal, antara lain persembahan lagu 'Pancasila Rumah Kita' dengan diiringi band/musik modern, persembahan operet tentang kebangsaan, serta fashion show busana-busana dari seluruh provinsi di Indonesia.

Hizkia Steven, siswa SMA Negeri 14 Jakarta, salah seorang siswa penampil fashion show busana daerah Indonesia mengungkapkan kegembirannya mengikuti ajang seni kreatif tersebut. "Saya gembira terpilih untuk mengikuti acara ini dan mengenakan busana daerah. Kebetulan saya mengenakan busana daerah Jawa Timur, daerah asal orang tua saya. Saya rasa, ini juga akan meyenangkan orang tua saya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, walaupun hanya menjadi performer bukan sebagai peserta, dia sangat mengapresiasi acara LCC Empat Pilar MPR. "Lomba tentang Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Kebhinnekaan sangatlah baik. Saya rasa lomba tersebut akan semakin membangkitkan rasa nasionalisme semua generasi muda," tegasnya.

Berharap Jadi Juara LCC Empat Pilar MPR

Salah seorang anggota tim peserta LCC 2019, Shanice Erupley yang adalah siswi kelas II SMK Kehutanan Negeri Manokwari Papua Barat sangat antusias menyaksikan pagelaran seni budaya pada acara pembukaan LCC tersebut. Menuru Shanice, budaya sangat penting agar generasi muda tidak lupa akan kebudayaan daerahnya.

Terkait keikutsertaan dirinya dan tim menjadi peserta putaran final LCC MPR 2019, Sanice mengaku sangat bangga dan hampir tidak percaya bisa berlaga di ajang nasional. Dia mengungkapkan, sekolahnya setiap tahun mengikuti seleksi provinsi dan tidak pernah lolos.

"Tahun ini adalah tahun luar biasa buat sekolah kami, yang akhirnya bisa lolos masuk final, sehingga berkesempatan meraih Juara 1 Nasional LCC Empat Pilar MPR 2019," katanya, usai acara Pembukaan.

Menurut Shanice, keberhasilan tim sekolahnya lolos seleksi tingkat provinsi dan ke putaran final LCC tingkat nasional adalah akibat kesabaran para guru yang terus mendampingi tim, serta memberi dorongan tanpa kenal lelah. Sehingga, pada akhirnya berhasil lolos seleksi provinsi dan masuk final nasional di Jakarta.

"Saya bersama teman-teman sangat berterima kasih atas dukungan guru-guru kami, pendamping kami, orang tua kami, dan juga teman-teman kami seluruhnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada MPR RI yang telah memberikan kesempatan pada kami di daerah untuk menunjukkan kemampuan di ajang nasional," ujarnya.

Hal serupa juga disampaikan Fidela Elizabeth Arden Doom, siswi SMA Negeri 5 Jayapura, Papua. Fidela juga mengungkapkan, sekolahnya baru tahun ini berhasil menjadi finalis nasional LCC Empat Pilar MPR 2019 di Jakarta. "Masuk menjadi finalis merupakan hal yang berat. Tapi, akan kami buktikan dengan kerja keras, kami akan meraih hasil yang sebaik-baiknya, target kami menyabet juara nasional untuk kami bawa ke Papua," ucapnya.

Menurut siswi yang ramah ini, apapun hasilnya, baik menang ataupun kalah, tidaklah menjadi persoalan, yang penting tim sudah mengeluarkan kemampuan terbaiknya. "Kami memang sangat berharap menang. Karena itu, menjadi harapan kami juga teman-teman di sekolah, tapi teman-teman tim dari daerah lain tentu juga sangat hebat-hebat, kami rasa siapapun yang juara, kita semua harus mendukung dan memberi penghormatan," tandasnya. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-67_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:48

Audiensi STIA LAN Bandung ke MPR RI

SERATUS lebih mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) Bandung, Jawa Barat, dengan didampingi tiga dosen, menyambangi gedung MPR RI untuk melakukan audiensi. Kedatangan rombongan, diterima anggota MPR Fraksi Golkar Nurul Arifin dan anggota MPR Fraksi Gerindra Sodik Mudjahid serta Plt. Kepala Bagian Pemberitaan, Hubungan Antarlembaga dan Layanan Informasi Biro Humas Setjen MPR RI Budi Muliawan, di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11/2019).

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa mendapatkan berbagai penjelasan seputar gedung MPR dan fungsi-fungsi serta kewenangan MPR dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Para mahasiswa juga sekaligus menjadi peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR, yang disampaikan oleh Nurul Arifin dan Sodik Mudjahid.

Saat memberikan penjelasan soal Empat Pilar, Sodik mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia terutama para generasi muda bangsa harus bangga memiliki Pancasila sebagai ideologi dasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Mengapa kita sebagai bangsa Indonesia mesti bangga, sebab Pancasila mampu menjadi perekat yang kuat seluruh bangsa Indonesia yang sangat beragam. Pancasila mampu membawa seluruh bangsa Indonesia berbicara dan berbuat dengan tujuan persatuan dan kesatuan bersama dalam wadah NKRI," katanya.

Pancasila, lanjut Sodik, menjadi begitu istimewa dan khas karena bangsa-bangsa di dunia hanya mengenal dua aliran ideologi yang satu sama lain saling bertolak belakang. Yakni, negara-negara yang berpaham 'kanan' yang mengambil agama sebagai landasan ideologi dan hukum seperti Arab Saudi dan Vatikan. Lalu ada negara berpaham 'kiri' atau sekuler yang tidak membawa nilai-nilai agama sama sekali dalam ideologinya dan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

"Sedangkan Indonesia memiliki Pancasila. Dengan Pancasila, Indonesia ada di tengah-tengah, tidak kanan dan tidak pula kiri. Inilah yang membuat Pancasila begitu sangat unik dan khas. Di dalam Pancasila terdapat berbagai nilai seperti nilai-nilai agama. Bukan hanya satu agama tapi lebih dari satu agama dan banyak kepercayaan serta adat istiadat. Lalu ada nilai kemanusiaan, budaya yang semuanya sangat lengkap dan saling melengkapi," terangnya.

Pernyataan serupa juga disampaikan narasumber lainnya yakni anggota Fraksi Partai Golkar MPR Nurul Arifin. Pancasila adalah kebanggaan seluruh bangsa Indonesia dimanapun berada, sebab memang pancasila tak diragukan lagi sebagai elemen pemersatu seluruh bangsa Indonesia.

Ditambahkan Nurul, begitu mulia kiprah dan peran Pancasila bagi persatuan rakyat Indonesia, tapi di sisi lain masih saja sering terdengar banyak pernyataan-pernyataan yang meragukan Pancasila, antara lain kenapa harus Pancasila yang menjadi *the way of life* bangsa Indonesia dan kenapa Pancasila yang mesti dibanggakan.

Padahal, negara-negara luar banyak yang mengapresiasi, kagum bahkan iri dengan Pancasila. Banyak sekali warga Indonesia yang hidup di negara luar bangkit rasa bangganya dan nasionalismenya, karena kekaguman bangsa-bangsa lain terhadap Pancasila.

"Sewaktu saya mengikuti pelatihan di United States Capitol, Washington DC, Amerika Serikat bersama dengan perwakilan negara-negara lain, di sana saya banyak mengetahui dari diskusi dengan mereka bahwa mereka iri dengan ideologi Pancasilanya Indonesia, lebih tepatnya hormat," ujarnya.

Hormat, apresiasi dan kekaguman negara-negara lain, lanjut Nurul, adalah karena melihat Indonesia adalah sebuah negara yang sangat beragam, perbedaannya luar biasa mulai dari agama, kepercayaan, ras, suku, budaya, adat istiadat, bisa bersatu dan mampu melaksanakan demokrasi dengan sangat baik.

"Dari kekaguman tersebut, mereka ingin belajar dari Indonesia bagaimana Pancasila mampu melakukan itu semua. Mereka ingin memiliki persis seperti Pancasila yang mampu menyatukan warga negaranya," ungkapnya. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-68_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:49

Kunjungan Mahasiswa Unwiku

Belajar Sistem Tata Negara di MPR

FOTO-FOTO: HUMAS MPR RI

SERATUS delapan puluh delapan mahasiswa disertai empat dosen pendamping dari Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma (FH Unwiku) Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu (20/11/2019) berkunjung ke MPR. Kedatangan mereka di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, bertujuan untuk memperdalam ilmu yang mereka tekuni, terutama mengenai masalah hukum tata negara. Kehadiran mereka diterima langsung oleh Sesjen MPR Dr. H. Ma'ruf Cahyono, SH., MH., didampingi Kabiro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, dan Plt. Kabag Pemberitaan, Hubungan Antar Lembaga, dan Layanan Informasi, Budi Muliawan.

Rombongan mahasiswa FH Unwiku ini diterima di Ruang GBHN, Lantai 2, Gedung Nusantara V. Dalam kata pengantarnya, Pembantu III Dekan FH Unwiku, Iskatrinah, menyampaikan rasa bangganya karena kedatangan para mahasiswa beserta para dosen pendamping di MPR ini diterima langsung oleh Sesjen MPR Ma'ruf Cahyono. "Ini sebuah kebanggaan tersendiri," ungkap Iskatrinah.

Selanjunya, Iskatrinah menjelaskan, kedatangan rombongan mahasiswa FH Unwiku yang menggunakan 4 bus, ke lembaga negara yang memiliki fungsi tertinggi ini adalah untuk menambah dan membuka wawasan mahasiswa berkaitan dengan ilmu yang mereka tekuni, terutama terkait dengan isu-isu yang di MPR. "Mudah-mudahan kunjungan kami bisa memberi manfaat yang sebesar-besarnya," ujar perempuan berkaca mata itu.

Ma'ruf Cahyono bersama Siti Fauziah dan Budi Muliawan menyambut antusias dan mengucapkan selamat datang kepada tamunya dari Purwokerto, Jawa Tengah, ini. "Kehadiran pada mahasiswa FH Unwiku ke MPR ini, selain bisa melihat secara langsung bentuk fisik Gedung MPR, juga tentunya belajar mengenai sistem tata negara", ujarnya. Karena, "MPR merupakan salah satu simbol dari sistem ketatanegaraan kita", tambah Ma'ruf Cahyono.

Dengan datang ke kompleks Parlemen, lanjut Ma'ruf Cahyono, berarti para mahasiswa Unwiku telah belajar secara keseluruhan, baik sejarah mengenai Gedung MPR/DPR/DPD Senayan yang pada 1998 menjadi saksi sejarah aksi demontrasi untuk menuntut reformasi, dan di sini juga para mahasiswa bisa bertemu dengan para legislator.

Pria asal Banyumas itu berharap, apa yang dipelajari di bangku kuliah bisa dipadukan dengan praktik di lapangan yang telah dilakukan selama di Jakarta, sehingga menemukan esensi dari konsep dan teori yang mereka pelajari. "Semua yang dipelajari ada di sini", paparnya.

Pada kesempatan itu, Ma'ruf Cahyono juga menguraikan mengenai wewenang dan tugas MPR. Anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. "Jumlah anggota MPR sebanyak 711 orang, mereka berasal dari anggota DPR sebanyak 575 orang, dan anggoa DPD 136 orang," jelas Ma'ruf seraya menambahkan, anggota DPR merupakan representasi partai politik, sedang anggota DPD representasi perwakilan daerah. Terkait terbentuknya DPD, Ma'ruf meminta agar para mahasiswa membaca risalah tentang terbentuknya sebuah lembaga negara.

Lebih lanjut, Ma'ruf menjelaskan bahwa kedudukan MPR sebelum dan setelah amandemen UUD Tahun 1945 tidak sama. Sebelum amandemen, struktur tata negara bersifat hirarkis, semua bertumpu pada pertanggung jawaban. Setelah amandemen UUD, struktur tata negara tidak lagi hirarkis, namun horizontal fungsional. "Untuk membedakan lembaga-lembaga negara sekarang dapat dilihat dari fungsinya. Dan, fungsi lembaga-lembaga negara ada dalam UUD," ucap Ma'ruf Cahyono.

Kemudian, Ma'ruf Cahyono menjelaskan mengenai wewenang dan tugas-tugas MPR. MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD, melantik Presiden, dan memakzulkan Presiden. Dulu, sebelum amandemen, menurut Ma'ruf, MPR juga menetapkan haluan negara atau GBHN. Terkait haluan negara, menurut Ma'ruf, sekarang ada keinginan untuk menghidupkan kembali pokok haluan negara itu. Bagi MPR, hal demikian sangat mungkin sebab ada ruang untuk mengamandemen konstitusi. "Hanya saja yang tak boleh diubah adalah Pembukaan UUD dan bentuk negara, NKRI," paparnya.

Selain itu, kata Ma'ruf, tugas MPR adalah memasyarakatkan atau menyosialisasikan Empat Pilar MPR, yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan Ketetapan MPR. Juga melakukan pengkajian terhadap sistem ketatanegaraan, dan melaksanakan pengelolaan aspirasi masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas-tugas itu, MPR mempunyai alat kelengkapan, yakni: Badan Sosialisasi, Badan Penganggaran, Badan Pengkajian, serta didukung Komisi Kajian Ketatanegaraan. "Saat ini MPR dipimpin oleh 10 pimpinan, mereka merepresentasikan semua kekuatan politik dan daerah", ucapnya.

Dengan kewenangan yang ada, kata Ma'ruf Cahyono, MPR merupakan lembaga negara yang mempunyai kewenangan tertinggi dan didukung oleh SDM dan para pakar di bidangnya. ❑

AWG

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-69_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:49

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ahmad Doli Kurnia, Ketua Komisi II DPR

Banyak Opsi Untuk Evaluasi Pilkada Langsung

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, melontarkan wacana perlunya evaluasi terhadap pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung. Mendagri menilai, Pilkada langsung selama ini justru menimbulkan banyak dampak negatif. Tito mencontohkan dampak negatif Pilkada langsung mulai dari biaya politik yang tinggi hingga banyaknya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah hasil Pilkada langsung. Karena itu, Mendagri berencana melakukan evaluasi terhadap Pilkada secara langsung.

Bagaimana tanggapan Komisi II terhadap wacana evaluasi Pilkada secara langsung? Berikut ini wawancara dengan Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia usai diskusi di Media Center yang membahas tema: "Akankah Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPRD?", pada pertengahan November 2019. Berikut petikan wawancara dengan politisi Partai Golkar itu.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mewacanakan evaluasi terhadap pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Bagaimana tanggapan Komisi II DPR?

Dalam dua kali rapat internal di Komisi II, kami sudah sepakat bahwa evaluasi Pilkada ini menjadi prioritas tahun pertama. Jadi kami berharap awal 2021 semua UU yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem politik, termasuk di dalamnya soal Pemilu, bisa kami selesaikan. Sebab, penyempurnaan itu bisa dilakukan dalam satu paket. Misalnya, kita ingin merevisi UU Pemilu maka rentetannya adalah revisi UU Partai Politik. Kalau misalnya kita ingin merevisi UU Pilkada maka rentetannya adalah revisi UU Pemerintahan Daerah, revisi UU Pemerintahan Desa, revisi UU Perimbangan Keuangan Pusat Daerah. Jadi revisi UU bisa dilakukan dalam satu paket. Ini yang mau kita selesaikan di Komisi II.

Dengan melakukan revisi-revisi itu, kita berharap, bisa menjadi awal memasuki implementasi demokrasi kita secara substansial. Jadi, kita mulai harus bergeser dari pemaknaan demokrasi secara prosedural, kita harus masuk pada hal-hal yang substansial dalam konteks demokrasi kita. Sebab, kita sudah 20 tahun di era reformasi. Kita sudah menyelenggarakan lima kali pemilu. Tapi setiap lima tahun sekali kita *trial and error* terus, melakukan eksperimen terus. Kita sudah harus cukupkan di sini. Pasti kita sudah bisa menilai mana yang cocok atau *compatible* dengan Indonesia.

Dalam kaitan itu kita harus punya konsensus. Misalnya, kalau nanti kita sepakat memilih sistem yang tepat untuk Indonesia, semestinya harus berlaku minimal 15 – 20 tahun ke depan. Jadi, tidak lima tahun sekali berubah. Ini yang akan kita bicarakan terus di Komisi II.

Mendagri menilai, Pilkada secara langsung menimbulkan banyak dampak negatif mulai dari biaya yang mahal hingga korupsi. Apakah Komisi II juga sependapat?

Ada empat riset yang saya terima. Rata-rata kesimpulannya hampir sama. Pertama, bahwa Pilkada langsung very very costly dan tidak efisien, sangat mahal. Kedua, kalau mahal tapi efeknya positif, tidak masalah. Tapi ternyata, sebagian riset mengatakan mahal tapi ternyata belum tentu menghasilkan kepala daerah yang betul-betul kompeten, kepala daerah yang betul-betul berkualitas,

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-70_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:50

dan tidak korup. Ketiga, Pilkada secara langsung selain mahal, tapi belum tentu juga menghasilkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pemerintahan yang memberi pelayanan baik, bebas dari korupsi, dan segala macam. Keempat, di dalam riset itu, Pilkada secara langsung mahal tapi membuat masyarakat kita semakin tidak rasional. Artinya, mereka memilih bukan berdasarkan kompetensi, bukan berdasarkan kemampuan si calon, tapi hal-hal lain termasuk soal politik uang. Hampir semua riset menyimpulkan hal seperti itu. Karena itu, kita di Komisi II akan mengkaji hasil riset ini.

Apakah evaluasi Pilkada secara langsung dapat diartikan sebagai mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD?

Saya kira kita di Komisi II sepakat untuk melakukan evaluasi Pilkada secara langsung. Tapi, jangan buru-buru mengambil kesimpulan untuk mengatakan Pilkada secara langsung itu diubah menjadi kembali ke DPRD. Sebab, ada beberapa opsi. Pertama, basis otonomi daerah kita ada di kabupaten dan kota. Dikaitkan dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan kebijakan di satu kabupaten atau kota itu, maka pemilihan langsung cukup di kabupaten kota. Sedangkan provinsi adalah kepanjangan dari pemerintahan pusat dan sifatnya koordinatif. Itu bisa menjadi salah satu opsi.

Kedua, ada juga yang sekarang berkembang teori asimetris. Kita lihat daerah-daerah yang melibatkan masyarakat secara masif dalam politik uang. Ada yang berasumsi terjadi di daerah-daerah yang pendidikan masyarakatnya belum terlalu tinggi, daerah pra sejahtera, dan seterusnya. Jika diasumsikan seperti itu, ada yang berpendapat di daerah-daerah perkotaan yang pendidikannya relatif lebih baik dan tingkat kesejahteraan lebih tinggi, mungkin pemilihan kepala daerah secara langsung bisa dipertahankan. Tapi untuk daerah-daerah yang belum memenuhi syarat itu, kita kembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Itu bisa menjadi opsi yang kedua.

Atau opsi ketiga, yaitu pemilihan kepala daerah secara langsung, tetapi ada aturan-aturan spesifik untuk meminimalisir empat dampak dari hasil riset tadi. Barulah opsi keempat, mungkin pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD. Jadi, saya kira harus ada kajian yang sangat mendalam dengan alasan akademiknya sehingga kita bisa menghasilkan satu keputusan yang tepat.

Bukankah kalau pemilihan kepala daerah dikembalikan ke DPRD berarti terjadi kemunduran berdemokrasi?

Yang menjadi prinsip kita adalah jangan sampai perubahan atau evaluasi yang kita lakukan terhadap Pilkada ini malah menurunkan kualitas demokrasi kita. Yang penting perubahan atau revisi UU Pilkada ini tidak mengurangi kualitas demokrasi kita. Tapi juga harus dicatat bahwa pemilihan kepala daerah oleh DPRD belum tentu tidak demokratis. Selama ini distigmatisasi bahwa pemilihan kepala daerah di DPRD pasti tidak demokratis.

Bukankah jika kepala daerah dipilih oleh DPRD maka hanya menguntungkan partai politik pemenang pemilu?

Nah, itu yang nanti kita kaji. Kita jangan prejudice dulu. Itu (menguntungkan parpol pemenang pemilu) berarti sudah mengambil kesimpulan. Jadi, belum tentu faktanya seperti itu. Ada logika yang salah kalau kepala daerah dipilih DPRD maka anggota DPRD yang mendapat uang. Dengan logika seperti itu maka kita berarti melegalkan orang mendapatkan uang (politik uang). Tadinya rakyat yang mendapat uang dalam pemilihan kepala daerah secara langsung kemudian dipindahkan ke DPRD. Padahal yang kita mau tuntaskan adalah seseorang yang ingin menjadi kepala daerah tidak perlu modal dan tidak perlu bayar mahal dan segala macam.

Bagaimana kecenderungan di Komisi II terhadap opsi-opsi tadi?

Nanti kita lihat opsi-opsi dari kajian itu apa saja, terus kemudian sebelum memilih opsi itu kita akan lihat dampak dan pengaruhnya terhadap sosial politik, terhadap pandangan publik, kemudian bagaimana terhadap penguatan demokrasi kita. Jadi, kita jangan dipaksa dan digiring mengambil kesimpulan pagi-pagi sedini ini, karena kita baru mau mulai melakukan evaluasi.

Apakah evaluasi Pilkada secara langsung ini akan diberlakukan pada Pilkada serentak tahun 2020?

Saya kira persiapan untuk Pilkada serentak tahun 2020 sudah dimulai. Pilkada 2020 sudah running dan tahapannya juga sudah berjalan. Kalau pun kita melakukan revisi UU Pilkada, misalnya ditetapkan pada masa sidang berikutnya awal tahun depan, UU itu tidak akan memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-71_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:50

Bangga Punya Darah Pahlawan *Nasional*

PADA diri Karina Ekaputri Salim, artis film, penyanyi, dan balerina, mengalir darah pahlawan. Kakek-nya, H. Agus Salim (almarhum), seorang pahlawan nasional yang namanya telah terukir dalam sejarah perjuangan Indonesia.

Artis kelahiran Jakarta, 1991, ini mengaku tahu bahwa dirinya memiliki darah pahlawan ketika duduk di bangku sekolah dasar. “Ya, baru nyadar pas di SD. Jadi, kakek aku keponakan H. Agus Salim. Begitu tahu, wah bangga banget ya. Aku berdarah pahlawan yang ada di buku-buku sejarah,” katanya, di Jakarta.

Salah satu yang dikagumi oleh artis penyandang gelar The Most Talented Female for Fun Fearless Female 2012 ini terhadap kakeknya adalah prinsip hidup tak gampang menyerah untuk apa pun yang dicita-citakan.

“Sesuai kemampuan dan profesi setidaknya aku akan menjaga nama besar beliau,” tekad peraih piala Indonesia Movie Awards 2014 ini. ❑

DER

Karina Salim

Dalang Yang Go Internasional

SIAPA yang tak kenal Cepot. Tokoh kocak yang selalu membawa keceriaan dalam pentas wayang golek, seni budaya khas Jawa Barat. Kejahilan Cepot disertai candaan-candaan dengan suara khasnya yang lucu mampu membuat penonton terpingkal-pingkal.

Tokoh Cepot memang tak lebih dari sebuah boneka kayu bergigi besar bisa menghibur karena peran dalang di baliknya. Sang dalang tersebut adalah Ogi Sabda Permana. Darah dalangnya turun dari ayahnya, Ujang Bukhari, yang juga seorang dalang wayang golek.

Dalang kelahiran Bogor, 1990, ini sering mengisi acara pagelaran Seni Budaya Nasional dalam rangka sosialisasi Empat Pilar MPR di berbagai wilayah di Jawa Barat dan sekitarnya. ❑

DER

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Ogi Sabda Permana

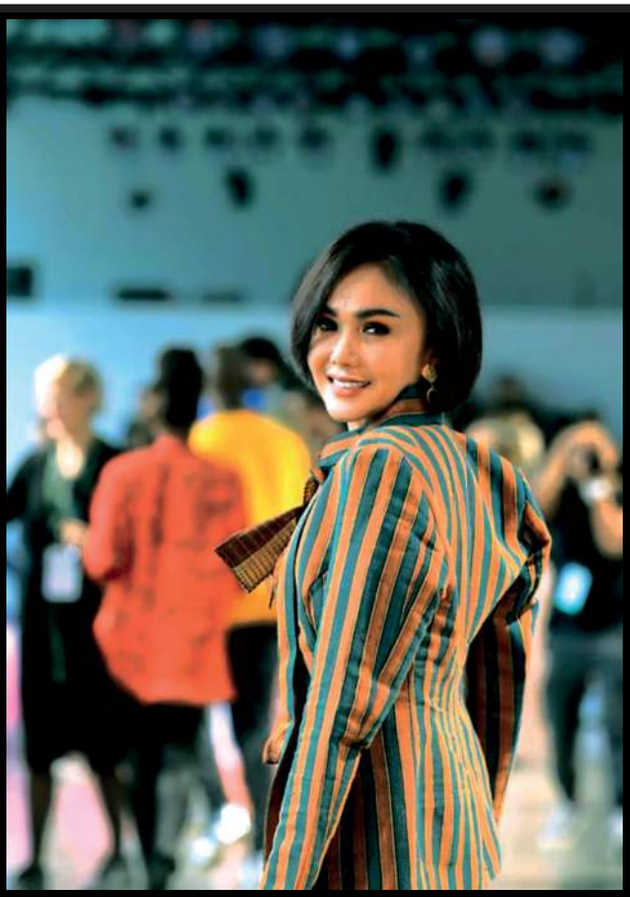

Yuni Shara

Sekolah untuk Anak-Anak tak Mampu

ARTIS melakukan kegiatan sosial, itu merupakan hal biasa. Tapi kalau ada artis mendirikan dan mengelola sekolah anak usia dini, PAUD, itu baru tak biasa. Adalah artis cantik mungil, Yuni Shara, secara diam-diam memilih kegiatan sosial yang bergerak di bidang pendidikan.

Di daerah kelahirannya, Kota Batu Malang, tanpa gembar gembor, Yuni Shara mendirikan dan mengelola PAUD yang diperuntukkan khusus bagi anak-anak tidak mampu. Kegiatan yang sudah dimulai sejak tujuh tahun lalu itu dimulai tanpa sengaja dan tanpa direncanakan.

Ceritanya, suatu ketika artis yang bernama asli Wahyu Setyaning Budi ini suatu ketika mampir ke sekolah yang dikelola mantan gurunya. Di sini Yuni melihat bangunan sekolahnya mau ambrol. “Daripada dirubuhin, ya aku bantu saja,” cerita pelantun lagu “Hilang Permataku” dan “Mengapa Tiada Maaf Darimu” ini.

Bukan hanya membantu, Yuni terjun dalam pengembangkan sekolah itu. Selain Playgroup dan Taman Kanak-Kanak, juga membuka jasa penitipan anak. Hingga kini telah memiliki anak didik lebih dari 100 orang. “Sekolahku non profit tapi gurunya berkualitas,” kata Yuni. ❑

DER

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-73_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:50

Komunitas Sabtu Baik

Berbuat untuk Anak-Anak Kurang Beruntung

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

ORANG bijak bilang, semua hari baik. Artinya, tidak ada hari yang tidak baik. Ungkapan juga berlaku bagi sekelompok anak milenial yang menamakan dirinya komunitas Sabtu Baik. Sebuah wadah bagi generasi kekinian yang peduli terhadap anak-anak, khususnya untuk anak yang kurang beruntung. Mulai dari anak-anak panti asuhan, anak putus sekolah, anak yatim piatu, hingga anak para pemulung.

Bukan karena hari lain tidak baik hingga mereka menamakan dirinya Sabtu Baik, tetapi karena mereka hanya punya luang pada hari Sabtu untuk berbuat baik. Karena mayoritas anggota komunitas ini libur pada hari Sabtu, baik libur dari rutinitas belajar maupun bekerja.

Aktivitas sosial yang dilakukan komunitas Sabtu Baik ini tak lepas dari kegiatan mengedukasi anak-anak kurang beruntung, juga memberi santunan dan bantuan, baik moril maupun material. Sedangkan temanya dipilih sesuai isu aktual yang terjadi saat kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pada Oktober lalu misalnya, karena bertepatan dengan peringatan Hari TNI, Hari Pahlawan, dan Hari Sumpah Pemuda maka komunitas Sabtu Baik mengajak serta seorang anggota TNI aktif dalam aktivitas sosial mereka. Di hadapan anak-anak panti asuhan di bilangan Pasar Minggu Jakarta Selatan, anggota TNI itu bercerita seputar seluk beluk dan suka duka kehidupannya sebagai tentara.

"Jadi, tentara itu dibutuhkan bukan hanya kalau ada perang, tapi saat damai pun mereka tetap bekerja. Seperti membantu meringankan penderitaan sesama. Karena itu dia berharap, anak-anak jadi mengenal dan mencintai profesi tentara, serta bersemangat untuk mencapai cita-citanya," kata Dessy Eka Purnama, pendiri sekaligus Ketua Komunitas Sabtu Baik.

Semua akomodasi yang digunakan untuk menggelar aktivitas sosial ini, menurut Dessy, berasal dari iuran anggota komunitas. Selain itu, pihaknya juga menjaring bantuan dari luar, khususnya dari para dermawan melalui media sosial. Juga sumbangan pihak lain yang ingin ikut berbagi kepada anak-anak kurang beruntung.

Sejak berdiri akhir 2017 hingga saat ini keberadaan Sabtu Baik makin dikenal oleh kaum milenial. Bahkan anggota komunitas ini pun terus bertambah. Apalagi, Komunitas Sabtu Baik sengaja membuka diri bagi mereka yang ingin bergabung menjadi anggota baru. Salah satu syarat untuk menjadi bagian member adalah harus mengisi form online yang telah disediakan. Dalam form tersebut terdapat pertanyaan terbuka yang berfungsi mengukur pengalaman, niat serta komitmen dari calon member. Setelah lolos dari tahap online dilanjutkan wawancara.

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-74_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:51

Nah, Apabila cocok diteruskan pengenalan member baru kepada anggota komunitas.

"Banyak alasan mengapa calon member tertarik untuk bergabung. Ada yang karena suka dengan anak kecil, ada juga karena ingin belajar berinteraksi dengan anak kecil. Selain itu, ada juga karena memang ingin mengembangkan komunitasnya agar lebih dikenal orang. Selain karena sengaja ingin menjadi relawan," kata Dessy.

Saat ini, Komunitas Sabtu Baik memiliki 40 orang anggota atau member. Mereka berasal dari berbagai profesi, mulai dari Psikolog, Ahli Hukum, Bankir, Akuntan, hingga Designer. Memasuki tahun kedua keberadaannya, Komunitas Sabtu Baik sudah menyelenggarakan 23 kegiatan di berbagai tempat di Jakarta, Tangerang Selatan, Depok, dan Bogor.

Anak Agresif

Komunitas Sabtu Baik didirikan pada 20 Desember 2017 oleh Dessy Eka Purnama bersama Ravena Sifa. Salah satu alasan berdirinya Sabtu Baik adalah karena kegusaran Dessy terhadap fenomena yang ada di sekitarnya. Banyaknya anak usia dini yang berperilaku agresif dan mudah berkata kasar kepada teman-temannya.

Melihat itu, Dessy pun tergerak untuk memberi edukasi terkait nilai-nilai moral pada anak-anak. Salah satu yang dikerjakannya untuk anak-anak adalah mengajari mereka berbicara sopan di hadapan orang tua, dan membuang sampah pada tempatnya. Juga memberikan edukasi terkait bahaya bullying, serta menanamkan sikap untuk selalu menggunakan kata "maaf, terima kasih, dan tolong' kepada setiap orang yang ditemui oleh anak-anak.

Ke depan, Dessy berharap, komunitas yang didirikannya bisa memperluas jaringan media sosial dan jaringan komunitas hingga di beberapa kota lain di Indonesia. ❑

MBO

Ravena Sifa

Dessy Eka Purnama

"Awalnya Karena Ingin Punya Adik"

GELIAT Kominitas Sabtu Baik yang dilakukan selama dua tahun terakhir ini tak bisa lepas dari kiprah tangan dingin Dessy Eka Purnama (25), si pendiri sekaligus Ketua Komunitas Sabtu Baik. Sebelum berdirinya Sabtu Baik, Dessy sudah berkecimpung dalam dunia sosial, yaitu sekolah gratis bagi anak-anak pemulung di daerah Pondok Ranji Bintaro. Dalam satu minggu, anak tunggal pasangan Tri Ampriyanto dan Dian Triwindari ini memberi pelajaran Bahasa Inggris sebanyak dua kali secara prodeo.

Namun, kegiatan ini hanya berusia seumur jagung. Pada tahun kedua Dessy meninggalkan kegiatan tersebut. Penyebabnya, Dessy yang kala itu diterima bekerja di sebuah perusahaan, tidak memiliki waktu untuk terus mengajar. Apalagi, kelas yang menjadi tanggung jawabnya dilakukan pada jam kerja. Tepat setahun berkiprah dalam dunia pendidikan gratis, Dessy mengajukan memutuskan untuk mundur.

"Motivasi besar saya ikut mengajar karena sebagai anak tunggal, saya merasa butuh kehadiran seorang adik. Tetapi itu tidak saya dapat di rumah, akhirnya saya mencari dan menemukan di Pondok Ranji, sehingga saya rela dan senang mengajar di sana," cerita Dessy tentang kegiatannya tersebut.

Namun, setelah bekerja ia kembali merasa kesepian. Ia ketagihan untuk melakukan aktivitas sosial, khususnya untuk anak usia dini. Keinginan tersebut akhirnya ia sampaikan kepada Ravena Sifa yang tak lain adalah temannya sendiri. Dan, gayung pun bersambut, Ravena ternyata memiliki pandangan yang sama dengan Dessy. Akhirnya mereka berdua sepakat mendirikan Komunitas Sabtu Baik.

Sebagai tempat berkumpul, Dessy menggunakan rumah orangtuanya di Kota Tangerang Selatan. Namun, untuk bertemu, kopi darat, Sabtu Baik biasa memakai tempat di mana saja. Kadang taman, kafe atau tempat ngumpul anak-anak milenial lainnya, menyesuaikan jarak anggotanya.

Dessy yang kini tengah menempuh S2 Psikologi Profesi sekaligus berkarier di sebuah perusahaan swasta itu makin mantap menatap ke depan untuk meneruskan aksi-aksi sosial lainnya bersama Komunitas Sabtu Baik. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-75_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:51

H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH.

Kerikil Tajam Lebih Berbahaya *dari Batu Besar*

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

BARAT buah kelapa semakin tua semakin banyak santannya. Begitulah sosok seorang H. Abdul Wahab Dalimunthe, SH., anggota Fraksi Partai Demokrat MPR RI. Diusianya yang akan memasuki 81 tahun pada 10 Januari 2020, Abdul Wahab masih terlihat energik. Ia bisa bergerak dengan leluasa menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat dengan baik, ikut rapat dan melakukan kunjungan kerja tanpa terhalang faktor usia.

Abdul Wahab adalah salah seorang anggota MPR tertua pada periode 2019-2024. Nah, sebagai anggota MPR tertua, pada Sidang MPR Awal Masa Jabatan Anggota MPR periode 2019-2024 awal Oktober lalu, Abdul Wahab ditunjuk menjadi pimpinan sementara MPR RI yang bertugas memimpin sidang-sidang MPR sampai terpilihnya pimpinan MPR RI yang definitif. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pimpinan sementara MPR RI, dia didampingi oleh anggota MPR termuda, Hillary Brigitta Lasut, anggota MPR dari daerah pemilihan Sulawesi Utara dari Partai Nasdem.

Politisi kawakan asal Sumatera Utara ini sadar menjadi anggota legislatif bukan pekerjaan mudah. Selain faktor tenaga, fisik, dan pikiran, tantangan terberat dalam menjalankan tugasnya itu adalah godaan terhadap perbuatan korupsi. Karenanya jauh-jauh hari, anak ketiga dari tujuh bersaudara ini sudah menegaskan tekadnya untuk tidak akan berurusan dengan proyek, yang bisa menyeretnya ke ranah hukum.

"Saya pernah sekali menjadi saksi tindak pidana korupsi yang dilakukan orang lain, itu saja sudah membuat hidup saya tidak tenang, dag-dig-dug sepanjang waktu dan tidak bisa tidur nyenyak. Cukuplah

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-76_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:51

sekali itu saja, jangan sampai tersenggol lagi," katanya kepada Majalah *Majelis*, yang menyambangi ruang kerjanya pada pekan pertama November silam.

Ayah empat anak, hasil pernikahannya dengan Atikah Rahman, ini akan memanfaatkan kapasitasnya sebagai anggota legislatif periode 2019-2024 untuk sebanyak mungkin berbuat baik pada orang lain. Misalnya, ikut mencarikan informasi beasiswa pendidikan. Atau mencarikan bantuan bibit tanaman dan alat-alat pertanian bagi para petani. Juga bantuan sumur buat daerah-daerah yang terdampak kekeringan.

Ini penting karena masyarakat selalu menuntut sesuatu yang nampak. Mereka tidak paham soal tugas legislatif. Yang penting ada hasilnya nyata, bisa berwujud bantuan atau sumbangan. Kalau tidak mereka akan bilang para anggota dewan sudah melupakan warga yang memilihnya. Mereka menganggap, anggota dewan hanya turun saat berkampanye dan membutuhkan suara. Setelah itu akan lupa begitu saja, seperti kacang lupa akan kulitnya.

"Padahal kan tidak mungkin kita memenuhi semua yang mereka minta. Ada si A minta bantuan anaknya yang sakit. Si B mau bayar sekolah dan seterusnya. Kalau pas ada dan sekedar membantu pasti kita kasih, tapi kan tidak mungkin begitu itu berjalan terus. Paling kita bantu yang sifatnya kelompok. Misalnya, pembangunan masjid, madrasah atau pengaspalan," kata alumni SMA Negeri III Medan itu.

Abdul Wahab merasa bersyukur bisa terus berkarya diusianya yang ke-80 tahun sekarang ini. Baginya, semua itu adalah anugerah

yang sangat besar dari Allah SWT. Karena itu, ia merasa wajib mensyukuri, nikmat tersebut. Apalagi, ia merasa sudah banyak orang yang umurnya lebih muda tapi sudah meninggal terlebih dahulu. Bahkan, keponakannya seorang Kapolres meninggal terlebih dahulu karena penyakit diabetes.

Abdul Wahab adalah sosok yang sangat perhatian terhadap kesehatan. Terlebih setelah pembuluh darah menuju jantungnya dipasang ring hingga empat buah. Agar tetap sehat dan fit, ia selalu menyempatkan diri jalan santai, serta mengurangi konsumsi karbohidrat. Ia juga menghindari berbagai makanan yang berpotensi mengganggu kesehatan. Seperti sate kambing, daging sapi, dan durian.

Sadar bahwa menjaga kesehatan itu mahal dan tidak gampang, Abdul Wahab menyesalkan kebijakan pemerintah menaikkan iuran asuransi kesehatan BPJS. Menurut Abdul Wahab, persoalan BPJS itu langsung berurusan dengan masyarakat. Sehingga dampak kenaikan iuran BPJS langsung dirasakan oleh masyarakat. Karena itu, Abdul Wahab menyarankan agar iuran sektor lain saja yang dinaikkan, bukan BPJS.

"Sekarang saja saya kerap menerima kabar orang minta bantuan karena nunggak BPJS selama enam bulan sehingga kartunya tidak bisa digunakan. Bagaimana kalau dinaikkan," kata opung empat cucu ini.

Menyinggung kegaduhan yang diakibatkan beberapa orang menteri anggota kabinet Indonesia Maju beberapa waktu lalu, Abdul Wahab berharap kejadian seperti itu jangan sampai terulang. Ia memberi saran agar para menteri banyak melakukan koordinasi, sehingga kebijakan yang diambil bisa berjalan mulus. Dan, tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Pedagang Lembu

Sebelum menjadi anggota legislatif di Senayan, Abdul Wahab adalah sosok seorang birokrat dan politisi senior di Medan, Sumatera Utara. Pada 1985 dia pernah menjabat sebagai Bupati Kabupaten Tapanuli Utara. Selanjutnya ia menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 1998-2003. Di ranah legislatif, Abdul Wahab pernah menjadi Ketua DPRD Provinsi Sumatera Utara (2004-2009). Ia juga

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-78_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:52

mencalonkan diri menjadi Gubernur Sumatera Utara pada 2008, namun gagal.

Pada Pemilu 2009, Abdul Wahab berhasil melenggang ke Senayan. Berikutnya, periode 2014-2019, dia kembali lagi ke Senayan menggunakan jalur Pengganti Antar Waktu (PAW), menggeser kursi yang sebelumnya diduduki Ruhut Sitompul. Dan, pada periode 2019-2024, ia kembali terpilih setelah melalui proses kampanye yang sangat melelahkan.

"Sebenarnya saya sudah ingin berhenti dan tidak menghendaki jadi anggota lagi. Tetapi partai memerintahkan saya untuk maju lagi. Saya merasa kepercayaan tersebut harus dipertanggungjawabkan, makanya saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Datang ke tempat yang jauh hingga larut malam untuk bertemu masyarakat, menampung aspirasi sekaligus mohon dukungan," ujar Abdul Wahab.

Namun, Abdul Wahab tidak pernah menyesal dengan keputusannya. Ia bahkan bersyukur karena bisa memenuhi larangan neneknya. Apalagi, selain sang nenek, larangan meminjam uang kepada bank sering didengar dari guru-guru mata pelajaran agama, khususnya saat ia duduk di bangku sekolah dasar.

Saat hendak melanjutkan pendidikan ke jenjang SLTA, Abdul Wahab terpaksa pindah ke Medan. Ini dilakukan karena di Rantau Prapat belum ada SMA. Alasan lain yang mengharuskan dia pindah ke Medan, karena saat itu sang nenek telah tiada. Beruntung, di Medan ada saudara dari ayahnya yang bersedia menampung. Di situlah Abdul Wahab tinggal untuk menyelesaikan pendidikan SLTA, sebelum akhirnya pindah ke asrama saat ia memasuki bangku kuliah

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sederet prestasi yang diraih oleh Abdul Wahab, dari mulai diterima sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga akhirnya menjadi anggota legislatif selama tiga periode itu tidak diperoleh dengan mudah. Sebaliknya, dia merengkuhnya, setelah melakukan perjuangan yang sangat berat. Apalagi, sejak kecil hingga remaja perjalanan hidupnya dilalui penuh dengan keprihatinan dan kerja keras.

Sebelum masuk sekolah dasar, Abdul Wahab ikut dengan neneknya, Hj. Zubaidah. Pasalnya, sejak sebelum sekolah di pendidikan dasar, kedua orangtua Abdul Wahab, yaitu H. Daud dan Hj. Dinah sudah berpulang kepangkuan Allah SWT. Praktis H. Zubaidah-lah yang membentuk kepribadian dan memberikan banyak pelajaran kepada cucunya tersebut. Beruntung, neneknya adalah sosok yang tangguh dan sangat menyayangi keturunannya.

"Nenek saya adalah pedagang lembu. Dia kerap membawa lembu dari Gunung Tua di Tapanuli Selatan ke Rantau Prapat berjarak puluhan kilometer dengan berjalan kaki. Beliau melarang saya berhutang di bank, dan itu saya patuhi hingga sekarang. Padahal, kalau saja saya berani langgar pantangan tersebut mungkin saya sudah kaya, sebagaimana teman-teman saya yang membeli puluhan hektar lahan sawit pakai uang bank," cerita Abdul Wahab.

di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dalam kurun waktu 1960-1965.

"Paman saya ini orangnya kurang mampu sehingga saat saya di sana, ibaratnya hanya menumpang tidur. Sehari saya makan sekali pada waktu pagi, kemudian siang sampai sore di sekolah. Semua keperluan pribadi saya lakukan sendiri," tutur Abdul Wahab tentang masa lalunya.

Tidak berselang lama setelah lulus S1, Abdul Wahab pun diterima menjadi pegawai negeri sipil. Dua tahun berikutnya, ia sudah menjadi Sekretaris Daerah Kabupaten Labuhan Batu.

"Saat itu prosesnya alami, belum ada sogok-menyogok. Siapa yang mampu dialah yang akan terpilih. Saya ingat benar, saat dites oleh anggota dewan untuk menjadi sekda, saya katakan, kalau saya tidak takut batu besar karena mudah dihindari. Yang saya takuti adalah batu kerikil, karena kalau tidak waspada bisa-bisa kaki kita berdarah setelah menginjaknya, dan itu lebih berbahaya," ungkap Abdul Wahab Balimunthe. ❑

MBO

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-79_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:52

Aktualisasi Empat Pilar, Jawaban Atas Tantangan Masa Datang

PILAR adalah sebuah penyangga untuk bangunan. Sebagaimana bangunan, sebuah negara perlu memiliki pilar yang kokoh agar dapat berdiri tegak dan tidak mudah roboh menghadapi tantangan 'hari ini', terlebih tantangan 'hari depan' yang tidak terduga. Negara kita memiliki Empat Pilar berbangsa, yakni Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), dan Bhinneka Tunggal Ika. 'Hari ini' eksistensi Empat Pilar tersebut sedang mengalami ujian dalam berbagai bentuk.

Sebagai gambaran, survei nasional yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia pada 8-17 September 2019 menghasilkan temuan yang memprihatinkan bahwa dalam empat tahun, adanya kelompok warga yang menjadi semakin intoleran terhadap kelompok lainnya dalam hal politik (menjadi pemimpin pemerintahan). Temuan lain ialah intoleransi religius-kultural cenderung turun sejak 2010, namun penurunan ini berhenti di 2017. Pasca 2017 intoleransi religius-kultural cenderung meningkat, terutama dalam hal pembangunan rumah ibadah.

Survei dengan basis sampel 1.550 responden yang sudah berumur 17 tahun atau sudah menikah ketika survei dilakukan juga menghasilkan temuan bahwa dalam empat tahun, tren dominasi mayoritas cenderung meningkat. Semakin banyak yang setuju bahwa kelompok minoritas harus mengikuti kemauan mayoritas. Temuan survei itu semata contoh yang menunjukkan bahwa pilar Pancasila rentan menghadapi ujian berupa gangguan relasi antarumat beragama, bahkan gangguan kerukunan mayoritas-minoritas beragama.

Padahal, survei itu juga menghasilkan temuan bahwa mayoritas warga Muslim menilai bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 adalah yang terbaik bagi bangsa Indonesia saat ini (86,5%). Hanya 4% yang menyatakan bahwa Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan syariat dan setuju agar Indonesia menerapkan Syariat Islam. Pancasila sesungguhnya memenuhi semua kebutuhan untuk menjadi tiang penyangga bangsa Indonesia. Selain menjadi ideologi bangsa, Pancasila adalah pedoman hidup. Pancasila adalah pemersatu keanekaragaman kehidupan yang ada di Indonesia melalui sila-sila di dalamnya. Sayangnya, pada saat ini Pancasila belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan nyata sehari-hari, sebagaimana temuan hasil survei tersebut di atas.

Oleh karena itu, MPR berkewajiban untuk terus berupaya

Oleh:
Lestari Moerdijat
Wakil Ketua MPR RI

menjadikan Pancasila sebagai sendi utama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi hal ihwal yang kongkret di level warga, dan di dalam kehidupan nyata sehari-hari. Pilar yang kedua adalah UUD NRI Tahun 1945. Inilah hukum tertinggi di negara ini, sumber segala hukum yang harus diikuti dan dipatuhi.

Bukanlah hal tabu untuk melakukan amendemen terhadap UUD NRI Tahun 1945. Akan tetapi, menurut hemat saya, amendemen itu tidak boleh dilakukan tanpa mendengarkan masukan dan analisa dari semua pihak. Termasuk dengan jujur dan terbuka menerima berbagai pandangan, bahkan dari suara yang tidak setuju. Semakin keras suara yang tidak setuju, semakin harus didengarkan dengan seksama. Pilar yang ketiga adalah Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki arti yang sangat pokok, yakni berbeda-beda tetapi tetap satu. Bhinneka Tunggal Ika mempersatukan berbagai keanekaragaman suku, budaya, agama, golongan dan ras.

Saat ini kita dihadapkan pada sebuah kondisi di mana sesama anak bangsa lebih peka terhadap perbedaan daripada persamaan. Oleh sebab itu, pemahaman akan pluralisme merupakan keniscayaan yang harus ditegakkan, agar warga yang berbeda suku, agama, dan ras, hidup berdampingan saling menghormati, saling menghargai, hidup dalam harmoni keanekaragaman.

NKRI harga mati

Indonesia bukan negara kontinental. Indonesia negara gugusan ribuan pulau yang dibahasakan dengan indah, 'sambung menyambung menjadi satu'. Karena itulah, tidak ada yang lebih tepat, selain NKRI. Perubahan dahsyat sebagai akibat perkembangan teknologi tengah terjadi. Fenomena media sosial yang memengaruhi ruang publik dengan berbagai dimensi memiliki potensi risiko.

Jenis 'perang' baru muncul, dan sulit 'terbaca' . Perang idiologi terjadi dan dilancarkan melalui cyberwar. Kita sungguh tidak tahu kecanggihan teknologi macam apa lagi yang akan ditemukan di masa depan. Oleh karenanya, Empat Pilar yang kita miliki harus benar-benar menjadi pegangan agar negara tercinta ini terjaga dan mampu menghadapi perubahan zaman, baik yang terjadi di era Revolusi Industri 4.0 maupun di masa depan yang tidak terduga.

Melihat potensi beragam bentuk ujian terhadap bangsa ini di masa datang, perlulah kiranya kita mengaktualisasikan dan merevitalisasi cara-cara untuk menyosialisasikan Empat Pilar. Ada dua dari tujuh rekomendasi yang diwariskan MPR periode 2014-2019 yang perlu segera direalisasikan. Pertama, melakukan revitalisasi nilai-nilai Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, dengan mendorong pemerintah agar nilai-nilai Empat Pilar itu dimasukkan dalam kurikulum pendidikan di semua jenjang pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai ke perguruan tinggi.

Namun, perlu diingat, memasukkan ke dalam kurikulum pendidikan tidaklah efektif, jika materi ajar itu disampaikan dengan cara guru menjejalkannya kepada murid. Empat Pilar berbangsa itu sedikit atau banyak berwatak 'doktriner', karena itu diperlukan cara penanaman nilai-nilai yang lebih 'hidup' dan 'dialogis' yang cocok untuk generasi sesuai umur dan zamannya.

Kedua, membentuk lembaga kajian yang secara fungsional bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika serta implementasinya. Lembaga kajian ini harus berkolaborasi dan bersinergi dengan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk pemerintah , agar sosialisasi dan aktualisasi Empat Pilar berbangsa menjadi efektif dan tepat sasaran, dan negara tercinta - Indonesia Maju yang Satu sempurna terwujud. ❑

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-81_R1.pdf 1 10/12/2019 20:39:53

Mulang Tiuh Membangun Kesejahteraan Dari Desa

Anggota MPR dari Kelompok DPD asal Lampung menggelorakan semangat kembali ke desa, mengembang sumber daya alam yang ada di desa. Ajakan itu, dituangkan dalam sebuah buku, Mulang Tiuh.

LATAR belakang anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sangat beragam. Ada pengusaha, aktivis, kepala daerah, wartawan (penulis), dan profesi terhormat lainnya. Di antara mereka itu ada juga yang mempunyai keahlian di banyak bidang. Salah satunya adalah Bustami Zainudin, Anggota DPD Periode 2019-2024 asal Lampung yang sekarang menjadi Ketua Komite II itu. Sebelum berkantor di Kompleks MPR/DPR/DPD Senayan, Jakarta, Bustami Zainudin adalah Bupati Way Kanan, Lampung.

Selama menjadi orang nomer satu di Kabupaten Way Kanan, 2010-2015, mantan aktivis PMII itu juga pernah menjadi ketua di berbagai organisasi yang berlatar agama, profesi, seni, dan juga organisasi Pujakusuma. Di sela-sela kesibukannya sebagai bupati dan aktivis organisasi, Bustami menyempatkan diri menggoreskan pena dalam lembaran-lembaran kertas. Lembaran-lembaran yang berisi tulisan itu kemudian dibukukan yang diberi judul: *Mulang Tiuh.* Mulang Tiuh sebuah istilah dalam bahasa daerah Lampung, yang dalam bahasa Indonesia berarti Pulang Kampung, pulang ke desa.

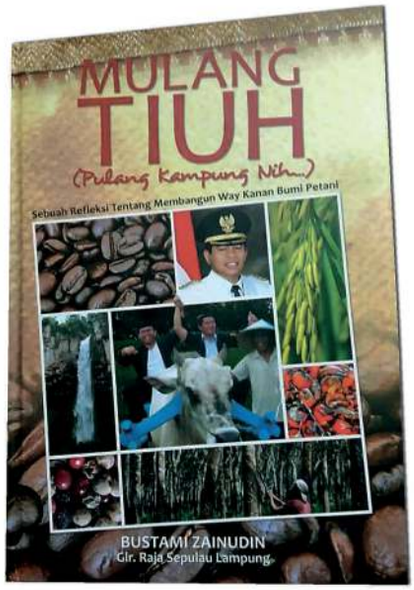

Bustami memilih *Mulang Tiuh* sebagai judul bukunya, tak lain dikandung maksud untuk menggambarkan semangat dalam mengembangkan sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan di Kabupaten Way Kanan. Sehingga dalam buku yang terbagi dalam empat Bab itu banyak menyodorkan kata petani. Alumni Universitas Lampung itu menginginkan agar ladang, sawah, dan kebun yang ada di Way Kanan mampu menjadi pilar perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam *Sekapur Sirih,* dia menguntai kata yang menggambarkan kesedihan atas nasib tanah dan petani di sana. Ia mengatakan, banyak petani kehilangan lahan karena dijual kepada pihak yang ternyata tidak benar-benar memanfaatkannya. Akibatnya, sepetak tanah itu pun menjadi tidak produktif. Tragisnya, di balik transaksi yang bernilai tak seberapa tersebut terkandung alasan sebenarnya, yaitu mereka tidak ingin anak-anaknya menjadi petani bahkan tinggal di *tiuh* menjadi pilihan memalukan.

Untuk menjawab kepedihan itulah, dalam Sub Bab IV, Bustami menggelorakan semangat bekerja di sektor pertanian dengan menghaturkan judul *Bangga Menjadi Petani.* Di awal tulisannya, pria yang pernah menjadi Dewan Pakar ICMI Orda Way Kanan itu mengutip Alqur'an, Surat Ar-Ra'ad ayat 4. Dalam surat itu dikabarkan, "Dan, di bumi ini terdapat bagian-bagian yang berdampingan dan kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, dan pohon korma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama. Kami melebihkan sebagian tanam-tanaman itu atas sebagian yang lain, tentang rasa (dan bentuknya). Sesungguhnyalah pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir".

Problem pertanian di negeri yang punya pepatah *gemah ripah loh jinawi* ini, menurut Bustami, di antaranya adalah anak-anak sekolah tidak diakrabkan lagi dengan kata-kata negara agraris atau hal-hal yang mengajarkan kita pada pola hidup kultur masyarakat agraris yang gemar bercocok tanam. Untuk itu dia mengusulkan agar di sekolah-sekolah diberi pengajaran muatan lokal, tak hanya budaya setempat namun juga cara bertani yang kreatif dan mandiri.

Dalam buku yang diterbitkan oleh *Institut Studi Arus Informasi* (ISAI) ini, Bustami ingin mengubah pandangan masyarakat terhadap dunia pertanian yang selama ini dianggap tidak tepat. Bustami mengatakan: "Saya ingin orang yang tadinya menganggap profesi petani dekat dengan jurang kemiskinan akan berpikir sebaliknya, bahwa mencari nafkah dengan menjadi petani adalah profesi yang paling menguntungkan. Saya akan mengubah anggapan menjadi petani hidup pas-pasan," paparnya. Dengan menjadikan petani sebagai profesi yang membanggakan, Bustami berharap, mereka yang sudah hidup mapan di kota akan *mulang tiuh.*

Apa yang ditulis Bustami didukung oleh Ryamizard Ryacudu, seorang tokoh nasional asal Lampung. Menteri Pertahanan dalam kabinet Joko Widodo Periode 2014-2019, dalam buku itu menulis bahwa program *Mulang Tiuh* membangun kampung halaman merupakan kiat untuk menjawab problematika yang ada di daerah otonom. Daerah, tulis Ryamizard, berlimpah sumber daya alam, namun mengalami keterbatasan anggaran untuk pengelolaan dan pengembangan. Sehingga daerah butuh investasi, butuh pihak lain yang memiliki modal untuk mengelola sumber daya alam yang ada untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kesejah-teraan masyarakat. "Jika hal demikian terjadi maka orang tidak akan tergoda ke kota untuk mencari pekerjaan", ujar Ryamizard. ❑

AWG

19993513_MAJELIS DESEMBER_T-82_R1.pdf 1

10/12/2019 20:39:53